

# **Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925-2010**



OLEH :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG  
2015**

# Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925- 2010

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang No.19 Tahun 2002.  
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini  
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari penerbit.

## **Penulis**

**Disain Cover**  
Rolly Fardinan

**Disain Isi**  
Rolly Fardinan

**ISBN**  
978-602-8742-87-0

**Percetakan**  
CV. GRAPHIC DELAPAN BELAS  
**Cetakan Pertama** : Desember 2015

Diterbitkan oleh :  
**Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “*Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925-2010*”

Menulis sejarah perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau merupakan pekerjaan yang berat dan melelahkan, tetapi mulia dan mengasyikan. Dikatakan berat, di samping memerlukan keberanian moral, juga membutuhkan dukungan data dan fakta yang *shahih* dan akurat. Sebab sejarah pada hakekatnya adalah merekonstruksi sumber-sumber primer yang mengandung nilai historis yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai literatur untuk menggali lebih dalam kevalidan peristiwa di masa lampau.

Penelitian ini menguraikan tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat. Adapun tahapan-tahapannya diawali dengan munculnya bibit reformasi, lahir dan berkembangnya Muhammadiyah. Kemudian juga diuraikan tentang kongres Muhammadiyah di Bukittinggi dan Muktamar ke-39 di Padang. Kemudian juga diuraikan tentang kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah payung organisasi Muhammadiyah, seperti Aisyiah, Hisbul Wathan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan mahasiswa

Muhammadiyah, Nasyyatul Aisyiah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan sebagainya.

Penelitian ini dapat selesai berkat kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang yang telah memberi saran dan masukannya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan data dan informasi tentang buku-buku yang ada kaitannya dengan organisasi Muhammadiyah yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas Perpustakaan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang yang telah memberikan data dan informasi mengenai buku-buku yang kami cari. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat diuraikan satu-persatu di sini, yang telah membantu kelancaran mendapatkan data dan sumber yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah Sumatera Barat. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka semua dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.

Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja keras menghasilkan karya yang baik, namun kajian dan penulisan laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan tangan terbuka, penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif kepada para pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

Semoga laporan hasil penelitian tentang Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau, Sumatera Barat 1925-2010 ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, Desember 2013

Penulis

## KATA SAMBUTAN

Diiringi puji dan syukur saya menyambut gembira atas selesainya laporan hasil penelitian tentang “Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau, Sumatera Barat (1925-2010). Uraianannya menyangkut masalah lahir, tumbuh dan berkembangnya Muhammadiyah di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1925 hingga tahun 2010.

Sebagai sebuah organisasi yang berjuang melakukan pembaharuan dalam kehidupan keagamaan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Muhammadiyah menetapkan landasan perjuangan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan sunnah Nabi. Memang banyak tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah Minangkabau dalam mengemban misinya itu.

Mengikuti riak gelombang perjalanan sejarah bangsa, Muhammadiyah telah menjadi sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia. Jika dilihat dari jumlah amal usaha yang telah dikembangkan oleh Muhammadiyah, baik dalam bentuk lembaga pendidikan maupun rumah sakit, kiranya tidak ada satu pun organisasi Islam yang dapat menandingi keberhasilan Muhammadiyah dalam mengemban misinya. Muhammadiyah di Minangkabau mempunyai ratusan lembaga pendidikan dari

SD hingga perguruan tinggi. Ini adalah berkat perjuangan kader-kader Muhammadiyah putra-putra terbaik ranah Minang.

Terimakasih saya ucapkan kepada penulis yang telah menyelesaikan laporan penelitian ini. Saya akui penulis telah bekerja keras dalam menyelesaikan tulisan ini, namun masih dirasa ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini, kepada para pembaca yang budiman dimohon bantuannya untuk memberikan saran, masukan dan kritikan yang konstruktif agar dapat diperbaiki di masa mendatang. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Padang, Desember 2013  
Kepala,

Drs. Nurmatias  
NIP. 196912261997031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Ruang Lingkup .....	12
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Kerangka Pemikiran .....	13
1.7 Tinjauan Pustaka .....	15
1.8 Metode Penelitian .....	18
1.9 Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II MASUKNYA MUHAMMADIYAH KE MINANGKABAU**

2.1. Bibit Reformasi .....	22
2.2. Lahirnya Muhammadiyah .....	29
2.3. Tumbuhnya Muhammadiyah.....	37
2.4. Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi .....	42
2.5. Muktamar ke-39 di Padang .....	51

### **BAB III PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI MINANGKABAU**

3.1. Pembinaan Kader .....	57
3.2. Kauman dan UMSB .....	59
3.3. Dinamika Kader Muhammadiyah.....	61
3.4. Kiprah di Politik .....	65
3.5. Wadah Organisasi.....	75
3.6. Amal Usaha .....	79

### **BAB IV PERKEMBANGAN MAJLIS/LEMBAGA DAN ORTOM**

4.1. Majelis/Lembaga.....	93
4.2. Organisasi Otonom .....	104
4.3. Perkembangan Daerah, Cabang dan Ranting.....	114
4.5. Kerjasama Dalam Negeri .....	140
4.6. Kerjasama Luar Negeri .....	143

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	149
5.2. Saran.....	152

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>
-----------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Istilah Minangkabau benar-benar bertuah. Siapapun orang Minang yang bepergian ke segala penjuru tanah air, bahkan ke luar negeri sekalipun, jika ada yang bertanya, di manakah negeri asalmu ? Jika dijawab dengan kata Sumatera Barat, lawan bicara agak bingung, karena kurang faham di mana letak Sumatera Barat dan apa identitasnya. Akan tetapi, jika disebutkan Minangkabau, orang baru mulai faham.

Memang agak menjadi menarik, sebab istilah Minangkabau akan menyambungkan pada suatu visualisasi aksesoris kebudayaan daerah yang identik dengan tarian adat yang menarik, rumah gadang/rumah adatnya yang elok, seni ukirnya yang indah. Kata-kata dan pantun yang membius pendengar, perempuannya nan rancak dan pandai menjaga harga diri. Ditambah keindahan alamnya yang berbukit-bukit dengan ngarainya yang indah dipandang mata. Sebaliknya jika menyebut Sumatera Barat, orang luar belum dapat membayangkan seperti apa daerah itu, pada hal yang dimaksudkan adalah juga Minangkabau itu sendiri.

Industri kulinernya, yang terkenal di Minangkabau sangatlah banyak. Di antaranya dari nasi kapau, gulai cubadak, palai bada, gulai paku pangek sapadeh ayam, *randang jawi*, hingga ikan pangek masin maupun randang lokan. Kuliner yang berujud kue dapat disebutkan di antaranya yaitu *lamang*, *katupek sapuluik*, *kalio*, *lapek sagan*, *kue singgang*, *kupuk balado*, *kripik sanjai*, *gelamai* dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua jenis masakan khas Minang tersebut tentu tidak ada di daerah lain. Semua orang Indonesia tahu itu dan ingin selalu menikmatinya. Jika ada orang luar yang kebetulan pergi ke Sumatera Barat, baik karena tugas negara, bisnis maupun hanya sekedar melancong, tentu tidak akan merasa puas jika tidak membawa oleh-oleh masakan khas Minangkabau tersebut.

Meski dengan segala kelebihan yang Allah karuniakan ke ranah Minang ini, sayangnya tidak sama besarnya apresiasi masyarakatnya. Sebenarnya jika dikaji lebih jauh ranah ini telah Allah berikan dengan banyak kemuliaan yang ditandai dengan banyaknya keistimewaan yang dimilikinya. Di antaranya di masa lalu telah banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat, baik mereka yang berprofesi sebagai ulama, politisi, pejuang, pedagang dan sastrawan dengan kelebihan adat-istiadatnya yang merupakan perpaduan Islam dan adat Minangkabau yang telah disebutkan dengan istilah "*Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato, adat mamakai*". Adat dan Islam telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Organisasi Muhammadiyah merupakan wadah sosial Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yang bercirikan Islam. Jangkauan anggotanya secara geografis dan etnis sangat luas. Bahkan hingga saat ini Muhammadiyah tidak hanya terdapat di wilayah Indonesia, tetapi juga mempunyai cabang-cabang di beberapa negara ASEAN, meskipun hubungan antara mereka dengan

induknya di Indonesia lebih bersifat aspiratif ketimbang instruktif.<sup>1</sup>

Sebagai organisasi Islam tetua di Indonesia sejak awal berdirinya mengkonsentrasikan gerakannya secara substansional adalah gerakan Islam<sup>2</sup>, dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti luas yaitu mengajak manusia untuk beragama Islam, meluruskan keislaman kaum muslimin serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara intelektual, sosial, ekonomi maupun politik. Pengelolaan organisasi dilakukan secara modern. Dikatakan modern karena proses regenerasi kepemimpinan berlaku secara berkesinambungan. Selain itu, tidak terjadi proses kultus individu yang memandang bahwa pemimpin organisasi ini bukan dipandang sebagai sosok individu yang paling sempurna.

Dalam usahanya untuk memurnikan pengamalan ajaran Islam (*purifikasi*) sekaligus mengangkat kehidupan ummat.<sup>3</sup> Muhammadiyah lebih berani menerapkan sistem modern,<sup>4</sup> meskipun dalam hal ini Muhammadiyah tidak jarang hanya

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, "Muhammadiyah dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 2, Vol. VI Tahun 1995, hal. 3.

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Muhammadiyah dan High Politik", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 2, Vol. VI, 1995, hal. 10.

<sup>3</sup> Secara umum maksud dan tujuan didirikan Muhammadiyah, seperti tertuang dalam AD-ART bab II pasal 3, adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. (Lihat *Muqadimah AD-ART Muhammadiyah*. (Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 1990), hal. 7.

<sup>4</sup> Misalnya Muhammadiyah dicatat sebagai pengenal (pencipta) sistem sekolah agama modern, yang merupakan metode rasional yang lebih menekankan pemahaman dan penalaran ketimbang hafalan. Hal ini berbeda sekali dengan sistem pengajaran yang berkembang ketika itu. Untuk lebih jelasnya lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (London : Combridge University Press, 1989), hal. 762.

melakukan adopsi<sup>5</sup> atau lebih mendasar pada nilai pragmatis,<sup>6</sup> yang sering menimbulkan masalah baru yang tidak kalah pelik dan kompleksnya, dari sinilah kemudian para cendekiawan menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharu), modernis dan sejenisnya.<sup>7</sup> Jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharu), ini semakin diperkuat dengan jargon-jargonnya, seperti *ijtihad*, tidak bermazhab, kembali pada al-Qur'an dan al-hadits dan sebagainya.

Bagaimanapun sulit membantah bahwa pada periode awal perkembangan Muhammadiyah telah menjalankan misinya dengan baik. Banyak data dan fakta yang diajukan untuk mendukung hal ini. Bahkan dengan gerakan purifikasinya, Muhammadiyah sering dituduh oleh kelompok lain yang tidak sepaham sebagai gerakan "Kaum Wahabi Indonesia".

---

<sup>5</sup> Muhammadiyah sering dikatakan mengadopsi pendidikan Barat mengkaji secara serius mengenai aspek filsafat pendidikan yang mendasarinya, pada hal pendidikan Barat yang diterapkan Belanda tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Misionaris Kristen. Untuk lebih jelasnya lihat Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian : Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596 – 1942*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 22-23 dan 144.

<sup>6</sup> Sifat responsif terhadap modernisme inilah yang patut direnungkan oleh kita semua, bukan semata-mata aspek sikap menentang bid'ah, kurafat dan takhayulnya. Gerakan Muhammadiyah ini banyak hal yang lebih praktis dan cocok untuk dipahami oleh masyarakat urban, misalnya shalat tidak usah pakai zikir yang panjang, shalat tarawih delapan rekaat, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat Masdar F. Mas'udi, "Perlu Membangun Kerangka Teologis", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 2, Vol. VI, 1995), hal. 20.

<sup>7</sup> Purifikasi atau pemurnian ini sering disebut sebagai gerakan pembaharu atau reformis Islam. Untuk lebih jelasnya lihat Harry J. Benda, *The Crescent and Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1980), hal. 70.

Pada awal abad ke-XX, pendidikan Islam di Nusantara masih ditandai oleh adanya sistem pendidikan yang dikotomis, antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Di satu sisi terdapat pendidikan madrasah yang mengajarkan pendidikan agama tanpa mengajarkan pendidikan umum, dan di sisi lain terdapat lembaga pendidikan umum yang tidak mengajarkan agama. Pendidikan Islam yang memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, terutqama jika dihubungkan dengan perkembangan masyarakat. Ummat Islam berada dalam tradisi pendidikan yang masih kontroversional.

K.H. Ahmad Dahlan, seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam dari Jawa berupaya menjawab permasalahan umat tersebut. Beliau berusaha memasukkan pendidikan umum ke dalam kurikulum madrasah, dan memasukkan pendidikan agama ke dalam pendidikan umum. K.H. Ahmad Dahlan menginginkan agar umat dan bangsa Indonesia memiliki jiwa kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air. Ia berusaha mengembangkan dan menyebarkan gagasan pendidikan modern ke seluruh pelosok tanah air melalui organisasi Muhammadiyah.

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, K.H. Ahmad Dahlan berusaha mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta dan cita-cita tersebut dapat terwujud pada tanggal 18 November 1912. Dari tahun ke tahun, organisasi Muhammadiyah terus berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah tanah air. Mengingat sangat besarnya peranan K.H. Ahmad Dahlan dalam merintis berdirinya organisasi Muhammadiyah, maka tidak mustahil jika ada banyak tokoh yang mengagumi perjuangannya. Pandangan terhadap tokoh pendiri Muhammadiyah di antaranya yaitu :

“Menurut Solichin Salam, K.H. Ahmad Dahlan lebih banyak bersifat manusia amal daripada manusia intelektual. Menurut Ruslan Abdulgani, cita-cita beliau banyak ditemukan walaupun

tidak dalam bentuk tulisan akhirnya dapat dibaca dari karya-karyanya. Sedangkan menurut Soekarno, beliau sebagai manusia amal manusia yang *sepi ing pamrih rame ing gawe*, manusia berjiwa besar yang dadanya penuh dengan cita-cita luhur penuh dengan semangat berjuang dan berkorban untuk kemuliaan agama.”<sup>8</sup>

K.H. Ahmad Dahlan menyadari perlunya persatuan umat secara terorganisasi melalui Muhammadiyah sehingga keberadaan organisasi ini dapat melakukan bidang usaha seperti pendidikan, sosial dan kesehatan. Wujud konkritnya yaitu organisasi Muhammadiyah telah mengembangkan banyak sekolah dengan pendidikan agama, madrasah, rumah sakit, balai kesehatan dan panti asuhan di seluruh penjuru tanah air. Harapan K.H. Ahmad Dahlan sesuai dengan visi organisasi Muhammadiyah yang mempunyai makna agar para anggota dan pendukungnya dapat mentauladani jejak langkah Nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup>

Secara garis besar, perkembangan organisasi Muhammadiyah memiliki susunan vertikal dan horizontal, maksudnya yaitu : “Susunan vertikal adalah struktur dalam organisasi Muhammadiyah dimulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dengan susunan sebagai berikut : Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan susunan horizontal yaitu dalam organisasi ini badan pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai garapan bidang

---

<sup>8</sup>Solichin Salam, *KH Ahmad Dahlan Reformers Islam Indonesia*, (Jakarta : Djajamurni, 1963), hal. 14-15.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 82-83.

usaha di bidang praktisnya yang dibentuk dan diadakan mulai di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.<sup>10</sup>

Sembilan tahun kemudian, setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah diizinkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk cabang organisasi Muhammadiyah di seluruh Nusantara. Hal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 36, tertanggal 2 September 1921. Adapun penyebaran organisasi Muhammadiyah setelah tahun 1921 yaitu Srandakan (Yogyakarta), Surabaya, Semarang, Garut (Jawa Barat), Jakarta, Madura, Padang Panjang, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat (Bangka), Medan, Lhokseumawe, Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Bontein (Sulawesi Selatan).<sup>11</sup>

Setelah mantap berdiri di Pulau Jawa, barulah Muhammadiyah mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Untuk wilayah Sumatera, yang menjadi sentral pengembangan Muhammadiyah adalah Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat kemudian disebar ke Sumatera Selatan, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur, termasuk juga ke daerah Aceh, bahkan juga ke Kalimantan dan Sulawesi. Sehingga timbul ungkapan “Muhammadiyah lahir di Jawa, Minangkabau yang membesarkannya”. Oleh karena Muhammadiyah lahir pada zaman penjajahan Belanda, maka perkembangan Muhammadiyah tidak dapat berjalan mulus. Ada riak dan rintangan yang selalu menghadang perjuangannya. Pemerintah Belanda amat sensitif terhadap segala bentuk kegiatan atau organisasi yang secara

---

<sup>10</sup> Muhammad Ilyas. *Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Bidang Sosial Budaya di Kotamadya Padang dan Sekitarnya Tahun 1959 – 1966*. (Padang : Skripsi S1, belum diterbitkan, STKIP-PGRI, 1988), hal. 3.

<sup>11</sup> MT. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta : Dunia Pustaka, 1987), hal. 123.

sengaja atau tidak sengaja mengobarkan semangat perjuangan kebangsaan.<sup>12</sup>

Keterlibatan pembangunan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak boleh dibiarkan karena sejak zaman Pemerintahan Belanda hingga masa kemerdekaan banyak sekali yang telah diperbuat Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan anak negeri. Meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi kehidupan bernegara saat itu.

Selain itu dalam organisasi Muhammadiyah terjadi suatu transformasi struktural dari watak pembaharu pemikiran (*tajdid*) ke watak perbuatan (*action*, amal). Hal ini bisa dipahami dalam kerangka tahapan sebuah proses yaitu amal merupakan tahapan operasional tesis-tesis pembaharuan yang telah diumumkan sebelumnya. Sehingga pendidikan yang dilatarbelakangi oleh watak sosial membuat perkembangan pendidikan khususnya di Sumatera Barat menjadi lamban seperti terjadi pada kemacetan berfikir, adanya anggapan yang dilahirkan dari orientasi pemikiran bahwa organisasi ini harus memikirkan kepentingan orang banyak terutama kelas rendah, miskin dan kurang terpelajar. Hal ini berarti bahwa semua amalan Muhammadiyah harus berorientasi dan dinikmati oleh rakyat banyak sehingga lahirnya sekolah Muhammadiyah tidak boleh mahal karena tidak akan terjangkau oleh rakyat kebanyakan.

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian pemikiran keislaman yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan sudah berumur cukup dewasa dan telah melewati berbagai pasang surut dalam perkembangannya. Dalam rentang waktu sejak berdirinya hingga sekarang, banyak kritikan dilontarkan, namun ia tetap adaptif dan

---

<sup>12</sup> "Lahir di Yogyakarta, Minangkabau Membesarkannya", dalam *Kompas*, Jum'at, tanggal 14 Desember 1990, hal. 12-13.



resistan berpegang pada garis perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.<sup>13</sup>

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang *amal oriented* pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang lahir dalam lingkungan budaya dunia ketiga. Rakyat dunia ketiga pada umumnya ditandai oleh adanya tiga tantangan, yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, tetapi pada hakekatnya sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan tidak mempunyai lembaga-lembaga modern dalam hal pendanaan, meskipun mayoritas kondisi umat Islam adalah kelompok minoritas.

Oleh karena itu, usaha mencerdaskan umat melalui kegiatan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat ditunda-tunda. Perbaikan mutu pendidikan adalah langkah merubah pola pemikiran, cara berbuat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi umat yang selalu berada dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bermental minoritas tampaknya telah menempatkan Islam sebagai agama yang belum dapat mengaktualisasikan dirinya sebagaimana yang diinginkannya.

Muhammadiyah dengan jumlah anggota dan partisipasi yang boleh dikatakan cukup besar perlu memantapkan jati dirinya secara prima agar berbagai tantangan dapat diubah menjadi peluang. Mengubah tantangan dan peluang adalah makna *tajdid* dari sebuah gerakan pembaharuan. Peluang-peluang sejenis hendaklah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk

---

<sup>13</sup> Alfian, "Peranan Muhammadiyah dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa Depan", dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta : Panjimas, 1981), hal. 73.

kepentingan agama, bangsa dan negara serta dijadikan tulang punggung menghadapi tantangan.

Kebangkitan ilmu dan amal di kalangan Muhammadiyah khususnya pada abad kelima belas Hijrah diharapkan mampu memandang dan menatap realitas sosial secara tajam dan dapat memperhitungkan karakteristik secara tepat. Keberadaan kaum intelektual yang berwawasan luas untuk menterjemahkan ajaran-ajaran dasar Islam ke dalam kehidupan nyata sangat dibutuhkan sehingga pemurnian ajaran islam ke dalam kehidupan keseharian merupakan sebuah keniscayaan.

Pada masa awal dilancarkannya pembaharuan di Sumatera Barat, ada tiga aspek yang menjadi sasaran pembaharuan Muhammadiyah, yaitu sosial kemasyarakatan, pendidikan dan paham keagamaan. Dengan corak pembaharuan yang demikian, Muhammadiyah mulai gerakannya lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai kini corak pembaharuan yang demikian masih tetap menyelimuti organisasi ini.

Dalam kurun waktu yang cukup lama perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat telah diwarnai oleh suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena tersebut dimulai pada dekade tahun 1930-an di mana gerakan selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan juga pada gerakan-gerakan politik yang jika dikaji lebih lanjut ternyata berawal dari tataran gagasan dan visi keIslaman dan kemanusiaan yang cukup tajam seiring dengan situasi saat ini.

Cikal bakal Muhammadiyah di Sumatera Barat telah ada sejak dibukanya *Thawalib School* di Padang Panjang. Hubungan antara Sumatera Barat dengan daerah –daerah lain di Sumatera bertambah kuat terjadi sekitar tahun 1920-an, yaitu pada waktu Sumatera Thawalib memperluas pengaruhnya ke kota-kota besar di Sumatera dengan membuka beberapa sekolah. Banyak guru-guru dari Sumatera Barat (Sumatera Thawalib) yang dikirim ke

Palembang, Aceh, Medan, Pekanbaru dan Jambi untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah di kota-kota tersebut.

Penelitian tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah di Provinsi Sumatera Barat menarik untuk dikaji, karena melibatkan banyak tokoh-tokoh Minangkabau yang berkiprah di daerah tersebut. Keterlibatan mereka dimungkinkan karena memang banyak tokoh-tokoh Minangkabau pada awal perkembangannya menjadi pendobrak pembaharuan di bidang pemurnian ajaran Islam.

## **2. Masalah**

Sesuai dengan tema yang akan diuraikan, maka masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat ?
2. Apa yang menjadi andil Muhammadiyah dalam pembangunan masyarakat Sumatera Barat ?
3. Sejauh mana keterlibatan organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan pemurnian ajaran agama Islam ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan penulisan tentang peran orang-orang Minangkabau Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat mempunyai dua tujuan yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus di antaranya yaitu :

1. Untuk mengungkap lebih jelas tentang perkembangan organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui sistem organisasi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan pemurnian ajaran Islam.

Selanjutnya mengenai tujuan umum dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan khalayak umum, khususnya para pembaca mengenai sejarah Muhammadiyah di Sumatera Barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan koleksi buku-buku terbitan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk penerapan syariah Islam di Sumatera Barat, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

#### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengungkapan dari hasil penelitian ini adalah mengenai organisasi Muhammadiyah yang berkembang di Sumatera Barat. Sesuai dengan judul yang diambil, maka ruang lingkup temporalnya sejak organisasi Muhammadiyah ini muncul di Sumatera Barat hingga masa kini, yaitu tahun 1930 – 2010. Sedangkan ruang lingkup spasialnya meliputi seluruh wilayah Sumatera Barat.

## 5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ada tiga macam. Pertama, manfaat akademis, yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dengan dibahasnya organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat, maka pengetahuan para pembaca akan bertambah. Kedua, manfaat untuk membina generasi penerus agar mengisi syariat Islam di Sumatera Barat melalui ilmu yang dikembangkan di Muhammadiyah. Dengan membaca perkembangan organisasi Muhammadiyah tersebut, khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang sangat relevan dengan diberlakukannya syariat Islam di Sumatera Barat. Manfaat ketiga, dapat mengetahui kiprah orang-orang Minangkabau dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah.

## 6. Kerangka Pemikiran

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial Islam yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan atau pemurnian ajaran Islam, memperbaharui sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman, mengembalikan dasar kepercayaan umat kepada tuntunan Al Qur'an dan Hadist, bersih dari bid'ah dan khurafat, serta menafsirkan ajaran Islam secara modern. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan berbagai kegiatan, seperti : dakwah Islam, memajukan pendidikan, mengadakan tabligh untuk membicarakan masalah-masalah Islam serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar dan majalah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900*, (Jakarta : LP3ES, 1985), hal. 86.

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah berusaha mengadakan pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi Islam, baik di sekolah, madrasah maupun pendidikan dalam masyarakat yang bersifat non formal. Artinya, dengan memajukan pendidikan, maka masyarakat Islam dengan sendirinya menjadi pribadi yang berkualitas, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu, Muhammadiyah sejak awal berdirinya melakukan kegiatan-kegiatan seperti membangun sekolah, madrasah yang diiringi dengan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Pada tahun 1950-an Muhammadiyah mengusulkan agar dalam kurikulum sekolah-sekolah umum dicantumkan mata pelajaran agama. Berkat usaha Muhammadiyah, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.<sup>15</sup>

Citra pembaharuan yang muncul dalam bidang pendidikan sepertinya berawal dari rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan yang diterapkan pada dua lembaga pendidikan yang ada pada saat itu, yaitu lembaga pendidikan pesantren yang dianggap konservatif dan pendidikan kolonial yang modern dan sekuler. Muhammadiyah melihat adanya segi-segi yang positif sehingga harus diangkat dari kedua lembaga pendidikan tersebut dan melahirkan pendidikan yang ketiga, yang merupakan kompromis antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan yang baru ini diterapkan untuk yang pertama kali dalam pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Wajah pesantren yang tampak dalam pondok ini adalah bahan pelajaran berupa kitab-kitab fikih as-Syafi'i Kitab Tasauf karangan Imam al Ghazali, Kitab Tafsir Jalauddin dan sebagainya. Sedangkanakan dari pendidikan kolonial hampir seluruh perangkat pendidikannya ditemukan di pondok ini.

---

<sup>15</sup> Iriani (Ed), *Peranan Muhammadiyah Dalam Sistem Pendidikan Islam di Padangpanjang 1950-1965*. (Jakarta : Departemen Kebudayaan dan pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2001), hal. 2.

Misalnya metode pelajaran, sistem pengajaran klasikal, ilmu pengetahuan umum yang terdiri dari lmu sejarah, ilmu hitung, menggambar, bahasa Melayu, Inggris dan Belanda.<sup>16</sup>

Sebelum Muhammadiyah mendirikan sekolah, terlebih dahulu menyelenggarakan kursus untuk anak-anak yang telah lanjut pelajarannya. Kursus ini diadakan pada malam hari, sedangkan pada pagi hari dan petangnya anak-anak tersebut harus mengikuti pendidikan formal.

Pada masa Kolonial Belanda, banyak anak yang ditolak masuk ke HIS (*Hollansch Inlansche School*). Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai persyaratan yang ketat sehingga pintu sekolah HIS hanya terbuka untuk anak-anak yang orang tuanya mempunyai kedudukan atau dari kalangan bangsawan saja. Sedangkan anak-anak dari kalangan rakyat biasa, tidak dapat diterima di HIS.

## 7. Tinjauan Pustaka

Sudah cukup banyak pustaka yang menyinggung masalah Muhammadiyah, baik dari segi peninjauan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Di sini penulis akan menyinggung beberapa pustaka yang menurut penilaian penulis merupakan pustaka yang cukup sarat dengan perbincangan serius tentang kenyataan dan masa depan Muhammadiyah. Buku-buku pustaka tersebut di antaranya yaitu :

*Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar* (1986)<sup>17</sup>, hasil suntingan M. Rusli Karim. Dalam pustaka ini telah disinggung

---

<sup>16</sup>Arbiyah Lubis, "Cita dan Corak Pembaharuan Dalam Gerakan Muhammadiyah", dalam Zamroni Mashuda, *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. (Banda Aceh : Gua Hira, 1995), hal. 35-36.

<sup>17</sup>M. Rusli Karim, ed., *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta : Rajawali, 1986).

tentang masalah *tajdid* dan keniscayaan Muhammadiyah perlu melakukan terobosan-terobosan baru agar vitalitas Muhammadiyah sebagai “pembaharu” tetap terjaga. *Muhammadiyah Kini dan Esok* (1990),<sup>18</sup> hasil suntingan M. Din Samsuddin, merupakan pustaka kedua yang layak dibaca. Dalam pustaka ini, walaupun nampak *gado-gado* dalam penyuntingannya, dituliskan tentang bagaimana pergulatan Muhammadiyah dalam kegiatan dan kesejarahannya. *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (1990),<sup>19</sup> yang ditulis oleh MT. Arifin. Dalam buku ini dibahas khususnya tentang *tajdid* di bidang politik.

Senada dengan tulisan MT. Arifin di atas adalah yang ditulis oleh Alfian yang berjudul “*Islamic Modernism in Indonesia Politics : The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period (1920-1942)*” (1969).<sup>20</sup> Disertasi ini dipertahankan di Universitas Winconsin. Seperti telah ditunjukkan dalam judul disertasi tersebut, karangan tersebut berisi pembahasan tentang kegiatan Muhammadiyah yang banyak langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah politik. Sedangkan tulisan kelima yaitu *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi* (1977),<sup>21</sup> merupakan tulisan yang langsung menggambarkan gerak Muhammadiyah dalam kaitannya dengan kegiatan Muslimin Indonesia (Masyumi), terutama pada masa-masa awal kelahiran partai tersebut.

---

<sup>18</sup> M. Din Samsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990).

<sup>19</sup> MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, (Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan pendidikan, 1990).

<sup>20</sup> Alfian, “*Islamic Modernism in Indonesia Politics : The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period (1920-1942)*” (1969). Winconsin : Disertasi, belum diterbitkan, 1990.

<sup>21</sup> Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta : Pustaka Utama Gratifi, 1977).



Buku yang juga dapat melengkapi penulisan ini adalah suntingan Syukrianto AR. dan Abdul Munir Mulkham yang berjudul *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah* (1990).<sup>22</sup> Pustaka ini memuat beberapa refleksi pemikiran para tokoh Muhammadiyah, khususnya tokoh-tokoh mudanya, walaupun di sana sini ada selingan tulisan orang luar, seperti tulisan Dr. Sudjatmoko misalnya. Pustaka lain yang patut dicatat adalah disertasi Din Samsuddin yang berjudul *“Religion and Politics in Islam : The Case of Muhammadiyah in Indonesian’s New Order”* (1991)<sup>23</sup> yang dipertahankan di Universitas California. Seperti judulnya, disertasi ini menguraikan tentang posisi Muhammadiyah dalam percaturan politik pada masa Orde Baru.

Daoed Sampoerno, *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah yang Berkualitas*, Yogyakarta : Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 2000.<sup>24</sup> Buku ini berisi tentang bentuk amal usaha Muhammadiyah; Selanjutnya MT. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta : Dunia Pustaka, 1987.<sup>25</sup> Buku ini berisi tentang kebijakan penjajahan Jepang terhadap kurikulum sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah dan pengaruhnya bagi Muhammadiyah.

Kemudian pustaka yang terakhir adalah *Muhammadiyah menuju Milenium III* yang diedit oleh M. Muchlas Rowi, M. Izzul Muslimin dan Paryanto Rahma (1990) yang memuat beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan agenda masalah yang patut

---

<sup>22</sup> Syukrianto AR dan Abdul Munir Mulkham, ed., *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta : SIPRESS, 1990).

<sup>23</sup> Din Samsuddin, *“Religion and Politics in Islam : The Case of Muhammadiyah in Indonesian’s New Order”* (1991).

<sup>24</sup> Daoed Sampoerno, *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah yang Berkualitas*, (Yogyakarta : Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 2000).

<sup>25</sup> MT. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta : Dunia Pustaka, 1987

dijadikan perhatian dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000.

Sebenarnya masih banyak pustaka yang belum disebut di sini, terutama pustaka yang berbicara tentang Muhammadiyah secara umum. Namun untuk yang berkaitan dengan pokok persoalan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, menurut penulis, kiranya sudah memadai. Sungguhpun demikian, pustaka yang disebut di atas jelas belum ada yang secara khusus menyoroti pergerakan organisasi Muhammadiyah yang berkembang di Minangkabau Sumatera Barat.

## 8. Metode Penelitian

Penulisan sejarah selalu berangkat dari jejak-jejak peninggalan atau rekaman dan ingatan tentang peristiwa masa lampau, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bekas peninggalan atau rekaman masa lalu tersebut dapat disebut sebagai sumber sejarah. Oleh karena itu, para peneliti dan penulis sejarah menggunakan sumber-sumber sejarah tersebut sebagai bahan untuk diolah menjadi kisah sejarah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka proses untuk menghasilkan sejarah sebagai kisah, maka penulis harus berpegang pada pendekatan sejarah yang multi disipliner. Dengan pendekatan sejarah yang multi disipliner itulah, maka peristiwa sejarah dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka metode yang akan ditempuh adalah melalui metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi/penulisan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press, 1985), hal. 34.

Tahap pertama, heuristik yaitu upaya pencarian sumber terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui penelitian di perpustakaan (*library research*), dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan metode sejarah lisan. Dari sumber-sumber yang ditemukan, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berhubungan dengan informasi dari nara sumber. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku penunjang atau literatur, melalui studi perpustakaan yang ada di Bukittinggi, Padang Panjang dan kota Padang.

Sumber-sumber lisan dikumpulkan dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan wawancara secara langsung yang daftar pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan pihak yang diwawancarai adalah tokoh Muhammadiyah yang ada di Sumatera Barat, seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Painan, Padang dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat. Tahap kedua berupa kritik sumber, dilakukan dengan membuat perbandingan dari beberapa sumber atau dengan membandingkan fakta-fakta yang ada sebelumnya. Tahap ketiga, interpretasi, yaitu menguraikan data menjadi fakta yang membutuhkan kerangka dan dasar pengertian obyek penelitian dan dilakukan dengan bantuan konsep dan teori. Tahap keempat, historiografi. Tahap ini merupakan tahap penulisan sejarah. Fakta-fakta yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan dalam suatu penulisan yang sistematis dan kronologis sesuai dengan tema dan judul penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial keagamaan, maka di samping menggunakan metode sejarah, juga meminjam ilmu bantu dari ilmu sosial, antropologi, politik, budaya dan agama.

## 9. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan mengenai “Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau, Sumatera Barat” terdiri atas lima bab dan akan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas tujuh sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Pada bab dua menguraikan masalah masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau yang dijabarkan dalam lima sub bab yaitu penjelasan tentang bibit reformasi; kemudian dilanjutkan tentang uraian lahirnya Muhammadiyah di Minangkabau dan diikuti uraian tentang tumbuhnya Muhammadiyah di sana. Selanjutnya pada sub bab empat menguraikan tentang Konggres Muhammadiyah di Bukittinggi dan kemudian dilanjutkan uraian tentang Mukhtamar Muhammadiyah ke-39 di Padang.

Bab tiga adalah uraian tentang Perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau. Dalam bab ini terdiri atas 6 sub bab yaitu pertama tentang pembinaan kader Muhammadiyah, kedua; menjelaskan tentang perkembangan Muhammadiyah Kauman di Padang Panjang. Setelah itu diuraikan tentang perkembangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ketiga, menguraikan tentang dinamika kader Muhammadiyah di Minangkabau; keempat diuraikan tentang kiprah Muhammadiyah dalam bidang politik Pada sub bab kelima berisi tentang wadah organisasi Muhammadiyah dan terakhir menjabarkan tentang amal usaha yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah.

Bab empat menguraikan masalah perkembangan majelis, lembaga dan organisasi otonom yang ada di Sumatera Barat. Adapun organisasi otonom yang tersebar di daerah-daerah di

Sumatera Barat di antaranya yaitu Aisyiyah, Hisbul Wathan, Nasyiyatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan uraian tentang perkembangan daerah, cabang dan ranting yang ada di berbagai daerah di Sumatera Barat, di antaranya yaitu kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Padang.

Terakhir adalah uraian tentang Bab lima. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pada penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab terdahulu. Kemudian uraian tentang saran-saran atau masukan bagi pamerintah setempat.

## BAB II

# MASUKNYA MUHAMMADIYAH KE MINANGKABAU

### 2.1. Bibit Reformasi

Ketika Redaktur al-Munir, Haka bertandang ke Yogyakarta pada tahun 1917, beliau disambut hangat bahkan antusias oleh teman seangkatannya KH Ahmad Dahlan, yang sebelumnya telah mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H/ 18 November 1912 M. Terpaut tiga hari menjadi tamu Muhammadiyah, selain berdecak kagum dengan keberanian Ahmad Dahlan mengibarkan bendera Muhammadiyah, apalagi di tengah apa yang disebut *culture of feudalism* di Yogyakarta, keduanya asyik-maksyuk membincang keberlanjutan pemurnian dan pembaharuan Islam di Nusantara.

Setelah merentang komunikasi dua arah, dari hati ke hati dengan KH Ahmad Dahlan, kemudian menyelami kondisi sosial obyektif keber-Islaman masyarakat Jawa yang masih terpaku di kantong-kantong nativisme, Haka kembali ke Minangkabau. Begitu mencacahkan kaki di kampung halaman, beliau memproklamirkan tegak berdirinya Sumatra Thawalib (Februari 1918). Yaitu sebuah lembaga

pendidikan formal berpaham pembaharuan di Padang Panjang.<sup>27</sup>

Hanya berselang dua tahun, perguruan Thawalib kian menapak maju. Terbukti, tidak sedikit orang tua, terutama di Minangkabau menyerahkan anaknya guna menuntut ilmu ke kota berhawa sejuk itu. Satu di antaranya tercatatlah nama Ahmad Rasyid (AR) Sutan Mansyur. Pada tahun 1921, sang murid yang berotak brilian, kelahiran 27 Jumadil Akhir 1313 H/15 Desember 1895 M tersebut, merantau ke Jawa dan menetap di Pekalongan. Allah menakdirkan di bumi Pekalongan ini pula AR Sutan Mansyur berkenalan dengan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Ikhwan seperjuangan Haka ini berkunjung ke Pekalongan secara berkala dan kontinyu guna membina *ruhu al-Muhammadiyah* dan keorganisasian yang mulai tumbuh dan mengelopak di Pekalongan serta di Pulau Jawa pada umumnya. Perkenalan AR Sutan Mansyur dengan KH Ahmad Dahlan semakin bergetah. Sebab, selain murid kesayangan di Thawalib Padang Panjang, AR Sutan Mansur adalah menantu Haka. (istri AR Sutan Mansur (Fatimah) adalah kakak kandung Haka).<sup>28</sup>

Setelah mengikuti wejangan al-Islam yang mengalir jernih dari KH Ahmad Dahlan, membuat putra Maninjau ini kian terkesima. Kepiawaian Ahmad Dahlan dalam menggembleng dan membangkitkan semangat pembaharuan di tubuh Muhammadiyah Pekalongan, menggiring alam pikir AR Sutan Mansur akan kondisi keberislaman masyarakat Minang yang ditinggalkannya.

---

<sup>27</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) Dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : Surau Muhammadiyah), hal. 88.

<sup>28</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 89.

Pendekatan Ahmad Dahlan dalam menghunjamkan semangat Islam dan ke-Muhammadiyah secara edukatif, persuasif, argumentatif, tajam dan kritis (bi al-hikmah, mau'izhah wa al-mujadalah (QS(16): 125), sekali lagi membuat AR Sutan Mansur semakin terkesima. Muaranya, AR Sutan Mansur (1923) menyatakan diri secara ikhlas (*haqqul yakin*) bergabung dengan Muhammadiyah.

Paling tidak menyelinap tiga latar belakang ketertarikan beliau dengan organisasi tertua dan terbesar itu. *Pertama*, ide yang dikembangkan Muhammadiyah sama bahkan sebangun dengan gerakan pembaharuan di Minangkabau. Yaitu mengembalikan pemikiran dan pemahaman ummat kepada doktrin tauhid yang sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah SAW. *Kedua*, pada cabang Muhammadiyah Pekalongan khususnya, AR Sutan Mansur menemui Islam dalam tataran implementatif dan aplikatif (amaliah konkrit). Suatu ketika, disaksikannya anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih hewan qurban pun diantar langsung ke rumah fakir miskin. Dibandingkan dengan tanah kelahirannya, ajaran Islam justru lebih banyak diilmui dan diwacanaikan. Yang namanya zakat (zakat mal dan zakat fitrah), infaq, shadaqah dan daging qurban- bukannya hak prerogatif (*mustahaq*) *fukara' wa al-masakin*, melainkan dinikmati oleh tuan guru, syekh, mursyid dan orang-orang siak lain. Tegasnya, menalar di pembuluh darah AR Sutan Mansur bahwa, denyut Islam di Pekalongan, di Yogyakarta dan di sebagian komunitas ummat di Pulau Jawa yang telah disentuh Muhammadiyah, lebih membumi, walau diawali dari hal-hal yang nampaknya sederhana.

*Ketiga*, sebagai seorang yang telah mendalami pembaruan Islam, dalam telaah AR Sutan Mansur terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Islam di



Minangkabau dengan Islam di tanah Jawa. Yang disebut pertama, di samping masih membanggakan dan malah “*memanggakkan*” Islam keturunan, dan atau Islam sosiologis, sebagian besar lembaga pendidikan formal dan informal, terutama yang hidup di bawah sungkup Kaum Tua masih saja melusuhkan diri dalam sistem hafalan yang santai. Dampaknya, Islam nyaris tidak pernah dirasakan sebagai suatu yang mampu mengkritisi/menawarkan solusi bagi memecahkan berbagai permasalahan krusial yang mengitari bahkan diderita ummat. Akibat lebih jauh, ummat Islam tetap saja diselimuti awan gelap kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.<sup>29</sup>

Sedangkan yang disebut kedua (di Jawa), ternyata Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam yang dirasakan faedahnya oleh masyarakat dalam kesehariannya. Muhammadiyah di Jawa sangat konsen memadukan antara iman, ilmu dan amal, yang diterjemahkan hampir ke dalam semua aspek kehidupan. Sehingga Muhammadiyah pada gilirannya termashur sebagai gerakan amal. Sampai-sampai sang pendiri Muhammadiyah, gurunya AR Sutan Mansur tersebut, mencantumkan dalam satu aqidah : “Tidak akan berdiri Muhammadiyah di suatu tempat kecuali di sana telah tegak plang amal usaha. Misalnya surau/mushala, madrasah atau Panti Asuhan dan Balai Kesehatan. Minimal ada kelompok pengajian yang gigih menyantuni anak yatim dan fakir miskin”. Kendatipun di Pulau Jawa sendiri cukup banyak rintangan dalam bentuk TBC melalui aliran kejawen/kebatinan.

Karena faham Islam bersayap pembaharuan telah terpatri di dada AR Sutan Mansur, ditambah keshalehan

---

<sup>29</sup>Mardjohan, *Muhammadiyah, Antaraldeakisme dan Pragmatisme*, (Lubuk Sikaping : Mita Luhur, 2006), hal. 35.

beliau mengamalkan al-Islam-termasuk dalam konteks *ibadah mahdhah*- yang antara lain ditandai konsisten menunaikan shalat tahajjud hampir tiap malam (salah satu syarat tidak tertulis/konvensi menduduki jabatan di Muhammadiyah), maka tidaklah heran pada tahun 1923 beliau diamanahi menggenggam jabatan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan.

Pada tahun 1924 dan 1925 AR Sutan Mansur turut menghadiri Konggres Islam Hindia yang dipimpin HOS Cokrominoto dan Agus Salim di Surabaya dan Cirebon. Pada kedua kongres itu beliau sempat mengingatkan agar pemimpin Islam menuruti ajaran Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan. Pada tahun 1929 beliau diutus oleh Pengurus Besar untuk menegakkan Muhammadiyah di Kalimantan; Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mandawai dan Amuntai<sup>30</sup>.

Ketika itu, dalam Konggres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung 14-21 Maret 1930 di Bukittinggi. Di forum tertinggi yang kini disebut Muktamar itu, diputuskan bahwa setiap karesidenan harus ada wakil *Hoofdbestur* Muhammadiyah- yang dinamai Konsul Muhammadiyah. Karena dinilai sukses membiduki kecabangan Muhammadiyah Pekalongan, maka untuk masa jabatan 1931-1944 AR Sutan Mansur lagi-lagi dikukuhkan sebagai Konsul Muhammadiyah (sekarang Ketua Wilayah) Minangkabau. Dan rentang kendali (*span of control*) Konsul Muhammadiyah Minangkabau secara organisatoris meliputi Tapanuli dan Riau.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Asyuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hal., 41.

<sup>31</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Op.Cit.*, Hal. 92.

Pada tahun 1942-an, tepatnya sejak Jepang mencacahkan kaki di Indonesia, yang pertama dirasakan putusnya telekomunikasi (masih manual) Jawa- Sumatra, AR Sutan Mansur dipercayai oleh Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah memegang tampuk Konsul Besar Muhammadiyah untuk Pulau Sumatra. Dalam waktu hampir bersamaan, beliau ikut membidani perubahan nama dari Tabligh School menjadi KuliyatulMuballighin Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang yang pernah dipimpinya 1933-1935.

Di sekolah inilah AR Sutan Mansur dan kawan-kawannya mendidik dan menggembleng da'i dan kader-kader militan guna menyebarluaskan Muhammadiyah di berbagai pelosok Minangkabau dan sekitarnya. Kelak mubaligh-mubaligh produk Kauman ini pula yang ikut memainkan peran penting bersama-sama pemimpin Muhammadiyah Yogyakarta dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah menjelajah hampir di seluruh penjuru tanah air.

Menurut Buya SAS Abuya, AR Sutan Mansur merumuskan organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai berikut :

Pertama : Muhammadiyah :

1. Segolongan orang mukmin yang meramaikan mesjid Allah dengan ruku' dan sujud untuk mengharap kurnia Allah.
2. Mereka berbaris (bershaf) bersama-sama untuk hijrah kepada Allah dan siap sedia membela agamanya.
3. Mereka setia mengikuti Rasulullah dengan alat sebuah organisasi.

4. Tengah malam mereka sujud dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.
5. Al-Quran mereka letakkan di muka untuk diikuti bersama.
6. Semua perintah agama mereka lakukan, semua larangan dijauhi.
7. Mereka bertekad hendaknya mati dalam berjihad menegakkan Islam.<sup>32</sup>

Kedua, Aisyiyah :

1. Segolongan wanita mukminat yang berpegang teguh dengan agama Allah.
2. Jiwa mereka bersatu padu dalam satu organisasi kerja Aisyiyah di dalam menempuh jalan lurus yang terbentang.
3. Mereka taat beribadah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan Hikmah Allah di rumahnya.
4. Mereka semuanya setia kepada Allah dan Rasul-Nya. (ZAS : KH. A Dahlan aku Titipkan Muhammadiyah kepadamu : 1981 :23).

Jasa baik yang ditabur AR Sutan Mansur, semakin menggelembungkan reputasi dan nama harumnya di mana-mana. Bukti nyata, beliau berhasil menduduki posisi puncak di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Diminta kesediaannya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1953-1956, pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Kendati pun pada waktu itu beliau tidak termasuk daftar calon untuk dipilih, tetapi karena

---

<sup>32</sup>*ibid.*, hal. 95.

kharismatiknnya semakin dirasakan ummat, termasuk di luar Muhammadiyah sehingga dipilih kembali pada Mukttamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang untuk periode 1956-1959. AR Sutan Mansur tercatat orang pertama di luar Jawa yang terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian disusul oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Prof. Dr. Din Syamsudin (Sumando orang Minang) sebagai orang kedua dan ketiga.

Pada tahun 1924, Haka telah merintis berdirinya sebuah perkumpulan Islam di Sungai Batang, Tanjung Sani, Maninjau, Luhak Agam bernama : "*Sendi Aman Tiang Selamat*".<sup>33</sup> Maksud dan tujuan organisasi mungil yang bersifat lokal tetapi kuat ini, pada hakekatnya sama dengan tujuan Muhammadiyah seperti yang dilihatnya di Yogyakarta ketika menjadi tamu KH Ahmad Dahlan dahulu.

## 2.2. Lahirnya Muhammadiyah

Begitu menghirup kembali udara Maninjau, walaupun menetap di Padang Panjang guna mengayomi Sumatra Thawalib, namun Haji Abdul Karim Amrullah (Haka) sebagai tokoh sentral bagi pergerakan Islam di Minangkabau dan bahkan di tanah air tetap mengulurkan motivasi agar Muhammadiyah secara organisatoris segera diproklamirkan di ranah Minang. *Katobajawek gayuang basambuik!* Pada 29 Mei 1925, diselenggarakan musyawarah di Sungai Batang, Maninjau. *Duduak barapak* dan *baiyo batido* itu, dipimpin oleh AR Sutan Mansur, dihadiri unsur *tungku tigo sajarangan-tali tigo sapilin*, pemuka masyarakat, termasuk rombongan yang baru pulang dari rantau.

---

<sup>33</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 96.

Setelah *dibaliek-baliek bak mamanggang, diinok-inok dimanuangkan, ditalungkuik-ditalantangkan* – akhirnya : *Bulek aia dek pambuluah- bulek kato dek mufakat- bulek lah bulieh di guliangkan- pipieh lah bulieh dilayangkan* :Perkumpulan *Sendi aman Tiang Selamat* yang sedang dipimpin Haji Yusuf Amrullah (adik Haka), dilebur dan diubah nama menjadi *Muhammadiyah*.<sup>34</sup> Dengan demikian, secara legalitas formal “*marawa*” Muhammadiyah telah dipancarkan di ranah Minangkabau sesuai obsesi besar kaum sejarawan Muhammadiyah, sebagai group Muhammadiyah pertama di Minangkabau. Jadi, betul-betul tumbuh dari bawah dan atas aspirasi warga yang merindukannya.

Guna mengayunkan sumbu persyarikatan Muhammadiyah yang “jolong tagak”, disusunlah kepengurusan berpola maksimal : Pemuka I dan II, masing-masing dipercayakan kepada Dt. Penghulu Basa dan Dt. Sidi Bandaro. Sedangkan Juru Surat I dan II masing-masing dipegang oleh Sainuddin Kari Pamuncak dan Ismail Sutan Jamaris. Sementara Juru Uang dipegang Sutan Palembang. Agar lebih bergreget terutama dalam kerangka gawe yang berorientasi teknis operasional, ditetapkan pula 12 orang unsur pembantu pimpinan – yang disebut Komisariss. Harap mafhum! Anggota pertama Group Muhammadiyah Maninjau ini , tidak lain adalah anggota Perkumpulan Sendi Aman Tiang Selamat dengan jumlah tidak kurang dari 366 orang. Pada paruh 1925 itu juga, angkanya membengkak cukup signifikan, yaitu menjadi 878 orang. Yang membuat pengurus bernafas lega, angka sebanyak itu justru terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kaum hawa inilah kelak

---

<sup>34</sup>Agus Widiarto, *Gerakan Pembaharuan Islam*, Artikel di Republika, Edisi 15 Mei 2009.

sebagai embrio organisasi dan atau pergerakan *Aisyiyah* di Minangkabau.

Penetapan pengurus dengan *designe of maximal* dan ditiang penyanggai oleh kuantitas anggota yang relatif banyak, Group Muhammadiyah Sungai Batang, dalam waktu singkat, berhasil menginisiatori group-group Muhammadiyah di sekitar Danau Maninjau. Misalnya : Group Muhammadiyah Pandan, berdiri tahun 1926; Group Muhammadiyah Sigiran berdiri 2 Juli 1927; Group Muhammadiyah Gelapung berdiri 15 Juli 1927; Group Muhammadiyah Arikir berdiri 8 agustus 1927; Group Muhammadiyah Batu Nanggung tanggal 4 September 1927; Group Muhammadiyah Tanjung Sani tanggal 1 Januari 1928.

Seiring dengan itu, berdiri pula Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Enam rumah warga, dan satu milik Dr. Haka, diperuntukkan sebagai hak pakai bagi menampung murid sejumlah 235 orang. Untuk kelancaran proses belajar mengajar (PBM), dipilih empat mudaris. Sedangkan pimpinan madrasah dipercayakan kepada Muhammad Yatim Sutan Basa, jebolan kelas 7 Thawalib Padang Panjang yang ketika itu masih dinahkodai Dr. Haka.<sup>35</sup>

Satu hal yang menarik menurut Buya R.I Dt. Sinaro Panjang bahwa di Padang Panjang "*Lahir anak sebelum bapak dan ibu lahir*" yang dimaksudkan adalah pada tanggal 1 Januari 1924 atas anjuran Haka juga berdirilah satu organisasi bernama "Tabligh Muhammadiyah" dengan singkatan T.M. dengan ketua Musa St. Ma'ruf, Sekretaris Yusuf M. Nur Amrullah dan anggota antara lain Haka yang baru pulang dari Jawa. Organisasi ini mendapat dukungan

---

<sup>35</sup>Ahmad Jainuri. *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya : Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2002), hal. 49.

dari Syekh Abd Karim Amrullah dan adiknya Syekh Yusuf Amrullah karena dipelopori oleh pelajar-pelajar Sumatra Thawalib yang berasal dari sungai Batang, Tanjung Sani Maninjau. Salah satu kegiatannya untuk membuka wawasan berfikir adalah menerbitkan berita bulanan yang diberi nama "Chaatib ul Ummah" dengan redaktornya Hamka dan administrasi Yusuf M. Nur amrullah.

Walaupun berposisi sebagai inspirator dan inisiator Pergerakan Islam melalui Muhammadiyah, tidak saja di Maninjau dan Padang Panjang- juga di Minangkabau bahkan di tanah air pada umumnya, namun juga yang bernama *Allahu yarham* Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, hingga wafatnya tetap saja tidak terdaftar dan tidak mendaftar sebagai anggota Muhammadiyah.

Pada mulanya hubungan antara Muhammadiyah dengan pemuka-pemuka adat dan penguasa pribumi baik-baik saja. Tetapi kemudian kaum adat merasa pengaruhnya semakin menyusut karena pimpinan dan pemuka Muhammadiyah tampak semakin mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga semakin lama timbul ketidakserasian yang akhirnya menjadi pertentangan.

Melihat perkembangan Muhammadiyah yang semakin maju dan mendapat tempat dihati masyarakat itu, pihak penguasa semakin curiga. Kecurigaan itu semakin bertambah karena ada kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda tentang Ordonansi Guru ditentang oleh Muhammadiyah. Di samping itu, perbedaan faham antara kaum muda dan kaum tua juga menimbulkan gesekan yang tak dapat dihindarkan. Sesuatu yang agak unik terjadi dalam perkembangan Muhammadiyah Minangkabau, yaitu PKI dengan menggunakan ayat-ayat Al Quran dapat mempengaruhi sebagian ulama dari Sumatra Thawalib dan



ulama lainnya di bawah pengaruh Dt. Batuah yang menyeberang dari Sumatra Thawalib. Ajaran Islam yang tidak dapat menerima penjajahan bangsa asing telah dieksploitir untuk menarik simpati para ulama agar bergabung dengan mereka. Sehingga para ulama pada waktu itu terpecah, ada yang mengikuti Muhammadiyah dan ada pula yang masuk PKI mengikuti Datuk Batuah. Sehingga Muhammadiyah mendapat tantangan hebat dari PKI sebagaimana yang telah terjadi di Pulau Jawa.

Pada tahun 1927 terjadi pula pemberontakan PKI di Silungkang dengan memperalat buruh-buruh tambang batubara di Sawahlunto, namun pemberontakan itu dapat ditumpas pemerintah Belanda. Setelah penumpasan itu terjadi sedikit membawa angin segar bagi Muhammadiyah, karena Belanda semakin tahu bahwa yang memusuhinya adalah PKI, bukan Muhammadiyah. Mulai waktu itu penguasa Belanda memberi kebebasan kepada Muhammadiyah untuk melebarkan sayapnya.

Hubungan yang baik ini akhirnya tidak dapat berlangsung lama karena di Jawa Muhammadiyah secara terang-terangan menolak berlakunya Ordonansi Guru 1925 yang dinilai sangat merugikan penyebaran agama Islam. Pada tahun 1928 Ordonansi itu hendak diberlakukan juga di Minangkabau, maka Muhammadiyah dan para ulama menentangnya. Salah satu ketentuan yang termuat dalam Ordonansi itu adalah : *“Seseorang yang hendak memberikan pelajaran agama kepada orang lain yang bukan anggota keluarganya harus terlebih dahulu minta izin secara tertulis kepada pejabat yang telah ditetapkan”*.<sup>36</sup>

Ketentuan itu dirasakan membatasi ruang gerak perkembangan agama Islam di Indonesia, sekali gus juga di

---

<sup>36</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Op. Cit.*, hal. 102.

Sumatera Barat. Di sisi lain, aturan Ordonansi itu memberikan peluang yang luas kepada agama Kristen untuk melebarkan sayapnya. Inilah yang ditentang oleh Muhammadiyah dan para ulama Minangkabau lainnya. Haji Rasul (Dr. Haka) mempelopori berlangsungnya Konferensi Ulama dan guru agama Minangkabau pada tanggal 18 Agustus 1928 untuk menentang berlakunya Ordonansi itu. Konferensi ini diikuti lebih dari 200 orang ulama/guru agama yang mewakili 115 organisasi Islam. Konferensi ini berhasil mencapai sasaran dengan mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

1. Para ulama yang sebelumnya dipecah belah oleh penguasa Belanda, dengan pengaruh dan kewibawaan Haji Rasul, dapat dipersatukan kembali untuk menentang diberlakukannya Ordonansi Guru 1925 tersebut di Minangkabau.
2. Konferensi sepakat mengirim dua orang utusan (Hasanuddin Dt. Singomangkuto dan H. Abdul Majid Abdullah) menghadap Gubernur Jenderal Belanda untuk menyampaikan penolakan ulama Minangkabau.<sup>37</sup>

Pada tahun 1930 ketika berlangsung Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi bertindak sebagai *Comite Conggres* adalah Muhammad Zain, anak dari Syekh Jamil Jambek. Oleh karena kerasnya isi pidato dari pemimpin-pemimpin muda Muhammadiyah seperti Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan HAMKA oleh pemerintah dinilai sebagai anti kolonialisme Belanda.

---

<sup>37</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 103.

Tiga hari setelah Konggres Syekh Jambek dipanggil oleh Asisten Residen di Bukittinggi untuk menyampaikan peringatan-peringatan. Syekh Jambek sebenarnya tidak punya jabatan apa-apa dalam persyarikatan Muhammadiyah, namun karena anaknya yang menjadi Ketua Comite tersebut maka beliau diminta untuk menyampaikan peringatan itu kepada anaknya.

Menurut Dr. Alfian, tuduhan yang disampaikan dalam peringatan itu adalah :

1. Pidato yang disampaikan dalam Conggres banyak yang tidak pantas dan tidak menyenangkan pemerintah Belanda.
2. Pejabat-pejabat penerintah yang ditugasi untuk menghadiri Conggres tidak dihargai menurut sepatasnya dan tidak pula didudukkan pada tempat yang sewajarnya.
3. Penampilan Muhammadiyah di Minangkabau sangat berbeda dengan di Jawa. Muhammadiyah Minangkabau telah memasukkan politik.
4. Mulai dari tanggal pemanggilan Syekh Jambek itu, bantuan pemerintah Belanda kepada Muhammadiyah akan dihentikan.
5. Mulai saat ini pengawasan terhadap persyarikatan Muhammadiyah akan lebih diperketat.<sup>38</sup>

Sikap penguasa Belanda ini diturunkannya pula kepada eselon pemerintah di bawahnya serta kepada

---

<sup>38</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 104

penguasa-penguasa pribumi. Semenjak itu gerak Muhammadiyah dipersempit. Semua pertemuan dan tabligh-tabligh dilarang. Hal ini mengakibatkan timbulnya beberapa insiden di cabang-cabang Muhammadiyah,

Pada tanggal 20-21 Mei 1929 diadakan musyawarah Sumatra Thawalib se-Sumatera Barat di Batusangkar. Di samping membicarakan pembangunan kembali gedung Sumatra Thawalib yang roboh akibat gempa bumi di Padang Panjang karena meletusnya Gunung Merapi tahun 1926, juga diperbincangkan situasi politik yang semakin panas di Sumatera Barat.

Ketika itu banyak orang Minangkabau yang pulang dari Mekkah dan Mesir bergabung dengan Sumatra Thawalib, seperti H. Ilyas Yakub. Hal ini membuat langkah perjuangan semakin matang. Di samping itu yang pulang dari Jawa juga mempengaruhi semangat perjuangan pergerakan kebangsaan seperti Muhammad Yamin yang menjelaskan perjuangan di Jawa dan bagaimana cara menggerakkannya. Maka pada bulan Mei 1930 lahirlah suatu organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang dapat mempengaruhi kaum modernis dari Sumatra Thawalib dan Muhammadiyah. PERMI ini dipimpin oleh H. Ilyas Yakub, H. Muchtar Lutfi dan H. Jalaluddin Thaib. Organisasi ini kemudian terkenal sebagai organisasi politik berdasarkan agama dan kebangsaan. Banyak pemimpin-pemimpin organisasi ini yang kemudian ditangkap oleh Pemerintah Belanda kemudian dibuang ke luar Sumatra, seperti H. Ilyas Yakub dibuang ke Boven Digul.<sup>39</sup>

Inilah beberapa peristiwa yang mewarnai perjuangan Muhammadiyah Minangkabau yang dianggap oleh

---

<sup>39</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 105.

pemerintah Belanda berbeda dengan Muhammadiyah di Jawa.

### **2.3. Tumbuhnya Muhammadiyah**

Setelah bendera Muhammadiyah resmi berkibar di Sungai Batang, Maninjau, Luhak Agam dengan grup dan satu amal usaha sebagai ujung tombak dan basis pergerakan, gaungnya bergetar ke pelbagai pelosok Minangkabau. Bukti faktual, pada 2 Juni 1926, berdiri cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Dipelopori oleh Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Dt. Sati.

Konggresnya bermula dari perjalanan keliling S.Y. St. Mangkuto ke Pulau Jawa untuk menemui dan berkonsultasi dengan tokoh-tokoh politik dan organisasi pergerakan. Terakhir menemui Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta antara lain ; KH Fachroeddin dan Ibrahim. Sekembali dari perjalanan keliling pulau Jawa menurut Buya Hamka, S.Y. Sutan Mangkuto (22 th) dan Dt. Sati waktu sampai di Jambi dicurigai oleh Pemerintah Belanda sebagai propagandis Komunis. Mereka ditahan dengan seorang kawan sekampungnya yang mereka temui di Jambi bergelar Dt. Bangso Dirajo.

Setelah ditahan hampir satu bulan lamanya kemudian mereka dibebaskan. Setelah bebas mereka lalu pulang . Setelah sampai di kampung mereka pun banyak menyebut tentang Muhammadiyah dan Syarekat Islam. Pada suatu malam tahun 1925 Haka diundang bertabligh di Surau Lubuk Bauk Batipuh Baruah, dalam rangka pengkaderan Haka membawa putranya Abdul Malik Karim Amrullah (17 th) yang sudah pintar pula berpidato.

Ketika itulah Abul Malik Karim Amrullah bertemu dengan S.Y. Sutan Mangkuto yang baru pulang dari Jawa dan ditahan di Jambi. Kedua orang yang baru berkenalan ini bercerita panjang tentang pergerakan di Jawa dan tentang Muhammadiyah dan Syarekat Islam.S.Y. Sutan Mangkuto dalam memperbincangkan pergerakan itu mengatakan dia akan memilih satu di antara dua, jika tidak Syarekat Islam tentu Muhammadiyah.

Dengan perantaraan Abdul Malik Karim AmrullahS.Y. Sutan Mangkuto berkenalan pula dengan pelajar-pelajar Sumatra Thawalib di Mesjid Jembatan Besi Padang Panjang, tercatat sebanyak 45 orang. Mereka pada umumnya berasal dari Maninjau dan telah bergabung dalam wadah Majelis Tabligh Muhammadiyah yang dibentuk oleh Haka dan AR. St. Mansyur untuk mendukung gerak organisasi "*Sendi Aman Tiang Selamat*" di Sungai Batang Maninjau. S.Y. Sutan Mangkuto yang pada awalnya agak condong ke politik akhirnya tertarik mendirikan Muhammadiyah. Setelah melalui kajian dalam forum diskusi dan musyawarah yang di selenggarakan di kediaman Syekh Haji Abdul Karim Amrullah di Gatangan Padang Panjang, atas prakarsa S.Y. Sutan Mangkuto pada tanggal 2 Juni 1926 disepakatilah berdirinya Muhammadiyah dengan modal dasar sebagai anggota 45 orang murid-murid Thawalib.

Muhammadiyah Cabang Padang Panjang tercatat sebagai cabang pertama di Minangkabau mendapatkan pengesahan dari *Hoofdbestur* Muhammadiyah Yogyakarta dengan Besluit No. 36 tertanggal 20 Juli 1927. Karenanya secara organisatoris dan administratif Cabang Padang

Panjang inilah yang dijadikan *startingpoint* pergerakan Muhammadiyah Minangkabau/Sumatra Tengah.<sup>40</sup>

Dalam hal ini Buya R.I. Dt. Sinaro Panjang bercanda bahwa di Padang Panjang "*Muhammadiyahnya aneh, duluan lahir anak dari ibunya*" yang beliau maksud adalah sebelum secara organisatoris Muhammadiyah berdiri 2 Juni 1926 itu, sebelumnya telah berdiri terlebih dahulu Majelis Tabligh Muhammadiyah".<sup>41</sup>

Begitu mengantongi Besluit – yang memang sangat mangkus lagi "bertuah" (di antara dua tanda kutip), di alam penjajahan itu, Cabang Muhammadiyah Padang Panjang mulai mengkonsolidasi diri. Langkah awal, merancang bangun sebuah kantor yang cukup representatif – sesuai ukuran zaman kala itu. Kantor tersebut terletak di Jalan Guguk Malintang, dengan cara merehapi rumah bekas Hotel Merapi milik seorang Belanda. Di sinilah kantor pertama sebagai markas/pusat pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau/Sumatra Tengah.

Sukses menegakkan tiang pancang infra struktur sebagai prasyarat dan piranti sangat dominan dalam menggeluti dunia pergerakan. Kini kecabangan Muhammadiyah Padang Panjang mulai melirik yang namanya Amal Usaha. Pada tahun 1927, didirikan *Holland Inlandse School (HIS)*, dipimpin oleh Prawoto Adiwidjojo (*mudarisu al-faqih*), - utusan PB Muhammadiyah Yogyakarta. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, Muhammadiyah membeli sebidang tanah masih kepunyaan Belanda seharga F. 300,-. Areal ini terletak di belakang penjara yang kini dikenal dengan nama Kompleks Kauman

---

<sup>40</sup>James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Cipta Kreatif, 1986), hal. 107.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 107

Padang Panjang. Tercatat pula, inilah Kauman kedua setelah Kauman – tempat pendeklarasian Muhammadiyah untuk pertama kalinya di Yogyakarta.

Pertumbuhan Muhammadiyah yang semakin beringsut maju, dibarengi dengan amaliah konkrit (*da'wahu bi al-hal*) berupa lembaga pendidikan, sungguh telah menyembulkan setumpuk tekad dan semangat masyarakat Minangkabau untuk menegakkan tonggak-tonggak Muhammadiyah di sejumlah tempat.

Boleh dibilang, ibaratnya Muhammadiyah bagaikan sekuntum kembang yang harum semerbak. Mumbuat orang yang lalu lalang tertegun kagum dengan keharuman yang dihembuskan kelopaknyanya yang mulai merekah. Hanya terpaut waktu 12 tahun (1925-1937), Muhammadiyah mampu menancapkan pahamnya ke banyak negeri di Minangkabau.

Pertumbuhan Muhammadiyah di Minangkabau dapat dibeberkan sebagai berikut :

1. Cabang Muhammadiyah Simaboer, Luhak Nan Tuo Tanah Datar, pada tanggal 27 Juli 1927. dipelopori oleh Dt. Bungsu, Mulkan St. Marajo, H. Muchtar, Dt. Simaradjo dan lain-lain.
2. Cabang Muhammadiyah Bukittinggi, pada tanggal 20 Juli 1928. Dipelopori oleh M. Kamin, H.M. Shidiq, H. Abu Samah, Dt. Mangulak Basa, Dt. Rajo Dilangik, TM. Mantari dan lain-lain.
3. Cabang Muhammadiyah Simpang Haroe Andalas Padang, pada tanggal 20 Mei 1928. dipelopori oleh Pakih Saleh, Syukur Bakri dan Ismail Syamsuddin.



4. Cabang Muhammadiyah Kuraitadji, pada tanggal 25 Oktober 1929. dipelopori oleh Oedin, Sd.M Ilyas, HM. Noer, H. Haroun el-Ma'any, M. Luth Hasan, H. Umar Ganti dan lain-lain.
5. Cabang Muhammadiyah Lintau Buo Tanah Datar, pada tanggal 17 Mei 1932. Dipelopori oleh M. Said, Dt. Bandaro Ratieh, M. Yazid dan lain-lain.
6. Cabang Muhammadiyah Koebang Soeliki, pada 5 Desember 1932. Dipelopori oleh HM. Khalil, Darwis Muin, H. Mansoer, H. Darwas dan lain-lain.
7. Cabang Muhammadiyah Payakumbuh, pada 5 Desember 1932. dipelopori oleh Syekh Moh. Arsyad, St. Mancayo dan lain-lain.
8. Cabang Muhammadiyah Rao, Pasaman pada tanggal 14 Desember 1932. Dipelopori oleh H. Moehammad Hoesein, H. Oesmar Moehammad, H. Zoelkifli, Syafril, H. Djamaris, Hj. Nurliasdi dan lain-lain.
9. Cabang Muhammadiyah Soelit Air, Solok pada tanggal 14 Desember 1932. diprakarsai oleh Dt. Boengsoe, Kahar Thaher, Manda Ali, Imam Arifin dan lain-lain.
10. Cabang Muhammadiyah Koto Tengah, Cabang Muhammadiyah Koto Tengah, Padang Luar Kota, pada tanggal 17 November 1935. Diinisiatif A. Gani Dt. Radjo Alam dan lain-lain.
11. Cabang Muhammadiyah Matoer Loehak Agam, pada tanggal 22 September 1936. Dipelopori oleh H. Idris, Imam Maradjo dan lain-lain.
12. Cabang Muhammadiyah Koeboeng Solok, pada tanggal 4 Februari 1937. Diinisiatori oleh Imam Arifin, Kahar Thaher, M. Idris dan lain-lain.

13. Cabang Muhammadiyah Taloe Pasaman, pada tanggal 4 Februari 1937. Dipelopori oleh Maulana Kali, Moehammad Alip dan lain-lain.
14. Cabang Muhammadiyah Limo Kaoem Batusangkar, pada tahun 1937, diprakarsai oleh R.I. Dt. Sinaro Panjang, AM. Burhani dan sederet nama-nama lainnya.<sup>42</sup>

Semua cabang Muhammadiyah yang tegak berdiri antara tahun 1925 – 1937 di atas, yang kemudian diikuti secara simultan dengan pertumbuhan 'Aisyiyah, Hizhbul Wathan, Nasyyatul 'Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah – disebut dalam kesejarahan Muhammadiyah di Minangkabau sebagai generasi atau fase pemuka, perintis sekali gus pendobrak.

Sedangkan pendirian kecabangan Muhammadiyah, di atas 1937 (1940 – 1950), disebut fase “berjalan/menitih di atas buih”. Sementara pada 1950 – 1966, diberi nama tahap pandai, dan atau “berpandai-pandai”. Dan 1966 – 1998 disematkan oleh “sejarawan” Muhammadiyah sebagai fase pematangan dan atau “kematangan”.<sup>43</sup>

#### **2.4. Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kehadiran Muhammadiyah di Minangkabau dari tahun 1925-1937 disebut sebagai fase perintis sekaligus pendobrak. Dikatakan pendobrak, karena ketika usia Muhammadiyah di

---

<sup>42</sup>Marjohan, *Islam Kontekstual-Pergumulan Antara Cita dan Realita*, (Lubuk Sikaping Sumbang : Mita Luhur, 2004), hal. 71.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 76.

Minangkabau masih merangkak bak balita, yaitu 4 tahun, ia berani menyanggah amanah *akbar*. Mengacu catatan Hamka (1974) : pada waktu itu, Muhammadiyah Minangkabau/Sumatera Tengah, secara legalitas formal baru mempunyai tujuh cabang, yaitu di Sungai Batang Tanjungsani, Padang Panjang, Simabur, Bukittinggi, Payakumbuh, Kuraitaji Pariaman dan Simpang Haroe Padang Luar Kota. Meskipun demikian karena dukungan moral dan material dari masyarakat Minangkabau sangat menguat bahkan mengkristal, Muhammadiyah Minangkabau melamar menjadi Tuan Rumah Kongres (sengaja ditulis ejaan lama) Moehammadijah ke-19 yang bakal diikuti oleh utusan Muhammadiyah se Indonesia, termasuk dari Borneo dan Sulawesi. Menurut catatan Buya R.I. Dt. Sinaro Panjang (1974) para utusan Kongres yang jumlahnya besar dari pulau Jawa dan Madura itu sebanyak 800 orang.<sup>44</sup>

Mereka datang dengan mencarter sebuah kapal Belanda, sehingga kapal yang bermerk KPM ini isinya 90% adalah konggresisten yang terdiri atas utusan dan penggembira dari Muhammadiyah, Aisyiyah dan ikut juga Pimpinan 20 orang dan wakil wartawan dari : Pemerintah 5 orang, Pusat Pimpinan 20 orang dan wakil wartawan dari 22 surat kabar.

Dianjungan kapal tersebut berkibar pula bendera Muhammadiyah di samping bendera kapal itu sendiri. Tekad bulat Muhammadiyah Minangkabau memosisikan diri sebagai *silang nan ba pangka, karajo nan bajunjuang*, disambut responsif oleh H. Fachroeddin dan H.M. Yusuf Anies yang sebelumnya (menjelang Kongres ke-18, di Solo) telah berkeliling di Minangkabau guna menyigi kekuatan

---

<sup>44</sup>Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2005), hal. 95.

Muhammadiyah di ranah Minang yang secara resmi melamar menjadi tuan rumah Conggres ke-19 dalam konferensi ke-III Muhammadiyah Minangkabau di Simaboer, kemudian disetujui oleh HB Yogyakarta.

Menurut Hamka, di forum Conggres ke-18, Solo – turut hadir utusan-utusan dari Minangkabau. Misalnya Cabang Muhammadiyah Sungai Batang, Tanjungsani Maninjau; Cabang Muhammadiyah Padang Panjang; Cabang Muhammadiyah Simabur; Cabang Muhammadiyah Kuraitaji dan simpatisan Muhammadiyah Lakitan, Pesisir Selatan. Atas argumentasi yang diurai- paparkan oleh utusan-utusan ini pulalah akhirnya Conggres ke-19 ditetapkan di Bukittinggi, yang akan berlangsung pada tanggal 14-21 Maret 1930<sup>45</sup>.

Conggres Bukittinggi yang notabene congres pertama di luar Jawa itu, ternyata memang sangat sukses. Lagi-lagi berkat sokongan dari semua lapisan masyarakat Minangkabau. Yang membuat aktivitas “kongureh” – begitu orang tua-tua Minangkabau mengapresiasinya – bernafas lega, *morale and material support* pun mengalir deras dari pemuka, ninik mamak, kawula muda dan ulama Minangkabau secara spontan. Bahkan menyelinap pendapat, helat akbar itu adalah congresnya masyarakat Minangkabau. Sebab, begitu sulit membedakan antara penggembira yang berjubel bahkan rela berselingkik dengan yang benar-benar peserta congres yang teregistrasi.

Memang terasa asing gebrakan Muhammadiyah waktu itu, meskipun di Jawa sudah biasa. Bayangkan helat akbar itu dilaksanakan penuh dengan tata upacara dan desain mimbar serta tribun yang sama sekali baru di Minangkabau.

---

<sup>45</sup>*ibid.*, hal. 97

Medan kongres yang dibuat di lapangan atas ngarai Bukittinggi itu berbentuk rumah adat minang bagonjong dengan ukuran 19 X 75 meter, luas 1425 M<sup>2</sup> dengan kapasitas tampung 7125 orang di dalamnya. Sedangkan di luar medan kongres ada lapangan luas di sekelilingnya. Pelaksanaan kongres berjalan dengan penjagaan keamanan selain dari pasukan Pandu Hizbul Wathan yang disiplin dan teratur, juga dibantu oleh polisi dan pendekar-pendekar orang bagak berpakaian hitam.

Menyaksikan suasana yang menakjubkan itu, 75% perantau Minang yang ikut menyaksikan kongres tersebut sangat terharu dan mereka pun berpantun : *Babaju kasumbo lusuah – Bapetak-petak dilangan. La ado makonyo rusuah – Mandapek raso kahilangan.*

Keluarnya pantun itu karena besar dan ramainya suasana pembukaan kongres, takut kalau-kalau tidak beres dan mengecewakan para tamu. Tapi kemudian bagi perantau minang yang tak sempat pulang kampung membuat pula pantunnya sebagai berikut :

*Tidak padi saluluh nangko*

*Tanjuang rajo jalan ka pulang*

*Pandanku sajo nan tak tampak*

*Indak hati rusuah nangko*

*Di Kongres kawanku pulang*

*Badanku sajo nan tak nampak.*<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Op. Cit.*, hal. 114.

Berikut kita kutipkan pidato M.J. Anies pada pembukaan Conggres yang disebut “Choetbatoel “Arsj” dibacakan dihadapan kurang lebih 10.000 orang selama dua setengah jam. Antara lain dikatakan *“Moehammadijah daerah Minangkabaoe, jang sudah berdiri empat tahoen lamanya: sesoenggoehnja soedahlah berbakti njata dan berboeah banjak; siang ba’hari tarang ba’boelan”*; teroetama kalaoe dilihat dengan mata hati dan akal boedi, tidaklah dapat disangkal lagi, faedahnja Moehammadijah itoe. Itoe dia. Akan tetapi sajang sekali, bahwa masih ada di antara saoeudara-saoeudara jang salah sangka dan keliroe da’wa jang tidak akan bergoena pengiraan itoe.

Menurut raportnya Bestuur Cabang Moehammadijah bahwa groep-groep daerah Simaboer tidak dapat hidup langsoeng, sebab tidak dapat menjadi kesenangannya ninik mamak. Cabang-cabang dianggap kommoenis. Cabang-cabang yang lain dahoeloe malah dikatakan bahwa orang-orang perempoean yang masoek Aisyiyah akan dikirim ke Digoel sedang Tablighnya pernah digrojok oleh politik. Groep Galoeng bawah Bukittinggi minta verlof 3 tahoen karena tidak koet menahan fitnah. Kesemoeanya itoe tidak mengertikan kepada kami : kenapakah dan bagaimanakah sampai begitoe.....”<sup>47</sup>

Salah satu keputusan penting yang dilahirkan konggres adalah bahwa : “demi keberlanjutan pergerakan, Muhammadiyah perlu mengangkat *Consul Hoofdbestuur Moehammadijah* di daerah-daerah. Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah pertama di Sumatera tercatatlah antara lain AR Sutan Mansyur untuk Minangkabau dan Hasan Din untuk Bengkulu. Nama yang disebut terakhir, dikenal pula

---

<sup>47</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 114.

kemudian menjadi mertuanya Bung Karno – ketika Presiden pertama RI itu dibuang Belanda ke Bengkulu.

Yang menarik pula untuk ditelusuri, di sela kesibukan kongres, di sebuah pojok ibukota Sumatera Tengah itu, berlangsung sengit debat fiqih perempuan. Hamka (1974) menulis, di antara ulama yang terlibat dalam dialog nasional ini tercatat : Dr. Syekh H. Abdul Karim Amrullah (Dr. Haka), Syekh Abdul Wahab Amrullah, Syekh H.M. Jamil Jambek, Syekh H. Daud Rasyidi, Syekh H. Abbas Abdullah Padang Japang, AR Sutan Mansur, Hamka dan seabreg tokoh muda lain. Mereka semua mewakili ulama Minangkabau.<sup>48</sup>

Sedangkan ulama dari Jawa yang juga tengah memegang tampuk kepengurusan PB Muhammadiyah Yogyakarta tercatat : KH. Mas Mansyur, KH. Abdul Mu'thi, KH. Ibrahim, KH. Muchtar, KH. Hasyim, Muhammad Yunus Anies, Raden H. Hajid, H. Aslam, Muhammad Toerki, Mas Soebandi, Muhammad Wahib dan Moetoeco- dari PB HW (Hizbul Wathan) Yogyakarta. Sementara dari barisan Aisyiyah terlihat Nyai Dahlan, Siti Muji'ah, Siti Hayyinah, dan Siti Rasyidah – semua utusan PB Aisyiyah Yogyakarta.

Yang menggelitik dicermati kini, persoalan yang diusung dan dibedah berasal dari karya monumental Dr. Haka (Inyiak De-er) bertajuk : "Tjermin teroes : Bergoena oentoeke pengoeroes, Pentjari Djalan Loeroes (1928). Digelindingkan Dr. Haka : *"Bahwa perempuan berpidato dihadapan majlis laki-laki, haram hukumnya"*. Sebab gerak bibir, ekspresi dan liuk tubuh sang perempuan itu tidak lain adalah aurat yang bisa menggetarkan (ma'af) nafsu birahi kaum lelaki. Pada hal kala itu, Siti Rasidah aktivis Nasyi'atul

---

<sup>48</sup>Khatib Pahlawan Kayo, *Muhammadiyah Dalam Pergumulan Tekstual dan Kontekstual*, (Padang : PW Muhammadiyah Sumatera Barat, 2007), hal. 89.

'Aisyiyah PB Yogyakarta yang memang cantik lagi anggun telah dipersiapkan OC alias *organizing commitee* akan berpidato di hadapan ribuan pasang mata laki-laki.

Tidaklah bernama Mas Mansur kalau tidak mempunyai resep jitu lagi mujarab. Ia tidak menunjukkan seujung kuku pun sikap menentang, frontal apalagi konfrontatif. Mas Mansur justru memposisikan diri sebagai yunior atau murid. Kalau iamenggulirkan *hujjah*, dipertautkannya dengan dalil *naqliyah* dan '*aqliyah* lain – sembari terus-menerus menjulok pertimbangan Dr. Haka tentang yang lain itu.<sup>49</sup>

Pendek kisah! Karena fatwa yang ditransformasikan Dr. Haka belum bertumpu pada *nash* yang *sharih*- tetapi lebih dominan karena ghirah terhadap sarkastik plus sakralitas Islam, maka hukum haramnya perempuan berpidato di depan publik laki-laki, beringsut (bergeser) menjadi makruh. Dikerjakan (berpidato) tidak berdosa, ditinggalkan (tidak berpidato) akan mendulang pahala!

Nampak terang-benderang, karena budi halus, tutur bahasa yang *balaghah* tambahan lagi debat yang dibingkai dengan adab dan etika tinggi yang diperagakan Mas Mansur dkk, membuat Dr. Haka yang terbilang keras bak petir di siang bolong itu jadi menunduk dan akhirnya menerima dengan sikap *tasammuh* (lapang dada).

Meski demikian, 'ulama-'ulama pendukung Muhammadiyah Minangkabau, ekstra hati-hati (*al-rabith*) mempraktikkan hukum makruh ini. Di penghujung *debating club*, Syekh Muhammad Jamil Jambek menyuguhkan k(h)atam halus sembari mengingatkan, bahwa di masa datang Muhammadiyah akan rumit menggerakkan ummat,

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 90.



dan gezah 'ulama bisa-bisa tersungkur ke titik nadir, jika dalam konggres ini perempuan dibolehkan berpidato di hadapan kaum lelaki. Akhirnya demi kemaslahatan ummat dan kelangsungan gerak Muhammadiyah, disepakati melalui musyawarah, meniadakan pidato perempuan di depan Rapat Umum Conggres ke-19<sup>50</sup>.

Kendatipun demikian yang jelas, "*mudzakarah* antara ulama Minang dan ulama Jawa pada tahun 1930 itu, adalah *starting point the Islamic era* (era kebangkitan percaturan pemikiran Islam) di ranah Minang", ujar Dr. Shofwan Karim Elha, MA (Rektor UMSB), di salah satu tulisannya. Senada dengan Shofwan, sosiolog dan cendekiawan muslim terkemuka Dr. Muchtar Naim berpandangan bahwa, persenyawaan kultur atau pola "M" (Minang) dengan "J" (Jawa) dalam konteks historis sosiologis telah menjadi watak kepemimpinan (*leadership characteristic*) tersendiri dan abahkan sangat bernas dan solid di bumi Indonesia – tak terkecuali di tubuh Muhammadiyah". Alur pikir semacam itu, diapungkan Muchtar Naim pada majlis seminar menyongsong Musyiwil Muhammadiyah Sumatera Barat ke-37 di Kauman Padang Panjang, pada tahun 1990.<sup>51</sup>

Mengenai helat orang Minangkabaudi Bukittinggi. Pasca conggres Bukittinggi, matahari Muhammadiyah yang dilingkari dua kalimah syahadat kian memantulkan sinarnya di Minangkabau. Indikasinya, Muhammadiyah tumbuh di mana-mana, tidak lagi terbatasselingar Minangkabau, tetapi kader dan mubaligh produk Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang proaktif bertabligh sekaligus mendirikan Muhammadiyah di sejumlah perkampungan Islam di Tapanuli Selatan, Jambi dan Riau.

---

<sup>50</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>51</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Mardjohan, *Ibid.*, hal. 120.

Bahkan mereka kerap diundang mengkaji al-Islam dan ke-Muhammadiyah ke Sumatera Utara dan Aceh.

Andil dan kontribusi serta eksistensi Kulliyatul Mubalighin Padang Panjang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi pengembangan organisasi Muhammadiyah di tanah air. Setelah Indonesia menghirup udara kemerdekaan, bermunculan pula alumni Kulliyatul Mubalighin di berbagai sudut negeri. Ada yang jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), cendekiawan muslim, pengusaha, politisi, mubaligh, guru agama, dosen dan sebagainya. Mereka menyebar di Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya dan lain-lain. Harap maklum! Di mana pun dan apa punggawe keseharian yang mereka geluti, yang bernama alumni Kauman Padang Panjang, bergiat menghidup suburkan Muhammadiyah.

Agaknya ini pula *asbabul wurud* di Konggres Muhammadiyah Bukittinggi terlahir semboyan : *Muhammadiyah dilahirkan di Kauman Yogyakarta, dibesarkan di Kauman Padang Panjang*. Pada momentum Conggres Bukittinggi pula dibidani kelahiran satu adagium spektakuler, tetapi sekaligus menantang. Bunyinya : *Me Muhammadiyahkan Nagari dan me-Nagarikan Muhammadiyah*".

Besar kemungkinan, popularitas dan reputasi Minangkabau itu pula yang kemudian melahirkan babak sejarah, bahwasanya tempaan Muhammadiyah Minangkabau, tidak terkecuali setumpuk pengalaman bernas yang didulang diarea konggres ke-19 – ikut diperhitungkandan menorehkan simpul-simpul kesejarahan pergerakan keislaman plus ke-Muhammadiyah di pentas nasional.

Sebut saja AR Sutan Mansur, Ahmad Syafii Maarif, Hamka, H.A. Malik Ahmad, Marzuki Yatim, Saaduddin

Jambek, Ramli Thaha, Sayuti Thalib, Rahimi sutan, Rusydi Hamka, Anhar Burhanuddin, Fahmi Khatiib, Yunahar Ilyas dan Goodwil Zubir, Anwar Abas, Syafri Sairin dan Afifi Fauzie Abas. Beliau-beliau ini dipercayai menduduki berbagai jabatan, baik unsur pimpinan maupun dilembaga unsur pembantu pimpinan.<sup>52</sup>

## 2.5. Muktamar ke-39 di Padang

Berawal dari obsesi Buya Zainoel Abiddin Sjuuib (ZAS) selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah yang baru terpilih untuk periode 1972-1975, beliau mencanangkan tiga Urgensi Program pada Musywil ke-32 di Padang, yaitu; *pertama*; Konkretisasi Organisasi, *Kedua*; Pembentukan Jamaah dalam Jam'iyah dan *ketiga*; Pelaksanaan Muktamar ke-39. Khusus program ketiga tentang Pelaksanaan Muktamar ke-39, didasarkan atas keputusan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan tempatnya di kota Padang.<sup>53</sup>

Amanah ini cukup berat, karena memerlukan dukungan tenaga dan dana yang luar biasa, sementara kondisi Muhammadiyah Sumatera Barat masih sangat labil akibat dampak pergolakan PRRI dan tekanan psikologis pengkhianatan Gestapu PKI. Ibaratnya "*beban berat singgulung batu*". Demikian Buya ZAS mengatakan ketika beraudiensi dengan Gubernur Harun Zein.

---

<sup>52</sup> PP Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majalah Suara Muhammadiyah, 2001), hal. 24.

<sup>53</sup> *Padang Ekspres*, Edisi 23 Mei 2009, St. Zaili Asril dkk (Editor), *Menyemangati Kembali Peran Muhammadiyah di Minangkabau dan Profil Prof. Ahmad Syafii Maarif*, (Padang : Yayasan alam Terkembang Jadi Guru, 2000), hal. 58.

Buya Zas bangkit dengan semangat mudanya seperti ketika menjadi Menteri Daerah HW (Hizbul Wathan) Sumatera Tengah tempoe doeloe. Buya mulai berkeliling Sumatera Barat bahkan meyakinkan perantau di berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Palembang dan sebagainya, membangkitkan semangat dan menghimpun dana untuk mendukung pelaksanaan Muktamar yang sudah diambang pintu.

Bersamaan dengan itu, PP Muhammadiyah juga melantik Panitia Penerima Muktamar (yang didukung oleh hampir seluruh komponen internal dan eksternal Muhammadiyah, terutama Angkatan Muda dan pejabat baik sipil maupun militer/ABRI).

Panitia yang dinakhodai Buya HAK. Dt. Gunung Hijau seperti disebutkan di atas, bergerak tak tanggung-tanggung menggalang kekuatan, baik di lingkungan internal persyarikatan maupun dari simpatisan dan aparatur birokrasi. Hal tersebut sangat memungkinkan karena sebelumnya Dt. Gunung Hijau sudah sangat dikenal dan dekat dengan berbagai pihak selaku tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama dan dua periode berturut-turut dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD-GR Sumatera Barat.

Beliau memang sejak semula telah berketetapan hati dan minta kesediaan Buya Zas untuk menerima jabatan Ketua PMW Sumatera Barat dan beliau akan *memback-up* sepenuhnya laksanakan tugasnya Muhammadiyah Sumatera Barat waktu itu, terutama dalam mensukseskan Muktamar ke-39, walaupun sebenarnya pada Muswil 7-9

Januari 1972 itu beliau tetap memperoleh suara terbanyak<sup>54</sup>.

Namun sesuai pepatah Minang "*Mujua sapanjang hari, malang sakijok mato – mujua tak dapek diraiiah, malang tak dapek ditolak*" di saat-saat pimpinan dan warga Muhammadiyah sedang bersungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran Muktamar, termasuk membenahi Sekretariat/kantor Pimpinan Wilayah di lantai II Mesjid Raya yang cukup megah di jantung kota Padang. Allah SWT membuktikan kekuasaan-Nya. Tanpa diduga dan tak pernah terbayangkan sebelumnya, tepat tanggal 6 Januari 1975 dini hari terjadi musibah besar, runtuhnya kubah mesjid Raya Muhammadiyah, di Jalan Bundo Kanduang No. 1 Padang yang merupakan markas Muhammadiyah Sumatera Barat, sekaligus pusat peribadatan pedagang pasar raya/kampung Jawa<sup>55</sup>.

Di mesjid ini telah dipersiapkan tempat-tempat sidang, juga tempat pondokan sebagian utusan Muhammadiyah dari 13 Provinsi sejumlah 270 orang. Tetapi apa yang hendak dikata, Allah berbuat dan menetapkan takdir sekehendak-Nya. Namun kita yakin tentu ada hikmah di balik itu, semoga kita dapat menggali dan memahaminya.

Meskipun sedang berduka, seperti halnya pada Konggres ke-39 di Bukittinggi tahun 1930, Muktamar ke-39 yang menelan biaya sekitar 75 juta rupiah itu, juga berlangsung semarak/berjaya dan dinilai sukses banyak orang. Begitu suksesnya lagi-lagi Buya ZAS diharapkan oleh

---

<sup>54</sup>Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hal. 72.

<sup>55</sup>RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Sejarah dan Profil Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat 1952-2012*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2013), hal. 24.

forum Mukhtamar agar dapat berlanjut menakhodai Muhammadiyah Sumatera Barat, periode 1975 – 1978<sup>56</sup>.

Dampak kesuksesan Mukhtamar ke-39 yang dulu disebut *Algemeene Vergadering*, kemudian ditukar dengan istilah Konggres itu, tidak saja dirasakan oleh warga Muhammadiyah, melainkan juga oleh masyarakat, terutama para pengusaha, baik pedagang maupun jasa, karena dengan ramainya kota Padang dibanjiri oleh peserta dan penggembira Mukhtamar Muhammadiyah dan “Aisiyiah serta Nasyiatul Aisiyiah yang berdatangan dari seluruh pelosok tanah air sejak dari Banda Aceh sampai Irian Jaya, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Ternyata membuka rizki baru bagi para pedagang dan pengusaha tersebut baik dalam bidang transportasi, tempat-tempat rekreasi dan souvenir khas Minang, di samping restoran, rumah makan dan hotel-hotel.

Mukhtamar ini dibuka oleh Presiden Suharto diwakili oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. H.A. Mukti ali, turut memberikan sambutan Dr. Moh.d. Nasir dalam kapasitas beliau selaku utusan Rabithah Alam Islami dan Ketua PP Muhammadiyah KH. AR. Fachruddin. Di tingkat lokal memberikan sambutan Gubernur Sumatera Barat Prof. Drs. Harun Zein, Ketua HAK. Dt. Gunung Hijau.

Sedangkan dalam sidang-sidang Mukhtamar ikut memberikan Penasehat PP Muhammadiyah Buya AR. Sutan Mansur. Seluruh aktivitas Mukhtamar selama sepekan diberitakan oleh koran lokal yang khusus diterbitkan Panitia diberi nama “Gema Mukhtamar” di bawah bimbingan Martias Duski Pandu dan Drs. Adli Etek dengan kader-kader

---

<sup>56</sup>RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Muhammadiyah dari Masa ke Masa di Minangkabau/Sumatera Barat*, (Padang : PW Muhammadiyah Sumbar, 1991), hal. 82.

wartawan/ti dari angkatan muda Muhammadiyah yang sengaja di *choaching* sebelum Muktamar seperti ; Priadi Syukur, Fakhruddin Arbah, dan lain-lain.

Ketika acara pembukaan dan penutupan Muktamar ini ada anekdot yang membuat hadirin ketawa geli. *Pertama*; Sambutan Ketua PP waktu pembukaan mengatakan bahwa; kita bersyukur Rabithah Alam Islami yang berpusat di Arab Saudi, sangat arif dalam mengirim utusannya ke Muktamar ini, karena yang dipilih betul-betul yang fasih berbahasa Indonesia. Yang dimaksudkannya adalah pak Nasir. *Kedua*; waktu acara penutupan Ketua PMW Jawa Timur K.H. Anwar Zen mewakili peserta mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan luar biasa di Sumatera Barat ini, yaitu ada gunung yang berjalan-jalan. Maksudnya Ketua Panitia Penerima Muktamar yakni HAK Dt. Gunung Hijau.

Bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah ini, juga berlangsung Muktamar 'Aisyiyah dan Nasyyatul 'Aisyiyah. Masing-masing juga melakukan pencerahan, mengambil beberapa keputusan penting dan memilih pimpinan untuk periode berikutnya.





## **BAB III**

# **PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI MINANGKABAU**

### **3.1. Pembinaan Kader**

Muhammadiyah Minangkabau sebagai bagian integral (senyawa) dari Muhammadiyah berspektrum nasional/Indonesia adalah gerakan Islam, Gerakan *Tajdid* serta Gerakan Da'wah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (QS(3):104). Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah menunaikan misi pembaharuan pemikiran/pemahaman Islam (*tajdidu fi al-Islam*) melalui pengembangan semangat berjihad guna mengembalikan ummat kepada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah – yang lebih difokuskan pada pemberdayaan sumber daya insani (*harakatu al-insaniyah*) sebagai kader pelopor, pelanjut, pelangsung dan penyempurna gerakan/amal usaha Muhammadiyah. Skope orientasinya menjamah berbagai dimensi sesuai dengan

kebutuhan Muhammadiyah dan sekaligus kebutuhan ummat (sentrifugal dan sentripetal).<sup>57</sup>

Mempelajari semangat dan substansi yang terkandung dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah yang dibidani oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M. Seperti telah banyak dikedepankan, sama sekali tidaklah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Selagi Islam dan ummat Islam masih bernafas di muka bumi, selama itu pula bendera dan organisasi Muhammadiyah insya Allah tetap berkibar di pelbagai pojok komunitas Islami. Tidak saja dalam negeri bahkan insya Allah juga akan meluas ke luar negeri seperti yang telah terbukti saat ini dengan terbentuknya beberapa Cabang Istimewa di beberapa negara; seperti di Mesir, Malaysia, Canada, Amerika, Jerman, Philipina.<sup>58</sup>

Dikatakan demikian, karena proses kaderisasi di tubuh organisasi reformis dan modernis ini tetap berjalan – kendati kadang tersendat-sendat karena berbagai tantangan internal dan eksternal yang selalu menghadang di pelupuk mata Muhammadiyah. Dalam pandangan Prof. Dr. Amien Rais, MA (Ketua PP Muhammadiyah, 1995-2000), paling tidak terpaut tiga bentuk dan wadah kaderisasi di Muhammadiyah. Yaitu kader formal (mengenyam pendidikan di Muhammadiyah); kader informal (*mengikuti training and education* di Muhammadiyah); serta kader genetikal (berhabitus dari keturunan warga Muhammadiyah/Aisyiyah). Dan secara

---

<sup>57</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) Dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : Surau Muhammadiyah, 2010), hal. 145

<sup>58</sup>Marjohan, *Pelaku Sejarah dan Cermin Untuk Semua*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah Kerja sama dengan Pemkab Pasaman Lubuk Sikaping Sumbar, 2009), hal. 71.

kronologis ketiga pola pengkaderan tersebut dikemukakan di bawah ini, kemudian *di-khatimahi* dengan : Liku-liku dan dinamika kader Muhammadiyah Minangkabau.

### 3.2. Kauman dan UMSB

Siapa yang tidak kenal dengan Kauman Padang Panjang! Bukankah di sini tempoe doeloe greget Kepanduan Hizbul Wathan (HW), mubaligh, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), guru-guru serta penggiat lainnya menggaungkan Muhammadiyah ke pelbagai pelosok tanah Minang dan bahkan ke sudut-sudut Nusantara. Bukankah di Kauman pula tegak berdiri wadah pengkaderan *khusus bi al-khusus* berupa *Tabligh School* (1930 - 1935) - yang kemudian berubah nama menjadi Kulliyatul Mubalighin (setingkat Tsanawiyah dan Aliyah).

Menyadari sepenuhnya bahwa, obyek da'wah (*al-mad'u*) memerlukan intelektual yang ulama dan ulama yang *include* intelektual, para petinggi Muhammadiyah (daerah, wilayah dan tingkat pusat) menegakkan tiang pancang Fakultas Falsafah dan Hukum. Diresmikan pada tanggal 18 November 1955, yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan di prasasti oleh Ketua Umum PB Muhammadiyah, Buya AR Sutan Mansur. Dalam catatan sejarah, inilah Fakultas Muhammadiyah pertama di Indonesia - yang kelak menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).<sup>59</sup>

Adapun Presidium pertama diamanahkan kepada Dr. H. Ali Akbar (Jakarta) sebagai Ketua, dengan beberapa orang anggota seperti : Prof. Dr. H. Boenjamin (Jakarta), Wakil Ketua Dr. J. Sjamsuddin (Yogyakarta), H. Rasjidi

---

<sup>59</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op.Cit.*, hal. 147.

(Yogyakarta) dan Hamka (Jakarta). Dekan dipercayakan kepada Drs. Danoehoesodo, sedangkan Wakil Dekan Hamka – yang kemudian dilanjutkan oleh Mr. Ezidin. Untuk melengkapi struktur juga dibentuk Dewan Kurator yang terdiri atas : Ruslan Muljohardjo (Gubernur Sumatera Tengah), AR. Sutan Mansur, H. Farid Ma'ruf, H. Ilias Jacob dan Sa'aduddin Djambek. Adapun Dewan Pengurus terdiri dari : H.A. Malik Ahmad selaku Ketua, A. Dt. Malintang Alam (Wakil Ketua I), R.I.Dt. Sinaro Panjang (Wakil Ketua II), Abdullah MS (Sekretaris I), A. Galib (sekretaris II) dengan anggota-anggotanya adalah Mr. Harun Al Rasjid, Dr. Muzbar, Dr. Kaharuddin Junus, Adam Saleh, Ambiar, Raden Sulaeman dan Djajusman, St. KDM Pntas Nst, Nurdin Dt. Batuah, H. Harun L Ma'any dan lain-lain.

Perkulihan untuk tahun pertama dimulai dengan jumlah mahasiswa 101 orang dan 23 orang pendengar yang dipandu oleh 10 orang dosen pembimbing. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 September 1964, didirikan pula Akademi Kulliyatul Mubalighin di KaumannPadangpanjang, dengan Dekan Drs. Djam'an Shaleh. Hanya berselang satu tahun (18 November 1965), selain berhasil menjuluk status lebih tinggi, juga berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD). Di bawah kepemimpinan (Dekan) Buya H. Haroen el Ma'any, FIAD membuka cabang/filial di Medan dan Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1973. Tujuannya adalah menampung dan mengakomodir, putra-putri Sumut yang merasa jauh untuk *menyauk* ilmu ke Padang Panjang.

Masih pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1964, ditiangpancangi pula Akademi Niaga (AN) di Bukittinggi. Pada 10 Desember 1965 karena telah memenuhi persyaratan/ akreditasi akademis statusnya pun

menanjak menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Cabang) Sumatera Barat (UMCSB). Sedangkan pimpinan (Dekan) dijabat oleh Drs. Burhan Rasyid.

### 3.3. Dinamika Kader Muhammadiyah

Lambung-lambung pengkaderan di organisasi Muhammadiyah terstruktur dan konseptual. Agaknya itu pula yang melatari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat cukup responsif melirik ruang yang satu ini, tentu bukan berarti mengabaikan hal-hwal ruang lain. Begitu menyandang amanah Musyawarah Wilayah (Musywil) Muhammadiyah ke-39 di Sawahlunto, pada 9-11 Desember 2005, PWM Sumbar terpilih (Drs. H. RB. Khatib Pahlawan Kayo (176 suara), Prof. H. Bustanuddin Agus, MA (162).

Langkah-langkah yang diambil untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang tangguh, militan dan visioner, *pertama*, membentuk Majelis Pendidikan Kader (PMK) yang diimami oleh H. Priadi Syukur SH sebagai Ketua dan Aprianto M.Pd, I sebagai Sekretaris, di bawah koordinasi Wakil Ketua PWM Drs. H. Mirwan Pulungan.<sup>60</sup>

*Kedua*, bersama MPK ini, PWM sumbar menyusun konsep pengkaderan serta petunjuk operasionalnya secara simultan dan terpadu di lingkungan perguruan, keluarga dan organisasi otonom di bawah sungkup Muhammadiyah. Setelah itu, kader-kader yang sudah ditempa dengan berbagai keilmuan dan dengan sistem pendekatan pedagogis, partisipatori andragogi dan dialogis,

---

<sup>60</sup>Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, (Jakarta : Panji Masyarakat, 1974), hal. 51.

diprioritaskan menempati posisi di lingkungan kepemimpinan persyarikatan, majlis, badan, lembaga, ortom dan amal usaha Muhammadiyah- demi kelangsungan visi-misi persyarikatan.

Kelaziman di Muhammadiyah, barisan kader (kader formal dan genetikal/informal) selalu mengusung satu slogan sebagai motivasi. Yaitu kader pelopor, pelangsong dan penyempurna amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah dalam konteks kekinian plus kemandatangan umat.

Dalam hal ini PWM (Muhammadiyah Minangkabau/Sumbar) bergayut kini. Apakah pada tanggal pelopor, pelangsong atau sudah sampai pada tingkat penyempurna? Beranalogi pada teori dan dialektika (*these-anti these- sinthese*) sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dapat dikatakan bahwa, dari periode Sa'alah Yusuf Sutan Mangkuto sampai masa bakti Prof. Dr. Hamka (1926-1950), bisa disebut sebagai generasi perintis atau pelopor. Betapa tidak ! Ketika masyarakat bergelimang dengan kesulitan dan kepahitan hidup di alam penjajahan, generasi perintis ini justru mampu mengepakkan sayap Muhammadiyah ke berbagai penjuru Minangkabau khususnya. Bahkan pada masa krisis dan kritis ini pula, Konggres Muhammadiyah ke-19 diselenggarakan di Bukittinggi pada tanggal 14-21 Maret 1930.<sup>61</sup>

Meskipun baru empat tahun Muhammadiyah mencacahkan kaki di Minangkabau – yang dibawa oleh AR Sutan Mansur dari Pekalongan, pada tahun 1925, seperti yang telah diuraikan pada bab II, namun Konggres tersebut

---

<sup>61</sup>Amanat Presiden dan Pidato Pejabat Tinggi Negara Dalam Mukhtamar ke-43, *Pandangan dan Harapan Terhadap Muhammadiyah* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 1995), hal. 8.

terbilang sukses, dan bahkan mampu menggelorakan *ghirah* dan *maruah* keislaman masyarakat Minangkabau yang sebelumnya nyaris terjerembab ke dalam kepompong sempit tradisionalisme, konservatisme, nativisme dan bahkan sinkretisme.

Serupa tapi tidak sama dengan pendahulunya, ketika tampuk Muhammadiyah Minangkabau/ Sumatera Tengah (Barat) digenggam digenggam oleh Buya H. Malik Ahmad (1956-1958), Muhammad Yatim (1958-1962), H. Haroun L. Ma'any (1962-1964), Drs. Djamaan Shaleh (1964-1966) dan periodisasi Dt. Gunung Hijau (1966-1972), Muhammadiyah tanah Minang/Sumatera Tengah (Barat) kian mempunyai gigi, mempunyai taji dan mempunyai *mantagi*. Sebab selain tetap berkonsentrasi membersihkan aqidah ummat dari syirik dan TBC (tahyul, bid'ah dan khurafat) – melalui dakwah dalam pelbagai sisi dan kisi – termasuk menerbitkan buku berupa “Tafsir Sinar” (Malik ahmad, 1957) yang dikemas secara persuasif, edukatif (*asyidda*), beliau-beliau ini tercatat sangat proaktif bergulat dalam dunia pendidikan dan amal usaha lainnya di bawah payung panji Muhammadiyah. Maka dengan begitu, generasi ini layak disematkan sebagai generasi pelanjut atau pelangsung.<sup>62</sup>

Lalu, bagaimana dengan tangga penyempurnaan? Kalau boleh menobatkan atau menyuguhi predikat, inilah yang diperbuat secara berkelanjutan (*sustainable*) pada periodisasi Buya ZAS akronim dari Zainoel Abiddin Syua'ib (1972-1983), Hasan Ahmad (1983-1984), HM. Idris Manaf (1984-1986), H. Amir Ali (1986-1990) dan masa bhakti Buya H. Radhin Rahmad (1990-1995).

---

<sup>62</sup>*ibid.*, hal. 9.

Namun perlu dimafhumi! Fase penyempurna dalam kerangka ini, sama sekali tidaklah dalam artian bahwa perjuangan Muhammadiyah sudah tersondak, maksimal dan bersemayam di titik *finish*. Yang dimaksud tidak lain adalah, bahwa sejak Buya ZAS hingga periode Buya Radhin, Muhammadiyah di Sumatera Barat sepertinya lebih banyak berkonsentrasi memantapkan bengkelai generasi terdahulu, dan tetap menjamah hal-hal yang berspektrum inovatif, kreatif dan modifikatif – tidak saja yang berorientasi fisik material (*tangible aset*) lebih-lebih lagi yang mengarah pada kepada pembaharuan yang berkarakter abstrak (*intangible aset*). Misalnya, menyeimbangkan rancang bangun Mesjid Taqwa Muhammadiyah antara aspek fisik dengan *Ruhu al-masajid*. Antara lain dengan mengemas ulang jadwal pengajian harian (subuh, zuhur, ashar dan maghrib) dan jadwal serta penempatan guru/khatib secara selektif berdasarkan evaluasi tahunan, di samping menggiatkan aktivitas muzakarah dengan memerankan Lajnah Tarjih yang membahas masalah-masalah aktual, sebagai konskuensi logis bahwa Muhammadiyah sejak awal berdirinya menggenggam kredo *tajdid fi-al Islam* tanpa henti. Sejarah pun mencatat, konsentrasi memantapkan bengkelai ini diawali dengan keberanian menjadi Tuan Rumah Muktamar ke-39 di Padang, yang berlangsung pada 17-22 Januari 1975.<sup>63</sup>

Dengan tidak menafikan seujung kuku pun bagaimana pahit getirnya mendayung kapal Muhammadiyah sejak zaman pra-kemerdekaan (1926 -1945); zaman demokrasi terpimpin (1959 – 1966); masa PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia/1948-1949); zaman PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/1958-1961; dan 32 tahun di bawah otoritarian Orde Baru (1966 – 1998),

---

<sup>63</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 170.



Muhammadiyah di Minangkabau/Sumatera Barat (juga wilayah lain di bawah nakhoda Prf. Drs. H. Nur anas Djamil (1995 – 2000); Drs. H. Shofwan Karim Elha, MA (2000-2005); dan masa bakti Drs. H. RB. Khatib Pahlawan Kayo (2005-2010) – yang sedang dan akan berakhir, benar-benar berkayuh pada posisi riskan, gamang dan bahkan amat sangat rumit. Khusus periode Drs. Khatib Pahlawan Kayo oleh penulis muda / AMM Bakhtiar, disebut Memimpin di Tengah Krisis.<sup>64</sup>

Dikatakan begitu karena pada tahun 1997, ekonomi Indonesia nyaris tersungkur hingga ke titik nadir. Pemicunya adalah menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai mata uang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada awal 1998 yang lalu, keadaan nyaris tidak tertolong, meski telah “*mahangok ka lua badan*” lewat bantuan IMF. Tetapi kondisi ekonomi Indonesia sangat rapuh dan terpuruk. Krisis moneter menggerayangi seluruh sendi kehidupan/kegiatan masyarakat.

### 3.4. Kiprah di Politik

Berbeda dengan Sarekat Islam, yang memusatkan segala daya dan tenaga di bidang politik guna mencapai perbaikan ekonomi dan kematangan politik bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam, Muhammadiyah memilih lapangan pendidikan dan sosial sebagai ruang geraknya. Dengan jalan memberikan pendidikan Islam yang modern, memupuk dan mengembangkan rasa sosial dan saling tolong menolong antara sesama rakyat Indonesia yang beragama Islam, Muhammadiyah bercita-cita mencapai tujuan politik dan ekonomi, yang diperjuangkan oleh SI (Sarikat Islam),

---

<sup>64</sup>Majalah Sabili No. 4 Tahun 2006.

melalui saluran-saluran dan kegiatan-kegiatan politik terutama, Prinsip pokok, digariskan oleh “bapak” Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, tidak melibatkan Muhammadiyah dalam soal-soal dan pertikaian politik, sungguhpun secara pribadi anggota Muhammadiyah tidak dilarang untuk berpolitik, telah berhasil menyelamatkan “kapal” Muhammadiyah dari segala arus-gelombang, cobaan dan ancaman zaman, keadaan dan situasi, sejak dari tahun didirikan.

Di Minangkabau, di mana reformasi dan modernisasi agama Islam tidak dapat membebaskan diri seluruhnya dari pengaruh politik, perkembangan Muhammadiyah berhubungan erat dan jalin menjalin dengan “*ups and downs*” partai-partai politik.

Hingga tahun 1927 perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau terhalang, jauh tercecir di belakang pertumbuhan Sarekat Islam, Sarekat Rakyat (PKI) dan Soematra Thawalib. Sebagai partai dan lembaga pendidikan Islam yang militan, tegas-tegas anti penjajahan, anti modal asing, pejuang kemerdekaan bangsa dan nusa, SI, SR dan Soematra Thawalib jauh lebih menarik dan mempersonakan. Muhammadiyah sebagai badan yang bergerak di bidang pendidikan dan tidak ragu-ragu menerima bantuan (uang) dari Pemerintah Hindia Belanda, dianggap lembek dan “banci”.<sup>65</sup>

Kekecewaan besar di kalangan rakyat banyak, yang merasa tertipu oleh janji-janji gunung emas pihak PKI, setelah “Perang Silungkang” mengalami kegagalan total, menjadikan Sarekat Islam yang telah bertukar nama menjadi “Partai Sarekat Islam Indonesia” (PSII) dan Muhammadiyah

---

<sup>65</sup> M.D. Mansoer, dkk., *Sedjarah Minangkabau*, (Djakarta : Bhratara, 1970), hal.182-183.

sebagai tempat berlindung dan bergerak. Anggota-anggota PKI dapat meloloskan diri dari pengawasan, pengejaran dan penahanan polisi rahasia (PID), menyusupi PSII dan Muhammadiyah di Minangkabau. Penyusupan anggota-anggota baru itu, dicekoki dengan semangat dan propaganda komunis, berhasil merubah sikap dan sifat Muhammadiyah maupun PSII. Kedua-duanya menjadi sangat militan dan agresif. Hal itu terbukti dengan nyata pada Konggres Muhammadiyah di Bukittinggi tahun 1930, dihadiri oleh ulama-ulama berpengaruh di Minangkabau dan tokoh-tokoh PSII. Pidato-pidato yang berapi-api dan bersemangat, tidak bebas dari kritik-kritik pedas dan sindiran yang dialamatkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, silih berganti dan menghangatkan suasana.

Cemas melihat perkembangan cabangnya di Minangkabau, yang telah jelas menyimpang dari prinsip pokok seperti yang digariskan, Pemerintah Pusat Muhammadiyah mengambil sikap dan tindakan yang tegas. Muhammadiyah di Minangkabau harus memecat anggota-anggotanya yang bermain api dengan politik dan membahayakan kedudukan pimpinan pusat.<sup>66</sup>

Muhammadiyah di Minangkabau mengalami kemunduran sejak tahun 1930. Anggota-anggotanya yang bersemangat dan aktif, mendapat penampungan pada PSII dan Soematra Thawalib (yang sudah di-*reorganisir*). Soematra Thawalib bersama-sama dengan anggota-anggota muda dan sedang bergelora semangatnya, dipecat dari Muhammadiyah, mendirikan "Persatoean Moeslimin Indonesia" (PERMI) pada tahun 1930.

Agitasi politik segera dilakukan oleh PSII dan PERMI, mengakibatkan turun tangan Pemerintah Hindia Belanda.

---

<sup>66</sup>M.D. Mansoer, dkk., *Ibid.*, hal. 184.

Pemimpin-pemimpinnya ditangkap, ditahan dan dibuang (diasingkan) ke Digul (1934). Kedua partai politik itu kehilangan pamor dan buyar dengan sendirinya (1937). Tinggal Muhammadiyah sebagai satu-satunya lembaga gerakan rakyat berdasarkan Islam sebagai wadah penampungan kegiatan-kegiatan dan semangat juang angkatan muda Minangkabau. Sejak itu Muhammadiyah mengalami perkembangan dan tumbuh pesat di Minangkabau sebagai lembaga pendidikan Islam modern, gerakan pemuda (kepanduan Hizbul Wathan), aktivitas kaum wanita (Aisyiyah), yang melancarkan dakwah Islam, menerbitkan majalah, menyelenggarakan balai-balai pengobatan, rumah yatim piatu, menerima dan membagi-bagikan zakat dan fitrah, dan sebagainya.

Membebaskan diri seluruhnya dari aktivitas politik, bagaimanapun semunya, berhubung dengan iklim kebudayaan dan suasana politik, Muhammadiyah di Minangkabau tidak pula dapat, sifatnya yang tetap "*ambigious*", benci itu, tidak dapat membebaskan Muhammadiyah dari pengawasan dan rasa curiga Pemerintah Hindia Belanda dan aparaturnya. Hal itu terbukti dengan nyata, ketika dilakukan penunjukkan anggota "Minangkabau Raad", Dewan Minangkabau (1938). Ulama modern (Syekh MD Djambek) dan konservatif (Syekh Abbas ar Rasuli) ditunjuk sebagai anggota dewan itu di samping wakil-wakil golongan lain, karena mendapat kepercayaan dari Pemerintah Hindia Belanda. Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan, sosial dan gerakan massa tidak mendapat kursi dalam dewan otonomi (yang hanya bertugas sebagai dewan penasehat) itu.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>M.D. Mansoer, dkk., *Ibid.*, hal. 185.

Hingga digantikan kekuasaan Belanda oleh Jepang (Maret 1942), Muhammadiyah-lah satu-satunya organisasi Islam yang ditolerir oleh Pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau.

Sejak awal berdirinya, perserikatan Muhammadiyah memposisikan diri sebagai organisasi/gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Namuan, ketika berhadapan dengan konstelasi perpolitikan di bumi Nusantara, Muhammadiyah sepertinya tidak dapat melepaskan diri untuk tidak "*sato sakaki*" (baca : ikut mewarnai) – dengan tujuan agar *politics world* dibingkai apik dengan *idealism of politics (akhlaqu as siyasa)*. Mengutip Syafi'i Maarif (2009), jika politik tidak pertolak dasar dari sebongkah idealisme – cepat atau lambat perlu disediakan empat helai kafan. Sekaitan dengan itu setidaknya terdapat dua model persinggungan Muhammadiyah dengan politik. *Pertama*, pada pelataran *political action in non-political ways* (aksi politik di luar jalur formal), dan *kedua*, pada kutup politik praktis.<sup>68</sup>

Karena cukup lengket dengan Masyumi dan bahkan memprakarsai tegak berdirinya Parmusi – dengan segala plus minus, dan atau untung ruginya. Apalagi Parmusi diintervensi oleh Pemerintahan Suharto, yaitu mendepak Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, serta mengganti orang-orang yang bisa dipengaruhinya. Misalnya Mintaredja, H.J. Naro dan lain-lain. Maka pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujungpandang diputuskan dua hal sangat prinsipil. *Pertama*, Muhammadiyah menyatakan bebas dari afiliasi dan hubungan organisatoris dengan Partai Politik (Parpol) apapun. Bahkan Mr. Kasman Singodimedjo waktu

---

<sup>68</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 185.

menjelaskan putusan tersebut dalam sidang Pleno Mukhtamar ke-38 di Ujungpandang itu menegaskan bahwa "*Muhammadiyah juga bukan onderdil-nya partai politik mana pun*". Kedua, Anggota Muhammadiyah bebas memilih, dan atau bergabung dengan Parpol yang disukai, dan atau sesuai dengan sekeping nuraninya. Tetapi tidak boleh membawa-bawa nama besar Muhammadiyah. Keputusan inilah yang dipertahankan kemudian menjadi *khithah* ideal konsepsional bagi Muhammadiyah sampai sekarang.

Kendatipun ada sementara kader yang mencoba untuk mempengaruhi warna dengan membentuk opini baru bahwa *khithah* tersebut tidak relevan lagi dipertahankan dan harus dihapus. Namun penggiringan tersebut tidak berhasil, bahkan yang bersangkutan pun kemudian sadar, bahwa gagasan itu sungguh sangat subyektif dan tidak ikhlas, karena bertolak pada kepentingan sesaat. Kesadaran ini semakin diyakini kebenarannya ketika pergumulan politik tidak lagi bersahabat seperti sebelumnya.<sup>69</sup>

Pada sidang Tanwir Muhammadiyah (1998) di Semarang dan meneropong perubahan kondisi sosial obyektif perpolitikan sejak menggelindingnya era reformasi dan demokratisasi pada 21 Mei 1998, Muhammadiyah justru melakukan "*ijtihad politik*". Salah satu keputusan yang dipandang tepat dan memungkinkan waktu itu : memberi izin kepada Prof. Dr. Amien Rais, MA (Ketua Muhammadiyah) untuk mendirikan Parpol, yang kemudian dikenal dengan nama Partai Amanat Nasional (PAN).

Siapa pun rumit untuk membantah, kehadiran PAN di bawah juru mudi Amien Rais, yang memang cukup bergetah dan bahkan bertahta di hati sebagian ummat Islam dan warga Muhammadiyah, tambahan lagi memang ada

---

<sup>69</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 186.

semacam benang merah dengan Tanwir Semarang, benar-benar menjadikan Muhammadiyah begitu dekat, akrab dan malah bergandengan bahu dengan politik praktis. Bahkan tak sedikit anggota serta aktivis Muhammadiyah sejak tingkat pusat sampai level wilayah, daerah, cabang dan ranting – menganggap/memosisikan Parpol berlambang matahari terbit itu sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang *siyasah* atau politik. Tetapi memang politik tidak selamanya jujur dan bersahabat, bahkan tidak mustahil menjadi racun di tengah kancah madu.<sup>70</sup>

Sembilan tahun kemudian, setelah melewati pengkajian intens dan perdebatan panjang di forum Tanwir Muhammadiyah Mataram (2004), serta diiringi silang pendapat para pemerhati sosial politik di mas media cetak dan elektronik, akhirnya Pemuda Muhammadiyah, dan didukung oleh segelintir tokoh senior pusat dan wilayah berketetapan hati pula mendeklarasikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sabtu, 24 Februari 2007) – dengan Ketua Imarah Syahrui Tanjung (Sekretaris PW Muhammadiyah Sumbar, 1986-1990), dan Ketua Majelis A'la Fakhri Taharuddin (Sesepuh dan Penasehat PD Muhammadiyah Pasaman, 2005-2010), di Gedung Kaharuddin Dt. Rankayo Basa, Jalan Ir. Juanda Lolong Padang. Sedangkan dalam lingkup nasional – sebelumnya digelar *soft launching* oleh Ketua PP PMB Imam Ad-daruqutni (Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) Hotel Sahid Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2006.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 187.

<sup>71</sup>Haedar Nasir, ed., *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hal. 88.

Memang tidak dapat dibantah, jika era reformasi dan demokratisasi yang bergulir sejak tanggal 21 Mei 1998, banyak membawa berkah, dan bahkan “*mukjizat*” bagi segelintir warga dan kader Muhammadiyah. Bukti yang riskan untuk ditampik, cukup banyak petinggi atau elite Muhammadiyah yang ketiban durian runtuh. Mereka dapat peluang menyalurkan bakat, darah dan libido politiknya di berbagai Partai Politik.

Sekedar menyebut beberapa nama : Hajrianto Thohari dan Hasanuddin Mukhtar di Golkar; Mukhtar Bukhari dan Heri Ahmadi di PDI Perjuangan; Marzuki Usman dan Habab Chirzin di PKB; Amien Rais, AM Fatwa, Sutrisno Bakir, Patrialis Akbar, dan Hj. Nurdiati Akma di PAN; Iman Ad-daruqutni, Endang Tirtana, Fahri Taharuddin dan lain-lain di PMB; Yusril Ehza Mahendra dan Hidayat Nurwahid masing-masing di PBB dan PKS; dan Irman Gusman untuk DPD dan lain sebagainya.

Di Provinsi Sumatera Barat, setelah reformasi beberapa aktivis Muhammadiyah juga asyik bergumul di area *low politics*. Mereka di antaranya yaitu Arwan Kasry, Khaidir Khatib Bandaro, Apris Yaman, Marhadi Efendi, Taslim, Hamidi, Zainal Djis, Syamsir Dt. Perpatih, Ahmad Namlis, Manaf Taher dan lain-lain di PAN; Syahrui Tanjung, Darmadi, Moestamir Makmoer, Irdinansyah Tarmizi dan Marfendi masing-masing di PMB, PBB, Golkar dan PKS; Anasdi Nazar, Guspardi Gaus, Syukriadi Syukur dan Amora Lubis, Amri HD dan lain-lain di PPP,<sup>72</sup> dan sederet nama yang tak mungkin disebut satu demi satu di sini.

Jika *diindang ditampi tareh-dipilah atah ciek ciek*, lalu disinkronkan dengan Keputusan Mukhtar Muhammadiyah 38 Ujung Pandang, yang kemudian dikukuhkan kembali di

---

<sup>72</sup>Haidar Nasir, *Ibid.*, hal. 89.



Muktamar 44 Jakarta pada 8-11 Juli 2000 dan Tanwir Bali 2002, sebenar-benarnya, kiprah plus membungkus lupus diri di habitus Parpol yang diklaim, tepatnya mengklaim diri “bertali temali dengan Muhammadiyah”, mesti ditegaskan, bahwa sama sekali bukan atas nama Muhammadiyah secara organisatoris dan administratif.

Untuk memelihara keutuhan *Rumah Gadang Muhammadiyah* yang komit dengan *political disengagement* (menjaga jarak dengan parpol), ditetapkanlah tiga qaidah esensial yang diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tersebut. *Pertama*, para politisi yang berasal dari Muhammadiyah berkewajiban menegakkan sejujurnya, bahwa berpolitik adalah menunaikan amanah, menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran. Semua itu mesti dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama anak manusia. (QS93): 112).

*Kedua*, mereka mesti menanamkan ke petala jiwa masing-masing bahwa, berpolitik adalah demi kepentingan ummat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah, dan ihsan kepada sesama manusia (QS (51) : 56). Makanya, politisi Muhammadiyah tidak boleh sedikit pun mengorbankan kepentingan yang lebih luas demi meraup kepentingan diri dan kelompok (*self and group interest*).

*Ketiga*, mereka itu berkewajiban memposisikan diri sebagai *uswatun (qudwatun) hasanah* (QS (33) : 21) yang jujur, benar, adil serta melempar jauh-jauh perilaku politik kotor, licik, fasad, hobi mengusung fitnah, serta terperangkap pada perilaku politik latah berjangka pendek. Sebab, berpolitik tidak lain adalah dengan segala kesalehan individual (*ibadah mahdhah*) dan kesalehan kolektif sosial (*ibadah ‘ammah/ghairu mahdhah*), serta sikap positif, dan

memiliki cita-cita jangka panjang. Yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (berkualitas dan mumpuni (QS (3) : 104 dan 110). Semua harapan dan ketentuan tersebut telah tertuang rapi dalam PHI Warga Muhammadiyah sebagai produk Mukhtamar ke-44.<sup>73</sup>

Sejak Muhammadiyah menapak dan menyeruak ke Minangkabau/Sumatera Barat pada tahun 1925 sampai sekarang, peran-peran personal amatlah dirasakan faedahnya paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, ketika segelintir orang memandang sebelah mata, sinis, berwajah masam dan bahkan mencibir kepada persyarikatan, sekecil apa pun kadar ke-Muhammadiyah yang bertengger di “benak” seorang warganya, mereka menggalangkan urat leher membela Muhammadiyah.

*Kedua*, sudah menjadi watak warga Muhammadiyah di manapun mereka merayap mencari kehidupan, dengan iklas berbagi rezeki, dan atau menelusuri peluang-peluang guna merampungkan beragam infra-struktur (sarana dan prasarana) yang sedang dibangun oleh Muhammadiyah. Misalnya proses menyelesaikan pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah di Sawahan No. 62 Padang; Masjid Taqwa Muhammadiyah; Kampus UMSB yang lebih representatif; Radio Sang Surya 98, 3 FM; Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang, begitu juga ketika membangun kompleks Pesantren Al-Kautsar di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dan Alamanda di Kinali Pasaman Barat SDM Simabur<sup>74</sup> dan lain-lain. Semuanya menelan biaya yang tidak sedikit.

Kecuali itu, masih ada sejumlah infrastruktur berupa rumah sakit, panti asuhan, sekolah, kantor, mesjid dan alain

---

<sup>73</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 190.

<sup>74</sup>Khatib Pahlawan kayo dan marjohan, *Ibid.*, hal. 197.

sebagainya di tingkat daerah, cabang serta ranting Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Dan alhamdulillah masih tetap seperti itu, seperti yang dirasakan ketika menghadapi musibah gempa 30 September 2009 yang lalu. Sebagaimana diarahkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Din Samsuddin yang datang hari pertama pasca gempa (1 Oktober 2009) agar segera dibentuk Posko induk di lantai satu Mesjid Taqwa dan posko pengendali serta satelit di PDM Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Kota Padang.<sup>75</sup> Pada hari-hari berikutnya PWM bersama Sekretariat Posko itu betul-betul sibuk melayani tamu dari relawan-relawan yang akan memberikan bantuan dari berbagai wilayah Muhammadiyah se Indonesia serta LSM luar negeri. Termasuk yang mengirimkan bantuan melalui Bank dan pos wesel.

### 3.5. Wadah Organisasi

Macam-macam tantangan yang menghadang di pelupuk mata Muhammadiyah juga bervariasi dari zaman ke zaman. Pada zaman penjajahan *tempoe doeloe*, Muhammadiyah ikut bersimbah peluh dan mencururkan keringat mencerdaskan kehidupan anak negeri, untuk membuat hengkang penjajah di bumi Nusantara. Pada zaman revolusi, Muhammadiyah gigih merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Sekedar contoh, Panglima Besar Soedirman dan Ir. Soekarno adalah aktivis Muhammadiyah yang sangat besar kontribusinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

---

<sup>75</sup>Marjohan, *Muhammadiyah, Antara Ideakisme dan Pragmatisme* (Lubuk sikaping : Mita Luhur, 2006),hal. 97

Sejarah mencatat Pak Dirman adalah tokoh pemuda *Hisbul Wathan* (HW) di Banyumas. Sedangkan Bung Karno pernah diorbitkan oleh Buya AR Sutan Mansur menjadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu. Satu lagi dan ini yang lebih penting, KH Ahmad Dahlan dan Nyai Dahlan tercatat sebagai Pahlawan Nasional/Pahlawan Kemerdekaan. Tidak ada sepasang suami istri di tanah air yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, kecuali Ahmad Dahlan dan pendiri Aisyiyah itu.<sup>76</sup>

Pada zaman demokrasi parlementer, para anggota Muhammadiyah sampai ke tingkat ranting/grup, terutama di Minangkabau tercatat gigih belajar demokrasi. Ia ikut melakukan *trial and error* sebagai proses belajar berbangsa dan bernegara. Pada zaman demokrasi terpimpin, para aktivis Muhammadiyah berjuang antara hidup dan mati menghadapi tekanan kaum komunis yang akan menyelewengkan cita dan citra kemerdekaan. Pada zaman Orba, Muhammadiyah bergandengan bahu dengan seluruh elemen bangsa mengisi kemerdekaan. Dan kini, pada zaman reformasi dan demokratisasi, bendera Muhammadiyah masih tetap tegak berkibar. Dan sesuai dengan *khithahnya* sebagai gerakan dakwah dan gerakan *tajdid fi al-Islam*, Muhammadiyah berkonsentrasi pada gerakan kultural dan intelektual guna menggapai *izzul Islam wa-al muslimin* di negeri ini.

Dengan begitu, *khithah*, strategi dan orientasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya satu abad yang silam, tidak pernah mengalami perubahan fundamental. Kalaupun berubah, hanya pada nuansa dan gaya perjuangan, sesuai dengan konteks situasional politik yang dihadapi. Pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 misalnya,

---

<sup>76</sup>Marjohan, *Ibid.*, hal. 98.

Muhammadiyah sebagaimana juga Ormas Islam lain (kecuali Pelajar Islam Indonesia/PII), ikut membubuhkan *Pancasila* sebagai azas organisasi. Hal demikian sesuai dengan tuntutan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang penyeragaman azas Ormas yang penerapannya dipaksakan oleh pemerintah otoritarian Orde Baru kala itu.<sup>77</sup> Secara substansial, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada credo perjuangannya sebagai gerakan Islam yang bersumber pada al Quran dan Sunnah Rasul.

Kini Muhammadiyah Sumatera Barat mempunyai 17 Daerah yang terletak di Kabupaten/Kota (Muhammadiyah Daerah Kota Solok dan Kota Payakumbuh sedang dipersiapkan pemekaran). Tujuh belas daerah Muhammadiyah tersebut mengkoordinir sebanyak 135 Cabang Muhammadiyah. Dan 135 Cabang mengkoordinasikan sejumlah 736 Ranting. Secara kuantitatif jumlah anggota Muhammadiyah di Sumatera Barat yang teregistrasi tidak kurang dari 1.500.000 (Satu setengah juta) orang.<sup>78</sup>

Revitalisasi Ranting/Cabang Muhammadiyah yang diprogramkan PW Muhammadiyah Sumatera Barat sejak 2005 hingga 2010 cukup berhasil. Setiap pendirian Ranting Muhammadiyah selalu didahului dengan pendirian sekurangngnya satu amal usaha bidang pendidikan. Sampai sekarang Muhammadiyah Sumatera Barat mengelola 358 buah sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan. Rinciannya, TK/Bustanul Athfal 238 buah (dikelola khusus oleh Aisyiyah); Madrasah Ibtidaiyah/SD/MDA 17 buah; MTsM dan SLTPM masing-masing sebanyak 46 dan 16 buah; MAM dan SMUM masing-masing sejumlah 15 dan 12 buah;

---

<sup>77</sup>Khatib Pahlawan kayo dan marjohan, *Op. Cit.*, hal. 199.

<sup>78</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 202.

SMKM dan Pondok Pesantren Muhammadiyah masing-masing 10 dan 6 buah.<sup>79</sup>

Sedangkan tingkat Perguruan Tinggi ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) dengan 7 Fakultas, 1 Akademi dan 1 Program Diploma serta Program Pasca Sarjana (S2-3), dengan konsentrasi/jurusan Pendidikan Islam dan Hukum Islam (Syari'ah).

Masih bersentuhan dengan pendidikan informal, Muhammadiyah mempunyai 54 buah Panti Asuhan dan 195 buah mesjid. Dari jumlah sebanyak itu, belum termasuk yang sedang dalam proses registrasi di PW dan PP Muhammadiyah. Kecuali itu, masih ada Bimbingan/Manasik Jama'ah Calon Haji yang bermarkas di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang serta di sejumlah PD Muhammadiyah seperti Padang Pariaman, Cabang Kubang 50 Kota dan di Kota Payakumbuh; Korps Mubaligh Muhammadiyah tingkat wilayah dan daerah; Rumah Sakit Aisyiyah di Padang, di Padang Pariaman, Lubuk Basung Agam, Gaung Kota Padang dan Lintau Kabupaten Tanah Datar; Poliklinik di Kudu Ganting dan Koto Tinggi Padang Pariaman yang baru ditumbuhkan atas bantuan PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah pada pasca gempa 30 September 2009; Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS); Baitul Mal Wattamwil (BTM); Gedung Dakwah Muhammadiyah; Koperasi di beberapa Daerah Muhammadiyah; serta tanah sebanyak 595 persil.

*Keempat*, Muhammadiyah tidak pernah tergoda menukar jubahnya dengan jaket atau atribut *low politics* atau politik praktis. Sebab, sejak KH Ahmad Dahlan sampai Ketua Umum PP digenggam oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin (Sumando Minangkabau) kini, Muhammadiyah

---

<sup>79</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 203.

sudah membaca secara arif lagi bijak, bahwa keterlibatan politik bagi Muhammadiyah dapat memojokkan persyarikatan Islam tertua ini ke dalam jebakan yang merugikan.

### 3.6. Amal Usaha

Seirama dengan kebijakan di tingkat nasional, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan, tidak bernama Muhammadiyah kalau tidak bergerak. Karena itu Muhammadiyah di Minangkabau terbilang cepat bahkan kadang-kadang agak sedikit lebih awal dalam melangkah. Tercatat ada tiga keberanian sebagai reputasi gemilang yang menempatkan posisi Muhammadiyah Minangkabau berada di barisan depan. *Pertama*; tercatat sebagai tuan rumah pelaksanaan Konggres pertama di luar Jawa di Bukittinggi 14-21 Maret 1930, pada hal waktu itu usia Muhammadiyah Minangkabau baru 4 tahun. *Kedua*; tercatat kader Muhammadiyah dari luar Jawa yang pertama dipercaya sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia, dengan terpilihnya Buya AR. Sutan Mansur sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-32 di Purwokerto tahun 1953. Kemudian terpilih lagi pada Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Hal itu tentu sebuah bukti bahwa kader Muhammadiyah dari Minangkabau mampu, disenangi dan diperhitungkan. Apalagi kemudian terbukti terjadi rekam jejak dengan terpilihnya Buya Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-44 di Jakarta. *Ketiga*; tercatat pula mampu mendirikan Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah di Padangpanjang

sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah pertama di Indonesia. Diresmikan pada tanggal 18 November 1955.<sup>80</sup>

Jadi tepatlah, adagium yang mengatakan bahwa “Muhammadiyah lahir di Yogyakarta – dibesarkan di Minangkabau”. Namun tetap saja mengikuti dinamika yang lazim berlaku di Minangkabau bahwa menggerakkan Muhammadiyah tidak terlepas dari jalan yang berliku, mendatar, mendaki, dan menurun. Jadi tidaklah heran setelah berselang 85 tahun perkembangan organisasi Muhammadiyah di ranah Minang belum tentu secemerlang masa lalu, misalnya dalam bidang *pendidikan, kesehatan dan sosial*. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif ada yang sama dengan wilayah-wilayah lain, namun secara jujur dan ikhlas harus diakui kualitasnya masih jauh dari standar normatif. Untuk Sumatera saat ini, kita pantas memberi apresiasi kepada Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Riau. Wilayah-wilayah tetangga itu telah berhasil lebih maju di bidang-bidang tersebut, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa.

Kondisi obyektif organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat saat ini yang harus menjadi perhatian bagi pimpinan dan warga persyarikatan adalah sebagai berikut :

1. Sumber dan potensi yang dimiliki cukup besar, namun perlu diberdayakan secara optimal dan profesional, sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Di sisi lain perlu dibangun upaya pimpinan persyarikatan untuk meningkatkan kualitas yang belum tercapai terutama dalam pengelolaan amal usaha.

---

<sup>80</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 209.



2. Organisasi belum sepenuhnya terbenahi menurut manajemen persyarikatan. Banyak anggota pimpinan kurang memahami qaidah dan etika yang berlaku, sehingga kebijakan yang diambil sering tumpang-tindih dan pada gilirannya menimbulkan konflik internal yang melelahkan sehingga melemahkan organisasi.
3. Administrasi belum dirapikan sesuai dengan petunjuk persyarikatan, sehingga data yang akurat kurang dimiliki. Buktinya sering dalam membuat program tidak berdasarkan analisis data dan fakta yang valid, sehingga sulit direalisasikan apalagi untuk mendapatkan dukungan dana dari luar.
4. Harta kekayaan organisasi relatif banyak, baik yang bergerak maupun tidak, seperti tanah dan gedung, namun kurang terpelihara secara amanah. Ada yang hilang dari inventaris, sertifikat atas nama pribadi dan ada yang pindah ke Yayasan lain atau ditarik kembali oleh keluarga pewakaf.
5. Hubungan organisasi dengan amal usaha belum diikuti prinsip-prinsip manajemen terutama tentang “koordinasi dan pengawasan”, sehingga ada amal usaha yang lepas kendali dan akhirnya oleh tenaga-tenaga trampil tetapi kurang faham dengan sistem dan aturan yang berlaku dalam persyarikatan.
6. Komunikasi dan ukhuwah yang kurang terpelihara dengan baik, telah membuka peluang berkembangnya perasaan “suu’zhon”. Kondisi seperti ini tanpa disadari menjadi sumber fitnah yang melumpuhkan kekuatan persyarikatan karena dapat membunuh karakter seseorang untuk berkembang.
7. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan para kader dan pimpinan organisasi, berakibat menipis dan

rendahnya pandangan dan penghargaan orang luar terhadap organisasi.<sup>81</sup>

Mencermati pertumbuhan dan perkembangan organisasi dan amal usaha tersebut, ke depan sudah saatnya dilakukan langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

1. Aktualisasi spiritualitas Islam dan pemikiran *tajdid*. Ini harus berpijak dan bertolak dari nilai-nilai kemurnian ajaran Islam. Artinya apapun yang digerakkan dalam organisasi haruslah diwarnai niat ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah dan ihsan terhadap sesama ummat, dengan selalu memperhatikan kemajuan zaman.
2. Revitalisasi dan keunggulan Amal Usaha. Artinya tidak masanya lagi pimpinan persyarikatan dan pengelola amal usaha berpuas hati dengan keadaan sekarang yang serba kurang dan serba sederhana, dengan semboyan "*Lebih baik ada, dari pada tidak ada*". Era globalisasi dan reformasi menurut kita harus maju dan kerja keras dengan kinerja yang baik untuk mencapai keunggulan dalam berprestasi. Kita harus bertekad dan mampu membuktikan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih unggul dari hari ini.
3. Dinamisasi fungsi dan keteladanan. Kepemimpinan Muhammadiyah/Aisyiyah yang bersifat kolektif dan kolegial, harus senantiasa dibangun dan dipelihara, sehingga harmonisasi dalam kebersamaan menjadi modal utama dalam menempatkan posisi persyarikatan di barisan depan. Untuk itu, kejujuran, kedisiplinan, amanah, kecerdasan dan istiqomah harus dijadikan tumpuan dan andalan setiap pimpinan dalam membimbing dan mengarahkan gerak organisasi dan amal usaha mencapai

---

<sup>81</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 211.

tujuan perjuangan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW.<sup>82</sup>

Dalam kerangka berfikir seperti itulah beberapa periode terakhir Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat mulai membangun kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi dalam tubuh persyarikatan. Sekat-sekat emosional dalam ego sektoral mulai dieliminir meskipun terasa berat. Pimpinan Muhammadiyah berusaha menempatkan posisi sebagai pimpinan yang memegang kedaulatan universal, melakukan pembinaan daerah dan cabang, melaksanakan koordinasi majlis, lembaga dan ortom serta mengayomi pertumbuhan dan perkembangan amal usaha.

Alhamdulillah, dalam segi organisasi dan amal usaha pertumbuhannya mulai menggembirakan, karena secara bertahap mulai diambil kebijakan untuk memurnikan amal usaha yang selama ini masih dikelola di luar koridor organisasi seperti Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah-Muhammadiyah Padang yang semula di bawah payung Yayasan Klinik Bersalin Aisyiyah, akte notaris Abdul Kadir Usman No. 6, tanggal 10 November 1969 di Padang. Sesuai dengan Keputusan PP Muhammadiyah No. 34/PP/1986, tentang : Penertiban Yayasan Dalam Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah berproses cukup lama, dalam konteks ketidak pahaman terhadap aqidah organisasi, terakhir dengan turunnya secara langsung Ketua PP Muhammadiyah 1990-1995 K.H. Azhar Basyir MA, didampingi Koordinator Bidang sosial Ekonomi PP Muhammadiyah Drs. H. Fahmi Chatib (Keduanya sudah

---

<sup>82</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hal. 26..

almarhum), maka Yayasan Klinik Bersalin Aisyiyah dibekukan dan tidak dibenarkan lagi bergerak mengelola amal usaha dalam bentuk apapun yang memakai label Muhammadiyah/Aisyiyah.<sup>83</sup> Sementara pengelola RSU diambil alih oleh PWM Sumbar.

Pada periode Pimpinan Wilayah 2005-2010 ini kebijakankedua dilanjutkan dengan mengembalikan nomenklatur nama Rumah Sakit Umum yang tadinya waktu pengambil-alihan dari Yayasan Klinik disepakati (*sementara*) "*Rumah Sakit Umum Aisyiyah- Muhammadiyah*" menjadi : *Rumah Sakit Umum Aisyiyah*" saja.

Secara resmi pula pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat dengan membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH), termasuk amal usaha yang terkait secara historis dengan Rumah Sakit tersebut seperti Akademi Keperawatan Aisyiyah Padang yang berkampus di Gunung Pangilun. Dalam struktur BPH ini ditetapkan sebagai Pembina adalah Ketua PWM dan Ketua PWA Sumatera Barat. Kini untuk pengelolaan RSU Aisyiyah ini BPH dipercayakan kepada dr. Hj. Farida Ilyas, dr. Hj. Nurlely Fatah sebagai Ketua/Wk. Ketua, dibantu oleh Dra. Hj. Meiliarni Rusli dan dr. Hj. Hanifah Ma'any sebagai Sekretaris dan Bendahara, dan lain-lain.<sup>84</sup>

Penertiban amal usaha ini juga telah dilakukan terhadap Mesjid Muhammadiyah di Padang, ketika runtuhnya Mesjid Raya Muhammadiyah Padang pada tanggal 6 Januari 1975. Di mana sebelumnya mesjid tersebut dikelola dan berada di bawah koordinasi Muhammadiyah

---

<sup>83</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 113.

<sup>84</sup>Haedar Nashir, *Kristalisasi Idiologi dan Komitmen Bermuhammadiyah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 121.

Cabang Padang Barat Kodya Padang. Atas kesepakatan bersama dan untuk menghadapi perkembangan kota masa depan serta menyesuaikan ketersediaan SDM persyarikatan dalam memanager dan mengupayakan terbangunnya kembali mesjid yang representatif setelah runtuh, maka terhitung sejak Januari 1975 itu pengelolaan Mesjid yang akan dibangun selanjutnya diserahkan kepada dan berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Sejak itu pula nama Mesjid ini diganti menjadi "*Mesjid Taqwa Muhammadiyah*" Jalan Bundo Kandung No. 1 Padang.

Dengan demikian amal usaha yang secara langsung berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat saat ini adalah : (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2) Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang, (3) Bank Perkreditan Rakyat Nurul Baraqah di Lubuk Alung, diresmikan pada tanggal 4 Januari 1994 oleh Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Hasan basri Durin. (4) Baitul Maal Wattamwil Taqwa, (5) Badan Pengelola Ekonomi Islam (Toko Buku, Pangkas Rambut, Foto Copy, Wartel) dan (6) Radio Dakwah Sang Surya FM 98,3. (7) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sakinah. Empat yang terakhir berada dilantai satu Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang, pada periode 2000-2005 SMK I Muhammadiyah Simpang Haru sebenarnya masih di bawah pembinaan dan koordinasi Pimpinan Wilayah, namun atas desakan dan permintaan pimpinan persyarikatan baik Cabang Padang Timur maupun Daerah Kota Padang, pengelolaan amal usaha di kompleks tersebut diserahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Padang dalam hal ini di bawah pembinaan Majelis Dikdasmen selaku Badan Pembantu Pimpinan dan dengan membentuk Badan Pengelola

Kompleks Perguruan Muhammadiyah (BPKPM). Sama halnya dengan Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang, penyerahan tersebut tentu diharapkan agar pengelolaannya lebih baik dan lebih profesional serta mampu bersaing di era global.<sup>85</sup>

Dapat ditambahkan bahwa dalam periode kepemimpinan 2005-2010 ini juga dibangun tiga proyek fisik, yaitu Gedung Dakwah direncanakan berlantai lima di Jalan Sawahan 62 Padang, Gedung Asrama Mahasiswa dan Pusdiklat AMM di Kampus UMSB Pasir Kandang Koto Tengah Padang serta Gedung Sekolah Dasar Muhammadiyah di Simabur. Untuk ketiga bangunan tersebut Pimpinan Wilayah memperoleh dukungan dana dari APBD Sumatera Barat 2008 sebesar 2, 5 milyar untuk Gedung Dakwah, 1, 2 milyar untuk asrama/pusdiklat AMM, dan 1, 3 milyar dari BUMN Peduli Gempa khusus untuk SD Simabur yang sekarang memang terkena musibah gempa 2007, dan secara historis pada awal berdirinya (1930-an) sangat aktif dan favorit untuk lingkungannya, ketika itu melaksanakan pendidikan kader bernama Muallimin Muhammadiyah Cabang Padang Panjang. Penempatan bantuan tersebut berdasarkan hasil seleksi Tim Pusat bersama Majelis Dikdasmen PWM Sumbar. Mudah-mudahan dengan terbangunnya gedung yang cukup megah itu dapat membangkitkan kembali batang tarandam sebagai cabang tertua setelah Padang Panjang(1927) yang sejak sepuluh tahun terakhir memang mengalami lesu darah disebabkan banyak faktor terutama keterbatasan dana dan kelangkaan SDM. Saat ini Cabang Simabur ini didukung dengan keberadaan ranting-rantingnya seperti : Batur, Sungai

---

<sup>85</sup>Sjafri Sairin, dkk., *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, (Yogyakarta : LPTP PP Muhammadiyah, 2003), hal., hal. 91.

Jambu, Tabek, Tanjung Limau, Sialahan, Koto Tuo dan Batubasa.<sup>86</sup> Namun sebagian besarnya perlu pembinaan.

Khusus untuk pembangunan gedung dakwah di Jalan Sawah No. 62 Padang, PWM Sumatera Barat sangat berterima kasih kepada keluarga besar bapak H. Musa Pangai di Jakarta yang telah mewakafkan tanah seluas 800 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan gedung tersebut. Sedangkan dalam pengadaan dana tahap awal (2,5 M) tak dapat dilupakan jasa baik dan perhatian dari unsur Pemda dalam hal ini terutama Gubernur dan Wakil Gubernur, bapak H. Gamawan Fauzi, SH dan Prof. Dr. H. Marlis Rahman M.Sc. serta unsur legislatif mulai dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota yang terhormat, bapak Drs. H. Leonardi Harmaini, Mahyeldi Ansharullah, Drs. Apris Yaman, Drs. Irdinansyah Tarmizi, Drs. Guspadi Gaus, Drs. Taslim, Marhadi Effendi dan A. Mora Lubis. Ketika kunjungan Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudoyono ke Padang sebelum Pilpres 2009 juga memberikan bantuan Rp. 200 juta untuk pembangunan gedung dakwah ini. Terakhir dalam rangka syukuran Muhammadiyah satu abad pada tanggal 6 Februari 2010 di Padang, juga diterima bantuan sebesar Rp. 500 juta masing-masing 50 juta dari Prof. Dr. Amien Rais, 150 juta dari bapak Zulkifli Hasan/Menteri Kehutanan RI dan 150 juta dari Bapak H. Patrialis Akbar/Menteri Hukum dan HAM. RI dan Edi Yesfi 150 juta. Semoga bernilai ibadah dan amal shaleh di sisi Allah SWT.

Untuk diketahui, kesuksesan pembangunan gedung dakwah ini adalah berkat kerja sama Panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Marlis Rahman M.Sc. (Kini Gubernur Sumbar) dengan berbagai pihak, didukung oleh beberapa orang anggota panitia yang aktif antara lain : Wakil Ketua

---

<sup>86</sup>Sjafri Sairin, *Ibid.*, hal. 93.

Drs. H. Mirwan Pulungan M. Pd. Sekretaris H. Priadi Syukur SH, Bendahara Drs. Salman M. Nur, dibantu Sudirman Nawawi BAE, Drs. H. Nurman Agus, Zulfakri SE dan Drs. Ali Imran.<sup>87</sup>

Untuk pembangunan dan rehabilitasi fisik dan non fisik lainnya PWM Sumatera Barat juga mendapat bantuan 1 milyar dari Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Bambang Sudibyo melalui Direktur Jenderal Dikti Prof. Dr. Fasli Jalal untuk renovasi aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Kauman Padangpanjang yang telah lapuk dimakan usia. Alhamdulillah gedung lama yang dibangun awal tahun 1950-an sebagai pendukung berdirinya Fakultas Falsafah dan Hukum yang diresmikan pada tanggal 18 November 1955 itu sudah berpenampilan baru, kendatipun untuk renovasi keseluruhan masih memerlukan dana yang cukup besar. Untuk kesempurnaan renovasi gedung ini sampai selesai saat ini sedang diusahakan mendapatkan dana dari berbagai sumber di bawah koordinasi Rektor Dr. Shofwan Karim, dibantu para Pembantu Rektor dan Dekan di lingkungan USMB. Untuk mewujudkan sebuah Radio Dakwah yang sudah lama dicita-citakan, juga diperoleh bantuan kurang lebih Rp. 280 juta dari bapak M.S. Kaban, SE, M.Si/Menteri Kehutanan RI. Radio Dakwah yang diresmikan operasionalnya tanggal 17 November 2007 ini ditempatkan di lantai satu Mesjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Bundo Kandung No. 1 Padang, bernama Sang Surya FM 98, 3. Khusus untuk manajemen pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; telah dibentuk PT Radio Sang Surya dengan Akta Notaris Wahidah Septiani, SH No. 15/16 April 2007. Dengan surat

---

<sup>87</sup>Khatib Pahlawan Kayo, *Muhammadiyah Dalam Pergumulan Tektual dan Kontektual*, (Padang : PW Muhammadiyah Sumatera Barat, 2007),hal. 63.



Pengesahan Perusahaan dari Dep. Hukum dan HAM RI No. W3-00149 HT.01.01-TH 2007. 27 Juni 2007. Berdasarkan Akta Notaris tersebut, ditetapkan personal sebagai berikut : Komisaris Utama : Drs. RB. Khatib Pahlawan Kayo, Komisaris; Drs. Mirwan Pulungan M.Pd dan Drs. Salman M. Nur M.Pd. Sedangkan Direktur diamanahkan kepada Drs. Adrian Muis.<sup>88</sup>

Bantuan lainnya pasca gempa 2007 juga diterima Rp. 150 juta dari Anggota Pengajian ORBIT binaan Prof. Din Syamsudin untuk renovasi Panti Asuhan Muhammadiyah Batipuh dan Rp. 100 juta dari General Management Lion Airline untuk Perguruan Kauman Padang Panjang. Secara umum pertumbuhan dan perkembangan amal usaha persyarikatan di Sumatera Barat ada yang menggembirakan dan wajib disyukuri, tetapi tidak kurang pula di beberapa daerah cabang daya juang seperti pada masa-masa awal berdirinya tidak lagi dirasakan, nampaknya perlu suntikan darah segar untuk mengembalikan semangat juang yang mulai mengendur itu. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi Muhammadiyah berikut amal usahanya di Minangkabau pernah mengalami pasang naik yang cukup mengesankan bahkan menjadi contoh yang membawa spirit bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Tidak saja di Sumatera bahkan sampai ke Sulawesi dan Irian Jaya seperti yang dialami sekitar tahun 1930-1950-an. Namun musim berganti, masa beralih sejarah mencatat bahwa kejayaan dan kemegahan bukanlah sesuatu yang sifatnya menetap di daerah tertentu saja, tetapi akan dipergilirkan Allah SWT sebagai bukt kekuasaanNya. (Q.S. (3) : 140).

Saat ini kondisi obyektif amal usaha Muhammadiyah di Sumatera Barat secara umum masih tumbuh dan

---

<sup>88</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 119.

berkembang dengan berbagai variasi, buktinya masih banyak masyarakat yang tertarik dengan keberadaan amal usaha Muhammadiyah baik untuk ditompangi maupun untuk dibantu.

Hal ini tentu sebuah bukti bahwa keberadaan Muhammadiyah dan amal usahanya masih diperlukan oleh ummat. Misalnya dalam bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren, bidang kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik dan balai pengobatan. Begitu juga bidang sosial seperti panti asuhan dan santunan keluarga. Termasuk juga bidang tabligh seperti pembinaan mesjid, mushala dan kelompok-kelompok jama'ah serta korps mubalighnya. Hanya perlu disadari, banyaknya amal usaha tersebut masih pada tataran kuantitatif dan masih terbatas jumlahnya yang benar-benar telah ditangani secara profesional. Hal ini bukan pula tak beralasan, karena memang sejak awal berdirinya pertumbuhan dan perkembangan amal usaha Muhammadiyah lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan ummat di lapisan akar rumput baik di pedesaan maupun di perkotaan yang sulit mendapatkan kesempatan untuk sekolah karena tidak sanggup membayar uang SPP dan masih banyak warga masyarakat yang tidak mempunyai akses untuk berobat ke rumah sakit pemerintah, baik karena jauh maupun karena tidak mempunyai uang. Sementara pembinaan aqidah dan bimbingan ibadah serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi ummat perlu dilakukan.

Faktor penyebab lainnya adalah kesadaran berorganisasi belum sepenuhnya mendukung untuk pengembangan amal usaha dalam berkompetisi, sehingga pentadbiran amal usaha belum dapat disesuaikan dengan tuntutan manajemen modern. Di satu sisi lembaga amal

usaha sangat diinginkan untuk berprestasi dan didukung tenaga-tenaga yang *qualified* dan untuk itu diperlukan kemampuan pimpinan persyarikatan dan dukungan dana bagi peningkatan wawasan dan ketrampilan tenaga-tenaga tersebut. Namun di sisi lain wawasan dan kinerja pimpinan yang diberi amanah sangat bervariasi dan masih banyak yang perlu ditingkatkan, baik *leadership* maupun manajemen. Kita masih perlu kerja keras dan belajar ke berbagai pihak untuk mengejar ketertinggalan agar amal usaha yang dimiliki menjadi favorit untuk diunggulkan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Tidak saja dari masyarakat umum, lebih-lebih dari kalangan warga persyarikatan sendiri terutama para pemimpinnya.

Keterbatasan dana dalam pengelolaan tentu juga sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana serta pemberian nafkah bagi tenaga pengelola. Dan itu semua sangat berdampak terhadap loyalitas pengabdian dan penampilan wajah amal usaha. Kondisi obyektif ini merupakan tantangan bagi Sumatera Barat untuk merebut peluang dan belajar mengambil hikmah dari pasang surut yang sedang dialami.<sup>89</sup>

Ke depan barang kali tugas pokok yang harus menjadi prioritas para pemimpin dan kader, apabila kita ingin menggapai kembali keberhasilan demi keberhasilan seperti yang dicontohkan di beberapa wilayah saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kendati tahun 2009 tepatnya pada tanggal 30 September Sumatera Barat kembali dilanda gempa tektonik yang cukup kuat (7, 9 SR). Gempa bumi yang dahsyat ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Khusus di lingkungan persyarikatan amal usaha yang terkena, baik

---

<sup>89</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal., 222.

berat, sedang maupun ringan adalah : Mesjid 58, Mushalla 39, Panti Asuhan 14, TKABA 36, SD/MI 20, SLTP 11, SLTA 6, Lemb. Ekonomi 2, Kantor 5, PT 2, RS/RSB 3 Rumah Warga 708 buah.<sup>90</sup>

Namun alhamdulillah perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak terutama PP Muhammadiyah/Aisyiyah, Majelis dan Ortom serta PWM-PWM, RSU dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia cukup menggembirakan. Semuanya menurunkan relawan dan bantuan uang/makanan dan selimut serta obat-obatan, baik waktu tanggap darurat maupun masa Rehab/Rekon.

Posko dan tim yang dibentuk di bawah koordinasi Wakil Ketua PWM Drs. Daeril Ilyas, baik posko induk di padang maupun satelit di Padang Pariaman dan Agam, betul-betul sibuk melayani kedatangan relawan dan kunjungan pemerhati termasuk saudara-saudara kita dari Muhammadiyah luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan Timur Tengah. Khusus dalam bidang pelayanan kesehatan di samping penempatan dokter umum, spesialis dan para medis sampai tiga bulan secara bergantian, juga mendirikan dua buah poliklinik di Kabupaten Padang Pariaman dan satu buah RB/BKIA PKU Muhammadiyah di Kabupaten Agam berikut sebuah ambulans. Mudah-mudahan keluarga yang ditimpa musibah senantiasa bersabar, tabah dan tawakal dan untuk para donatur kita doakan semoga apa yang telah diwakafkan/dermakan bernilai ibadah dan amal shaleh di sisi Allah SWT.

---

<sup>90</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 222.

## BAB IV

# PERKEMBANGAN MAJLIS/LEMBAGA DAN ORTOM

### 4.1. Majelis/Lembaga

Majlis dan Lembaga dalam persyarikatan Muhammadiyah diposisikan sebagai badan pembantu pimpinan di setiap eselon organisasi mulai dari tingkat nasional hingga cabang. Perbedaannya adalah pada penekanan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi. *Majlis* adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Sedangkan *Lembaga* adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. (ART pasal 20/ART pasal 19).

Majlis yang pertama-tama dibentuk di Muhammadiyah adalah Majelis PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang yang terkenal dengan teologi Surat Al Ma'un-nya, kemudian

disusul Majelis Tarjih. Masing-masing dibentuk tahun 1914 dan 1917. setelah itu diikuti dengan Majelis Taman Pustaka dan Hizbul Wathan. Untuk Minangkabau berdasarkan data dan catatan bapak Hasan Ahmad (Ayah) majlis-majlis (waktu itu disebut bahagian) yang muncul pada periode awal tercatat antara lain; Bahagian Pengajaran dan Pendidikan dengan susunan Pengurus; Ketua : H. St. Mudo, Juru Uang: Rasyid Idris, Pembantu-Pembantu: S. St. Mahmud, Saleh Yafas dan Marah Sutan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1927 didirikan Bahagian Aisyiyah, dengan susunan pengurus; Ketua/Wk. Ketua: Siti Ramlah dan Siti Aminah, Sekretaris : Siti Rasyidah Thaib dan Pembantu-Pembantu : Maimunah, Rohani dan Tinur. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1927 dibentuk pula Bahagian Hizbul Wathan dengan susunan Pengurus: Ketua/Wk. Ketua : Rasyid Idris dan Prawoto Adiwidjojo, Sekretaris I dan II : Ibrahim dan Zainoel Abiddin Syu'aib, Juru Uang : Samsuddin dan beberapa orang pembantu : Ibnu Abas, Pakieh Tumungguang, Rajo Sutan dan M. Arief. Baru disusul dengan Majelis Hikmah dipimpin Duski Samad, Majelis Tabligh; A. Malik Sidik, Majelis Aisyiyah; Diniyah Sidik, Majelis Tarjih; Iskandar Zulkarnain, Majelis PKO; HAK. Dt. Gunung Hijau/H. Sd.M Ilyas.<sup>91</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan majlis dan lembaga ini selanjutnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas operasional amal usaha dan sumber daya manusia sebagai tenaga yang menggerakannya. Tercatatlah beberapa majlis yang betul-betul tampak kiprahnya secara berkelanjutan sementara masih ada yang jalan di tempat atau kurang berkembang. Secara keseluruhan majlis dan lembaga tersebut hingga saat ini adalah; *Pertama*, Majelis Pengajaran (kini disebut

---

<sup>91</sup>Rusli Karim, *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 125.

Dikdasmen) pada dasarnya majlis inilah yang membidanilahirnya Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang sebagai embrionya Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia. Kemudian membangun sekolah dan madrasah serta pesantren sampai ratusan buah yang tersebar di pelosok nagari di Minangkabau. Pembukaan sekolah Muhammadiyah bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan sekaligus sebagai reaksi terhadap sistem persekolahan Belanda yang sangat membatasi penerimaan murid. Untuk masuk sekolah Pemerintah Hindia Belanda bagi rakyat biasa sukar sekali, akibatnya banyak anak nagari yang tidak bersekolah.<sup>92</sup> Kondisi itulah yang ditembus Muhammadiyah dengan mendirikan beberapa jenis sekolah. Sampai tahun 1942 di Minangkabau Muhammadiyah telah berhasil mendirikan sekolah Agama terutama tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah hampir di setiap nagari sebanyak 300 buah, dengan murid 35.000 dan 1.500 orang guru. Adapun kurikulum telah dimasukkan mata pelajaran umum. Khusus Tsanawiyah sebelum pendudukan Jepang telah berdiri; 16 buah di Tanah Datar, 10 buah di Pariaman, 10 buah di Pasaman, 9 buah di Solok, 8 buah di Agam, 5 buah di Limapuluh Koto, 6 buah di Pesisir Selatan dan 4 buah di Sawah Lunto Sijunjung. Sedangkan Kulliyatul Mubalighin di bawah kepemimpinan Ya'cub Rasyid hingga tahun 1942 itu telah dapat menghasilkan alumni sebanyak 111 orang. Sementara sekolah umum yang didirikan Muhammadiyah terdiri atas Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, Sekolah Schakeldan HIS Muhammadiyah. Perbedaan sekolah umum Muhammadiyah

---

<sup>92</sup>Haedar Nashir, ed., *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992), hal. 111.

dengan yang didirikan pemerintah Hindia Belanda adalah dengan diberikan 20 % pelajaran agama Islam, sedangkan pada sekolah Belanda mata pelajaran agama hanya merupakan sebuah mata pelajaran saja. Sampai tahun 1942 itu Muhammadiyah telah berhasil mendirikan 30 buah sekolah umum, termasuk Sekolah Guru (Normaal School Moehammadijah) yang kemudian karena larangan; sekolah swasta tidak boleh memakai nama yang sama dengan sekolah pemerintah maka diganti menjadi Sekjolah Guru Moehammadiyah (SGM). Dari sekolah ini menghasilkan 105 orang guru yang dipersiapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Murid yang diterima mayoritas dari anak petani, saudagar dan anak rakyat biasa yang beragama Islam. HIS Muhammadiyah diberi nama "HIS met de Qur'an" artinya guru-guru menggunakan Al Quran sebagai pegangan pokok. Sebelum Jepang masuk HIS Muhammadiyah telah berdiri di Padang Panjang, Simabur, Batusangkar, Maninjau, Pariaman, Padang, Bukittinggi dan Solok. Pertumbuhan sekolah Muhammadiyah yang begitu cepat itu sebenarnya didukung oleh sistem dan mekanisme organisasi Muhammadiyah yang memberi syarat untuk berdirinya sebuah Ranting atau Cabang harus ditandai dengan adanya sebuah amal usaha yang konkret antara lain yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial atau tabligh.<sup>93</sup>

Ketika sedang asyik dan bersemangat mengelola amal usaha yang mulai subur dan berbuah itu datanglah apa yang disebut pendudukan Jepang, maka untuk menyelamatkan organisasi dan amal usaha dipakai taktik "*lempar batu sembunyi tangan*" dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti mendirikan pabrik kertas di bawah pimpinan A. St.

---

<sup>93</sup>M. Natsir, *Fighud Dakwah*, (Jakarta : Madjalah Islam Kiblat, 1969), hal. 27.



Jamaris, kemudian mengadakan Kebun Perang Asia Timur Raya di Sungai Andok Silaing. Tiap minggu diadakan gotong royong dengan menggerakkan tidak kurang 2500 orang, warga, murid dan guru Muhammadiyah sambil bernyanyi.

Beberapa tenaga yang aktif sebagai penggerak bidang pendidikan dan pengajaran ini dari awal hingga kini antara lain; AR. Sutan Mansur, HAMKA, Ya'cub Rasyid, A. Malik Ahmad, H. Haroun L. Ma'any, RI Dt. Sinaro Panjang, Abdullah MS SH, Falizir Hafli, Idris Manaf, Hasan Ahmad, Bachtiar Hasan, Mahyuddin Sabirin BA, Drs. Azmi, Bachtiar Karang SH, Drs. Nursal Saeran MA, Drs. M. Isa Meha, Drs. Ali Amran Alam, Drs. Agustar Surin, Drs. Mazni St. Tumanggung, Drs. Dasman Lalin, Drs. Ristapawa, Drs. Ilfi Zukdi, Drs. Salman M. Noer, Drs. Muslim Tawakal. Sekarang Abdurahman S. Chan S.Ag., Murizal M.Pd, Drs. Zainal Akil dan Afdi, di bawah koordinasi Drs. Muslim Tawakal SH., M.Pd.

Tantangan yang dihadapi majlis ini di samping melakukan pembinaan manajemen sekolah yang telah disebutkan di atas, juga menghadapi proses akreditasi sekolah dan sertifikasi guru-guru. *Kedua*, Majlis PKO (pernah diganti menjadi Majlis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU), kemudian berubah menjadi Majlis Kesejahteraan Sosial, sekarang Majlis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat) Majlis yang membidangi pemberdayaan fakir miskin dan orang terlantar serta pembinaan sarana / prasarana kesehatan dan sosial ini seperti disebutkan di atas untuk pertama kalinya dipimpin oleh HAK Dt. Gunung Hijau, kemudian H. Sd.M. Ilyas. Pada awal gerakannya mendirikan poliklinik PKO Muhammadiyah di Bukit Surungan Padang Panjang pada tahun 1930-an. Tenaga-tenaga lain yang *membbackup* tugas-tugas ke PKO-an selanjutnya antara lain; Baidarus Muhammad, Djailani Jacob, Thaher Idris, A Kadir Usman

(Not), H. Anwar Buat, dr. Alioes Aliloeddin, dr. Darfius Basyir, dr. Azis Syuib, Anhar Burhanuddin, MA, RB Khatib Pahlawan Kayo, Dr. dr. Rusydi Azis, dr. Masri Abdullah, dr. Bustiar Nawawi, Mainar Hamid, Dra. Jurnalis Darwis, Dra. Hilda Marni Intan, Syamsukar, Syahrui Tanjung, Drs. Syufyan Rosdhin, Drs. Ruslan Rasyid, Mardjis Mahmoed, dan Syahdiar BA.<sup>94</sup>

Sekarang Drs. Syainal Abiddin Ahmad, dibantu M. Isa Meha, Drs. Masri Hanus dan Drs. Tarmizi Karim, di bawah koordinasi Drs. Dasrid Ilyas. Kini Majelis ini mengkoordinir 54 Panti asuhan, 4 lembaga kesehatan, 5 buah Rumah Singgah anak Jalanan dan satu Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan anggota 300 orang dari keluarga-keluarga miskin. *Ketiga, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan* (kini Majelis Fakaf dan Zis). Majelis ini pernah digerakkan oleh : Amir Thaib SH, HM Idris Manaf, Drs. Abdul Hakim, Zainuddin Zein, A. Dt. Gunung Ameh SH, dan A. Kadir Usman SH, sekarang Drs. Adli Etek, Sudirman Nawawi BAE dan Firman Daus SH.

Ketika dipimpin A. Dt. Gunung Ameh SH dan Drs. Yusrizal Jamal, Provinsi Sumatera Barat pernah juara I dalam her-registrasi tanah-tanah wakaf Muhammadiyah se-Indonesia, dan pada saat ini Majelis Wakaf PWM Sumbar adalah satu-satunya Majelis yang memakai Sistem Informasi dan Registrasi Aset Terpadu dengan sistem komputerisasi (disingkat Sirat).

Saat ini sedang giat-giatnya memberikan bimbingan pensertifikasi tanah-tanah wakaf sebagai realisasi dari M.oU (2007) antara PWM dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat. Sampai tahun 2010 ini tanah sebagai aset/harta tidak bergerak yang dikuasai Muhammadiyah Sumatera Barat berjumlah : 595 persil

---

<sup>94</sup>M. Natsir, *Ibid.*, hal.hal. 28.

dengan luas 2.195.153 m<sup>2</sup>. *Keempat*: Majelis Tabligh (sebelumnya bernama Majelis Dakwah, kini Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus). Majelis yang khusus membina korp mubaligh dan kelompok-kelompok pengajian serta mengatur strategi dakwah ini periode awal dipimpin A. Malik Sidik, kemudian pada periode kedua dan seterusnya dirai'ikan oleh Samik Ibrahim, Agus Hakim, Amirsyah, Mansyur Malik, R.B. Katib Pahlawan Kayo, Yuniddin Away, Hasan Byk Dt. Maradjo, Arwan Kasry, Zaitul Ikhlas Saat, Syamsir Rost. Dibantu tenaga-tenaga aktif antara lain : Djaswir Loewis, Alamsuddin Dt./ Pamuncak, Drs. Busri Harun SH, Nurmasni SH, Kini dipimpin Drs. Nurman Agus bersama Abdul Salam M.Hum dan Solsofat Amd, di bawah koordinasi Drs. Syamsir Ranot. Kegiatan yang agak menonjol antara lain pelatihan-pelatihan da'i terutama untuk da'i-da'i daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai yang telah digarap sejak tahun 1952 di Muara Siberut, Siberut Selatan dan Sipora; Saat ini juga menerbitkan Bulletin Jum'at kerja sama dengan Pengurus Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang.<sup>95</sup>

Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP juga pernah menugaskan sebagai tuan rumah pelaksanaan pelatihan dan mengirim da'i untuk rehabilitasi mental pasca tsunami Aceh. Terakhir pasca gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kegiatan ini bekerja sama dengan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. *Kelima*; Majelis Tarjih (sebelumnya Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam, Kini Majelis Tarjih dan Tajdid).

---

<sup>95</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) Dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : suara Muhammadiyah, 2010),hal. 230.

Majlis yang berkonsentrasi pada hukum Islam dan fatwa ini mengkoordinir para ulama tarjih untuk melakukan pembahasan-pembahasan masalah aktual dalam masyarakat baik melalui *muzakarah* maupun sidang lajnah tarjih. Setiap tahunnya memproduksi Imsakiah dan menyusun jadwal waktu shalat serta awal bulan qamariah dan pembetulan arah kiblat.

Di samping kegiatan rutin tersebut melalui sidang lajnah tarjih juga memutuskan fatwa-fatwa penting terhadap masalah dan kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat terutama yang bersifat aktual dan kontemporer untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat umum terutama warga Muhammadiyah. Dalam pelaksanaan sidang-sidangnya majlis ini didukung para ulama dan pakar hukum Islam antara lain; Prof. dr. Sanusi Latif, Prof. Dr. Amir Syamsuddin dan Prof. Dr. Nasrun Harun Lc. Majlis ini pernah dipimpin Buya Iskandar Zulkarnain, Haroun L. Ma'any, H. Darwas Idris, Drs. Tazar Qur'an, Drs. Rustam Ibrahim, Radhin Rahman, Drs. Nursal Saeran MA, Drs. Guspari Gaus, Drs. Yuniddin Away, Dr. Bustanuddin Agus dan kini Prof. Dr. Edi Safri dibantu Bakhtiar M. Ag, Dr. Muchlis Bahar, Dr. Zulkarnaini, Dr. Zulmuqim dan lain-lain.<sup>96</sup>

Pada tahun 2003 di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas Tarjih ke-26 di Padang. Munas ini di samping dihadiri seluruh utusan dari 33 Wilayah/Provinsi se Indonesia juga ulama-ulama tarjih dari Persatuan Muhammadiyah Singapura dan Malaysia. Diantara keputusan yang mendasar dalam Munas ini adalah tentang Nilai-Nilai Dasar Kehidupan Politik Menurut Ajaran Islam, meliputi : (1)

---

<sup>96</sup>Haedar Nashir, *Idiologi Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2001), hal. 31.

Keadilan (al-'adalah), (2) Persaudaraan (al-ukhuwwah), (3) Persamaan (al-musawwah), (4) Musyawarah (asy-syura), (5) Pluralitas (at-ta'addudiyah), (6) Perdamaian (as-silm), (7) Pertanggungjawaban (al-mas'ulliyah), dan (8) Otokritik (an-naqd adz-dzality).

Untuk sosialisasi kegiatan dan pembahasan masalah-masalah aktual juga diadakan muzakarah dwi bulanan bekerja sama dengan Pengurus Mesjid Taqwa dan pernah juga menerbitkan Jurnal yang diberi nama "*Tazkiyah*" sebagai realisasi kesepakatan *Regional Meeting* (PMW Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumbar) 2001 di Lubuk Basung. Kini dipimpin Prof. Dr. Edi Safri, di bawah koordinsi Prof. Dr. Bustanuddin Agus.

*Keenam*; Majelis Pembinaan AMM (pernah Biro Organisasi/Kader, kini Majelis Pembinaan Kader). Lembaga ini pada peringkat awal dipimpin oleh Amir Thaib SH, Drs. Mustafa G. Dibantu H. Idris Nurdin, RB. Khatib Pahlawan Kayo, kemudian sangat gencar waktu dipimpin Ramli AD, BA bersama Yasmir Bulkaini, dibantu oleh Farhan, Bustaman Sabirin, Bazar Abas, Yunahar Ilyas, Hasnim F. Hasan, Irdinansyah Tarmizi dan Apris Yaman dan lain-lain dalam melakukan berbagai jenis perkaderan seperti Darul Arqam, Baitul Arqam dan sebagainya. Kini dijabat oleh H. Prtiyadi Syukur, SH, Aprianto M. Ag. Abdul Hukmi, S.Ag dan Toni Markos M. Ag, di bawah koordinasi Drs. Mirwan Palungan, M.Pd.

*Ketujuh*; Lembaga *Hikmah* (pernah menjadi Majelis, kini bernama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik). Lembaga yang bertugas bidang kajian politik ini sangat berperan waktu Muhammadiyah dihadapkan pada situasi krusial dalam perpolitikan seperti ketika menghadapi G. 30 S/PKI. Penyaluran aspirasi hak politik warga persyarikatan di awal

Orba, Perumusan *Khittah* Ujung Pandang dan menyikapi azas Tunggal serta *ijtihad* politik di awal reformasi/multi partai.

Di samping itu menyiapkan dan membina kader-kader yang akan direkrut oleh berbagai parpol baik sebagai pimpinan maupun calon untuk lembaga legislatif dan eksekutif seperti yang dilakukan dalam menghadapi Pemilu legislatif 2009 dengan mengumpulkan lebih dari 100 orang kader yang akan bertarung melalui berbagai parpol yang memperebutkan kursi di DPRD Provinsi.

Begitu pula memperkenalkan 9 orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Masing-masingnya; H. Irman Gusman M.BA, Drs. Marhadi Effendi, M.Si, Ir. Abdurrazak Samik Ibrahim, Dra. Hj. Ema Yohana, Drs. Hohd. Najmi, Drs. Afrizal, Yong Hendri, H. Patrialis Akbar SH dan Edi Utama, Majelis/lembaga ini pernah dipimpin Buya Duski Samad, Amir Thaib SH, Abdullah MS, SH, HAK. Dt. Gunung Hijau, Sofyan Muchtar SH, Abdul Kadir Usman SH, kini Drs. Rusdi Lubis MM dan Hasril Chaniago.

Di zaman Orba Majelis/Lembaga ini berhasil mengantar kader-kader Muhammadiyah untuk duduk di DPR, DPRD Provinsi seperti : Drs. Mustafa G. Abdullah MS, SH dan Rohana ZA, HAK. Dt. Gunung Hijau, Dra. Rusfa, ZA. Khatib Sampono, Prof. Dr. Sofyan Muchtar SH, Drs. Raisuddin Muchtar, Yahya, Anas SH, Safinah Oedin BA, H.A. Kadir Usman SH, Drs. Mardinsyah, Nuryufa, Drs. Darmadi, Bazar Abas, Drs. Syukriadi syukur, Zubaidar Ahmad dan Rahmi Zas.<sup>97</sup>

*Kedelapan: Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan; Lembaga ini secara khusus bekerja setiap akhir*

---

<sup>97</sup>Haedar Nashir, *Ibid.*, hal. 33.

periode kepemimpinan untuk melakukan verifikasi keuangan sebelum Musyawarah pergantian pimpinan, di samping melakukan pembinaan administrasi dan manajemen keuangan. Selanjutnya mengadakan pengawasan dan pemeriksaan jika ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan persyarikatan.

*Kesembilan;* Lembaga Pustaka dan Informasi, pada masa lalu pernah agak giat ketika dipimpin Drs. Mustamir Makmur dan Drs. Adi Bermasa dengan menerbitkan Majalah "Gema" dan Suara AR. Sutan Mansoer". Tetapi penerbitan ini rata-rata bisa bertahan sampai 5 kali terbit, setelah itu berhenti dan tidak berkelanjutan.

*Kesepuluh;* Dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, di Sumatera Barat pernah dibentuk *Majlis Ilmiah dan Perguruan Tinggi (MIPTI)* kemudian berubah *Majlis Dikti*. Sekarang Majlis Dikti dan Litbang dibatasi untuk di Pimpinan Pusat saja. Untuk wilayah diwadahi dengan Badan Pelaksana Harian (BPH).

*Kesebelas;* Majlis Ekonomi, pernah Majlis Pembina Ekonomi. Kini Majlis Ekonomi dan Kewirausahaan. Dalam bidang ini seperti yang pernah diucapkan Ketua PP Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005 Prof. A. Syafi'i Ma'arif pada Pembukaan Muktamar ke-45 di Malang, bahwa dalam bidang yang satu ini Muhammadiyah diakui belum berhasil. Di Sumatera Barat sebenarnya *gawe* majlis ini diharapkan antara lain untuk menggerakkan koperasi, BMT dan BPR. Namun setiap berganti pimpinan banyak ditampilkan pakar ekonomi terkemuka, baik praktisi dan ahli dalam retorika/seminar, kaya konsep dan teori, tetapi dalam merealisasikan seperti "*rumah tampak jalan tak tahu*".

*Keduabelas;* Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah majlis termuda yang baru ada dalam periode 2005-2010, meskipun secara praktik sebenarnya apa yang dilakukan Muhammadiyah sudah lama mencakup bidang pemberdayaan ini dan faktor inilah yang menempatkan Muhammadiyah berada pada posisi yang menguntungkan secara moral. Sebab melalui pemberdayaan inilah amal usaha Muhammadiyah berkembang di mana-mana seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya.

*Ketigabelas;* Lembaga Seni dan Budaya, geraknya masih terbatas, misalnya dalam menggerakkan seni dan budaya lokal di sekolah-sekolah Muhammadiyah di bawah koordinasi pimpinan Edi Utama.

*Keempat belas;* Lembaga Hukum dan HAM yang dipimpin Yuliwan Rajo Ameh SH dan Boyziardi SH. Memang belum banyak kegiatan yang dapat dilakukannya karena yang diharapkan sebenarnya adalah advokasi terhadap kasus-kasus hukum dan keadilan yang dialami warga dan amal usaha.. Satu lembaga lagi yang baru terbentuk 2005-2010 ini, nyaris belum sempat aktif, kecuali menghadiri satu kali pertemuan di tingkat nasional yakni; Lembaga Lingkungan Hidup yang diamanahkan kepada Ir. Khalawi M.Si MM, Prof. Dr. Agus Irianto dan Lukmanul Hakim.<sup>98</sup>

## **4.2. Organisasi Otonom**

### **4.2.1. Aisyiyah**

Ortom tertua yang khusus membidangi anggota perempuan Muhammadiyah ini, pada peringkat awal merupakan bagian saja yang disebut Muhammadiyah Istri.

---

<sup>98</sup>Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 237.



Kemudian berkembang menjadi majlis dan terakhir ditetapkan sebagai "*Organisasi Otonom Khusus*" sebagaimana ditegaskan dalam AD/ARTM terbaru (2005) pasal 19, 20, lebih lanjut dalam SK PP Muhammadiyah No. 92/KEP/1.0/B/2007 tentang : Qaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah, menyatakan bahwa : (1) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori, yaitu umum dan khusus. ...b. Organisasi Otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. ....b. Organisasi Otonom Khusus yaitu Aisyiyah.

Aisyiyah Minangkabau untuk pertama kali didirikan di Sungai Batang Maninjau tahun 1926. Pada waktu itu masih merupakan bagian dari Muhammadiyah dengan anggota pertamanya istri dan saudara-saudara perempuan anggota Muhammadiyah. Sekitar tahun 1927 dengan kembalinya istri Buya AR. Sutan Mansur (Umi Fatimah) dari Pekalongan dan dia aktif sebagai pengurus, maka Aisyiyah mulai berdiri sendiri. Aisyiyah banyak mendukung perluasan gerakan Muhammadiyah di Minangkabau, karena separuh dari anggota Muhammadiyah periode awal adalah anggota Aisyiyah. Pada waktu Konggres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi tahun 1930 tercatat 158 utusan Aisyiyah yang hadir yang dipimpin langsung oleh Nyai Dahlan. Sudah banyak yang dilakukan oleh organisasi perempuan ini baik di tingkat lokal maupun nasional seperti ikut sebagai inisiator berlangsungnya Konggres Perempuan Pertama tahun 1928 di Yogyakarta, atas reputasi itulah pimpinan dan pegiat organisasi ini banyak yang diakui eksistensinya di berbagai bidang dan profesi.

Pendiri Aisyiyah sendiri Nyai Dahlan (Siti Walidah) telah diakui oleh negara dan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional dengan SK Presiden No. 042/TK/Tahun 1971, tanggal 29 September 1971. Sedangkan di daerah-daerah cukup banyak nama-nama tokoh pergerakan dan organisasi massa dan politik yang juga kader dan aktifis Muhammadiyah/ Aisyiyah. Amal usaha yang ditangani langsung oleh Aisyiyah adalah bidang pendidikan, sosial dan kesehatan seperti : Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal, Klinik Bersalin dan panti Asuhan.<sup>99</sup>

Kini telah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Adapun amal usaha yang langsung berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat saat ini adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah dan AKPER, PGTK/PGSD, TK Pembina, Life Skill dan Koperasi BUEKA. Di samping mengkoordinir 238 TK ABA dan 100 buah PAUD yang berada pada 18 Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan pengabdian diperlukan banyak pengalaman dengan memperluas wawasan. Untuk ini Pimpinan Wilayah Aisyiyah khusus Majelis Ekonomi telah melakukan dua kali kunjungan muhibah ke negara tetangga, Singapura, Thailand dan Malaysia.

#### **4.2.2. Hizbul Wathan**

Hizbul Wathan berdiri tanggal 15 Rabiul Awal 1337 H/ 18 Desember 1918 di Yogyakarta. Kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Orde Lama pada tanggal 8 Juni 1961. Setelah era Reformasi Kepanduan Hizbul Wathan kembali di rehabilitir dan disahkan pada Sidang Tanwir

---

<sup>99</sup>Haidar Nashir, *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992), hal. 39.

Muhammadiyah tahun 1999 di Bandung dengan status sebagai Organisasi Otonom. Untuk Sumatera Tengah dan Barat tercatat sebagai Pimpinan pertama adalah Rasyid Idris, Parwoto Adi Wijoyo sebagai Ketua/Wakil Ketua, Ibrahim dan Zainul Abiddin Syu'ib selaku Sekretaris I/II, Samsuddin, sebagai Juru Uang.

Dalam kependuan Hizbul Wathan ini juga dikenal jabatan mantri, sejak berdirinya sebagai Menteri Daerah / dan tenaga-tenaga aktifnya antara lain HAK. Dt. Gunung Hijau, ZAS, Hasan Ahmad, MS. Dt. Tan Kebesaran, Samsuddin Ahmad, Kamaruddin Dt. Machudum, Syamsuddin Syafi'I, Syukur Sa'ud, M. Karim Said, Binuasin Nurut, Daimis Said, Mahyudin Sabirin.

Kehadiran Pandu Hizbul Wathan ini menambah semaraknya Muhammadiyah, dengan pendekatannya yang spesifik ternyata sangat menarik bagi para remaja dan pemuda kala itu. Banyak ketrampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah melahirkan citra khusus di samping kemandirian, ketangkasan dan keuletan juga ke Islaman yang direfleksikan dalam ibadah, akhlak dan kepribadian. Beberapa kali Jambore diadakan di Sumatera Barat/Minangkabau, antara lain : Jambore Pertama Hizbul Wathan se-Indonesia (1932) dilaksanakan di Mesjid Raya Ganting Padang, karena pada waktu itu mesjid ini juga dijadikan markas utama Hizbul Wathan.

Jambore Kedua di Kayu Tanam tahun 1938, yang ketiga di Solok tahun 1945 diikuti 1200 orang. Keempat di Payakumbuh tahun 1954 diikuti oleh 1350 orang dan yang kelima di Pekan baru tahun 1957 diikuti oleh 1100 orang. Jambore pertama hingga keempat khusus untuk Minangkabau. Menurut Fachrul Rasyid HF (wartawan), ketika Jepang masuk Indonesia tahun 1942, tokoh

pergerakan Ir. Soekarno yang ditahan di Bengkulu mau dilarikan Belanda ke kota Cane, Aceh. Tetapi baru sampai di Painan, tentara Jepang sudah sampai di Bukittinggi.

Karena takut ditangkap tentara Jepang, Belanda lari ke Barus Tapanuli Selatan. Soekarno yang ditinggalkan di Painan, dijemput oleh Hizbul Wathan dengan menggunakan pedati dari Mesjid Ganting. Empat hari menginap di rumah pengurus di samping mesjid ini, kemudian Soekarno diantar barisan Hizbul Wathan menemui Panglima Jihad Sumatera Tengah, Syekh Abbas Abdullah di Padang Japang, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk membicarakan dasar-dasar negara.<sup>100</sup> Sayang jarak antara dibubarkan dan direhabilitir kembali masanya terlalu panjang (1961 - 1999), sehingga aromanya hampir tak tercium lagi. Bayangkan di Sumatera Barat setelah direhabilitir itu baru dapat dibentuk pada periode 2005-2010 dan untuk menggerakkannya diberikan amanah kepada saudara Drs. Apris Yaman yang pada waktu itu sedang memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Mungkin karena kesibukannya yang luar biasa, sehingga belum banyak dapat berbuat, kecuali baru pada tahap konsolidasi awal melalui pertandingan olah raga bulu tangkis dan menghadiri pertemuan tingkat nasional.

Mantan-mantan anggota Hizbul Wathan masa doeloe yang masih tersisa dan tersebar di berbagai daerah, sebenarnya sangat merindukan adanya kegiatan reuni akbar karena mereka sudah sangat rindu bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan, mungkin sudah banyak yang sepuh, guna membangkitkan kembali semangat Hizbul Wathan masa lampau itu di samping bernostalgia.

---

<sup>100</sup>SKH Singgalang 26 Juni 1999.

### 4.2.3. Nasyiatul Aisyiyah.

Secara nasional Nasyiatul aisyiyah berdiri di Indonesia pada tanggal 16 Mei 1931 M/28 Dzulhijah 1349 H. Sedangkan untuk Sumatera Barat organisasi kader perempuan ini secara organisatoris baru dapat ditubuhkan sekitar tahun 1946. sebelumnya masih merupakan seksi dari Aisyiyah. Sejak berdirinya berturut-turut dipimpin oleh : (1946-1947) Liani Hatta, (1947-1950) Asyura, (1950-1953) Rasimah Ilyas, (1953-1958) Zubaidar Ahmad, (1958-1961) (fakum, karena pergolakan PRRI) (1961-1963) Yusna Rusli BA, (1963-1965) Yardat Arif, (1965-1972) Syafinah Oedin BA, 1972-1978 Dra. Dahliarti Rusli, 1978-1985 Dra. Meiliarni Rusli, 1985-1988 Yasniar Nurdin, 1988-1991 Dra. Syur'aini Syukur M.Pd., 1991-1995 Dra. Burnalis, 1995-12005 Agusrida M.Pd., dan 2005-2010 Hidayati Fitri M.Hum.<sup>101</sup>

Pada periode 1971 hingga 1978, kegiatan perkaderan sangat intensif dalam bentuk *Training Centre*. Sedangkan pada periode sebelumnya (1964-1971) aktifitas Nasyiyah di samping perkaderan yang menonjol adalah penampilan sebuah group Drumband yang beranggotakan 40 orang di bawah pimpinan Dra. Gusnely SA. Group ini di samping untuk menyemarakkan kegiatan persyarikatan di Wilayah sendiri juga pernah diundang ke beberapa daerah seperti ke Pekanbaru Riau dan kegiatan-kegiatan ormas Islam lainnya di Sumatera Barat. Suatu kesyukuran yang dirasakan oleh Aisyiyah adalah berjalannya estafet kepemimpinan yang berkelanjutan dari kader-kader Nasyiyah ini, sebab cukup ramai tokoh-tokoh Nasyiyah yang dipercaya memegang pimpinan di Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumatera Barat.,

---

<sup>101</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 243-244.

seperti : Zubaidar Ahmad, Dra. Rusfa, Abrilyus M, Dra. Dahlarti Rusli, dan Dra. Meiliarni Rusli.<sup>102</sup>

### 4.2.3. Pemuda Muhammadiyah

Secara nasional Pemuda Muhammadiyah mulai berdiri pada tanggal 25 Dzulhijah 1350 H/ 2 Mei 1932 M. Untuk Minangkabau/Sumatera Barat baru mulai aktif sekitar tahun 1946. Peran Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi kader sangat menonjol di awal-awal kemerdekaan, karena bersamaan dengan geraknya juga ada Pandu HW (Hizbul Wathan) yang sangat terkesan metode rekrutmennya. Sehingga sulit memisahkan antara aktifitas Hizbul Wathan dengan Pemuda Muhammadiyah waktu itu.

Berturut-turut kepemimpinannya hingga sekarang dinahkodai oleh : 1946-1961 Hasan Ahmad, 1961-1968 Amir Thaib SH, 1968-1972 Drs. Abdul Hakim, 1972-1975 Drs. Rustam Pohan, 1975-1978 Nazar Arif, 1978-1981 Drs. Lumban Hutabarat, 1981-1983 Drs. Syukriadi Syukur, 1983-1989 Suherman Agus, 1989-1993 A. Mora Lubis, 1993-1998 Drs. Amsir, 1998-2002 Drs. Ki. Jal Atri Tanjung M.Pd., 2002-2006 Drs. Marhadi Efendi M.Si., 2006-2010 Taslim S.Si.<sup>103</sup>

Setelah meninggalkan gelanggang perjuangan di Pemuda yang penuh dengan dinamika dan romantikanya, akhirnya pengalaman yang sangat berharga itu menjadi modal dasar untuk berjuang di lapangan Muhammadiyah yang lebih luas dan menantang. Dua orang dari Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu H. Hasan Ahmad dan Prof. H. Nuranas Djamil.

---

<sup>102</sup>Haidar Nashir, ed., *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hal. 245.

<sup>103</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 245.

#### 4.2.4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Ortom Pelajar ini secara nasional dilahirkan pada tanggal 5 Shafat 1381 H/ 18 Juli 1961 M. Untuk Sumatera Barat mulai dirintis pada tahun 1963 dengan beberapa orang sponsor, antara lain : agustar Surin BA, Amran Maluddin, adnan Rahman dan Nasrul Rusli.

Sejak berdirinya dipimpin berturut-turut : 1963-1970 Drs. Agustar Surin, 1970-1972 RB Khatib Pahlawan Kayo BA, 1972-1974 Amiruddin Syam BA, 1974-1976 Lahmoeddin Noer, 1976-1978 Syahruji Tanjung BA, 1978-1985 Mansur Anwar, 1985-1988 Drs. Afdal Rinsik, 1988-1989 Drs. Marhadi Effendi, 1989-1991 Nusyirwan, 1996-1998 Suardin, 1998-2000 Josriko, 2000-2002 Jasra Putra, 2002-2004 Endang Tirtana, 2004-2006 Mardiwan, 2006-2007 Fortito, 2007-2008 Ilham, 2008-2010 Dafri Harweli.<sup>104</sup>

Meskipun tingkat pelajar, namun arti sebuah perkaderan sangat menentukan dalam berorganisasi untuk melahirkan seseorang menjadi pemimpin. Dua orang di antara yang pernah menahkodai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini sempat aktif dan mengendalikan dapur Muhammadiyah Sumatera Barat hingga bertahun-tahun, yakni RB Khatib Pahlawan Kayo dan Syahruji Tanjung. Kemudian yang disebut pertama baru meninggalkan dapur setelah diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kanwil Departemen Sosial Sumatera Barat. Sedangkan yang disebut kedua karena terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, (sama dengan Marhadi Effendi) dan kemudian berlanjut ke Senayan untuk DPR

---

<sup>104</sup> HAR Tilar, *Paradikma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka cipta, 2000), hal. 46.

Pusat. Sementara RB Khatib Pahlawan Kayo terpilih menjadi Ketua PWM Sumatera Barat 2005-2010.

#### **4.2.6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah.**

Secara nasional berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 H / 31 Juli 1963 M di Yogyakarta. Namun embrionya sudah ada sejak tahun 1925 yang disponsori pendekar M. Wahid, A. Dimiyati, keduanya merupakan murid dari pendekar utama KH Busjro yang telah mulai bergerak sejak tahun 1915 di Kauman Yogyakarta. Atas kesadaran mereka didirikan aliran seni bela diri "Ci- Kauman".

Kegiatan seni bela diri ini berkembang terus sehingga melahirkan banyak pendekar antara lain : M. Juraimi, M. Syamsuddin, Mohd. Zahid, Djamiat Dalhar, Moh. Barrie Irsyad dan lain-lain. Di Sumatera Barat baru mulai bergerak pada awal tahun 1970-an. Perkembangannya cukup baik dan menggembirakan, banyak komda yang sudah terbentuk dan sering mengikuti kegiatan di luar daerah bahkan ikut kompetisi sampai ke luar negeri dan sekarang telah menjadi bagian dari IPSI Sumatera Barat. Waktu awal berdirinya di Sumatera Barat dipimpin antara lain oleh : Drs. Agustar Surin, AA Ranasti dan Drs. Syafi'I Medan.

#### **4.2.7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**

Secara nasional berdiri tanggal 29 Syawal 1384 H / 14 Maret 1964 M di Yogyakarta yang disponsori oleh Drs. Djasman Al-Kindi, Drs. A. Rosyad Shaleh, Dr. Sudibyo Markus, Drs. Yahya Muhaimin.

Masuk ke Sumatera Barat pada tahun berdirinya dan mendapat dukungan yang sangat positif dari kalangan



mahasiswa yang berasal dari beberapa Perguruan Tinggi seperti : IKIP, UNAND, IAIN dan UMSB. Yang disponsori antara lain oleh : Mustafa, G. Agustar Surin, Azmi, Mardjusman, M. Hatta, Tamsin Medan, Gusfidar Nasution, Syahron Lubis, Yusmar Umar, Fatah Lingga, Rivai Ismail, Khailul Rahman, Gazali Ismal, Bustaman Anam, Radjilis Hamzah, rasul Hamidi Syafi'I, Zulfahmi Zul, H. Idris Nurdin, Mansur Malik Muslim M. Zen, Amirsyah, MYA Chatib Kayo, Azwar Surin dan Yanuar Thaib Dt. Dikoto.

Sejak awal berdiri hingga tahun 1980-an gerak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini sangat menonjol, hampir di setiap Fakultas dan Akademi berdiri komisariat dan bergairah melakukan bimbingan studi yang disebut tentiren. Di samping perkaderan Darul Arqam mulai dari tingkat dasar sampai paripurna. Namun sejak kelembagaan organisasi mahasiswa mulai *dirumahkan* dan tidak lagi seperti dulu ada *organisasi intra* dan ada *organisasi ekstra*, maka kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pun sebagaimana juga organisasi lainnya nampak mulai kehilangan gairah. Di samping itu program studi dengan pola SKS juga sangat berpengaruh terhadap pembagian waktu.

Sejak berdirinya di Sumatera Barat berturut-turut dipimpin oleh : 1964-1968 Drs. Mustafa G., 1968-1970 Drs. Mansoer Malik, 1970-1973 Drs. Muslim M. Zen, 1973-1976 Drs. Mansoer Malik, 1976-1979 Drs. Yasmin Bulkaini, 1979-1982 Drs. Rusdi Aziz, 1982-1984 Drs. Rasyidi Bahaudin, 1984-1988 Drs. Adrian Muis, 1988-1990 Drs. Ilfi Zukdi, 1990-1993 Drs. Nofri Hadi, 1993-1995 Drs. Manajer Nasution, 1995-1997 Drs. Jon Afrizalwan, 1997-1999 Drs. Adib alfikri, 1999-2001 Aprianto S.Ag., 2001-2003 Bachtiar S.Ag., 2003-2006 Toni Markos S. Ag., 2006-2008 Ir. Pedri Kasman, 2008-2010 Deri Rizal. Drs. Mustafa G. di samping

dosen senior di IKIP Padang juga sempat menjadi anggota DPR RI mewakili Parmusi. Sedangkan Prof. Dr. Mansoer Malik di samping diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat juga menjadi Rektor IAUN Imam Bonjol Padang. Begitu pula Prof. Dr. Azmi MA yang termasuk salah seorang perintis berdirinya IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), pernah menjadi Rektor UMSB dan Pembantu Rektor I IKIP / UNP Padang.<sup>105</sup>

#### 4.3. Perkembangan Daerah, Cabang dan Ranting.

Patut disyukuri bahwa secara struktural persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di dunia, karena pertumbuhannya sangat pesat. Kini tidak saja di Indonesia, bahkan sudah berkembang sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Pulau Pinang Malaysia (1952), Singapura (1957), dan Thailand (1978) yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dan administratif kecuali historis dan idiologis. Sedangkan untuk pengembangan jaringan Muhammadiyah di negara-negara lain, sejak periode 2000-2005 mulai dikembangkan dengan mendirikan cabang-cabang istimewa dengan nomenklatur PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) seperti yang telah terbentuk di Kairo Mesir, Belanda, Jerman, Amerika, Kuala Lumpur dan lain-lain. Pada umumnya PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) ini didukung oleh mahasiswa dan perantau yang berasal dari tanah air dan mereka tertarik dengan gerakan Muhammadiyah.

Pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, ternyata telah diikuti dengan perkembangan struktur baik

---

<sup>105</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 250.

vertikal maupun horizontal. Secara vertikal organisasi Muhammadiyah mempunyai lima tingkatan, mulai dari peringkat yang paling rendah *Ranting* Nagari/ Kelurahan, *Cabang* di tingkat Kecamatan, *Daerah* di tingkat Kabupaten/Kota, *Wilayah* di tingkat Provinsi dan *Pusat* di tingkat Nasional.

Sedangkan secara horizontal Muhammadiyah saat ini didukung sembilan majlis dan enam lembaga. Di samping itu kekuatan Muhammadiyah ditopang lagi oleh satu organisasi otonom khusus dan enam organisasi otonom umum.

Adapun pertumbuhan dan perkembangan daerah, cabang dan ranting di Minangkabau / Sumatera Barat yang mewadahi struktur vertikal dan horizontal tersebut sekilas dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Daerah Kabupaten Agam.**

Di daerah inilah benih Muhammadiyah Minangkabau untuk pertama kalinya disemaikan, tepatnya di Sungai Batang Maninjau. Muhammadiyah Daerah Agam saat ini mempunyai 13 Cabang, 107 Ranting, 29 TK. ABA, 36 MDA, 10 Taman Pendidikan Al Quran, 5 SD, 11 Tsanawiyah, 2 MAM, 3 SMU, 9 Panti Asuhan, 16 Mesjid, 25 Mushala dan 1 Rumah Bersalin/ BKIA yang baru saja diresmikan pasca gempa 30 September 2009.

Dulu pernah ada apotek di Lubuk Basung dan BKIA di Pasie Ampek Angkek, tetapi kemudian tidak muncul lagi dalam pendataan. Daerah ini pada awalnya menyatu dengan Bukittinggi, namun terakhir sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, ibukota Kabupaten Agam yang tadinya di Bukittinggi dipindahkan ke Lubuk Basung. Dengan

sendirinya kedudukan Pimpinan Daerah harus juga menyesuaikan. Sejalan dengan itu kota Bukittinggidimekarkan menjadi daerah tersendiri sejak tahun 1993 (SK. PP No. 52/SK-PP/I.A/1.b/1993, tanggal 25 Juli 1993.<sup>106</sup>

Sejak berdirinya hingga sekarang banyak kader dan tokoh Muhammadiyah telah dilahirkan, baik di tingkat daerah maupun cabang dan ranting. Di antara mereka selain generasi perintis antara lain : Buya Syamsuddin, Muchtar Is, Rasyid Sahid, Ramli Yacob, Firdaus Chairani, Sunaryaman Mustafa, Tazar Quran, Basyir Gani, Baidi Said, Nasir Nurdin, Amir U, Dt. Rky Endah, M. Imam Mulia, Hanif AR, Drs. Junaidi.

Untuk periode 2005-2010 ini dipimpin Drs. Amri Bakar. Di antara Cabang Perintis di kabupaten Agam ini setelah Sungai Batang adalah Cabang Muhammadiyah Matur yang berdiri pada tanggal 22 September 1936 yang disponsori oleh H. Idris dn Imam Maradjo. Dari daerah ini tercatat 4 orang tokoh yang menduduki Ketua Pimpinan tingkat Wilayah mulai dari Buya Tuo AR. St. Mansur, Hamka, HAK Dt. Gunung Hijau dan Zainul abiddinSyu'aib. Untuk tingkat pusat tercatat Buya AR. St. Mansur dan Prof. Rd. Yunahar Ilyas.

Adapun PDA periode 2005-2010 ini dipimpin oleh Dra. Zuimar. Karena daerah ini termasuk yang parah juga terkena gempa 30 September 2009, alhamdulillah cukup banyak bantuan yang mengalir dari berbagai pihak. Satu yang cukup menonjol dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan RSI Muhammadiyah Jakarta mendirikan sebuah RB/BKIA PKU di Lubuk Basung, dengan melengkapi peralatan medis dan menempatkan tenaga dokter, bidan dan

---

<sup>106</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 252.

perawat selama 6 bulan atas biaya pusat. Di samping itu PWM DIY juga memberikan bantuan sebuah ambulans untuk mendukung operasional RB/BKIA tersebut, alhamdulillah setiap harinya dikunjungi rata-rata 30 pasien yang diberikan pengobatan secara gratis. Gedung sementara untuk RB/BKIA ini, merupakan pinjaman/hak pakai dari keluarga bapak Anwar Ali akbar Dt. Rajo Hariman/mantan aktivis Majelis Wakaf PP Muhammadiyah.

## 2. Daerah Kabupaten Tanah Datar

Secara faktual setelah berdirinya Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang, diikuti oleh Cabang Simabur 27 Juli 1927, di Kabupaten Tanah Datar dan dari sini kemudian berkembang sampai ke Lintau, Lima Kaum dan seterusnya.

Menurut catatan Buya Dahlan Qary, ketika Konggres ke-19 di Bukittinggi sengaja datang dari Lintau Tujuh orang pemuka masyarakat yang ingin menyaksikan dari dekat apa sebenarnya Muhammadiyah? Ketujuh orang tersebut adalah : Malin Panghulu, H. Yazid Bustami, H. Yusuf, A. Darasah, Dt. Tangkali, Zainalyaqin dan M. Syahid akbar. Setelah kembali dari Konggres masing-masing menceritakan bagaimana benar sepak terjang Muhammadiyah membela Islam. Berdasarkan itu, mereka sepakat untuk mendirikan Muhammadiyah di Lintau. Seperti halnya ketika Muhammadiyah berdiri di Sungai Batang, di Lintau ini atas prakarsa pelajar-pelajar Sumatera Thawalib sejak pertengahan tahun 1931 juga telah berdiri sebuah organisasi yang diberi nama "*Ittihadul Lintawiyah*" yang dipimpin oleh H. Yazid Bustami. Mereka juga sudah menukar organisasi tersebut dengan organisasi yang berkaliiber nasional, ada yang mengusulkan dengan PERMI, namun

karena sudah meyakini betul kekuatan Muhammadiyah mereka semua sepakat untuk mengganti Ittihadul Lintawiyah dengan Muhammadiyah. Maka pada tanggal 17 Mei 1932 diresmikan berdirinya Muhammadiyah di Lintau dengan status grup dari Cabang Simabur yang telah berdiri sejak tahun 1927.

Meskipun banyak mendapat tantangan dari ninik mamak seperti dilarang mendirikan gedung kalau mau juga membangun di awang-awang atau di hutan, tidak diizinkan melaksanakan konferensi Cabang Simabur di Balai Tengah Lintau meskipun segala sesuatunya sudah siap. Utusan Majelis Konsul yang datang dari Padang Panjang (SY Sutan Mangkuto) diusir oleh pemuka adat (ninik mamak), bahkan diancam tidak dijamin keselamatannya dan harus meninggalkan Balai Tengah detik itu juga dan langsung diantar opas nagari sampai batas Tapiselo.

Muhammadiyah difitnah sebagai organisasi yang akan mendirikan negara Islam. Kendatipun demikian Muhammadiyah tetap saja maju dan berkembang. Pada tahun 1936 grup Muhammadiyah Lintau ini ditingkatkan menjadi Cabang yang berdiri sendiri, karena telah mampu mendirikan grup-grup baru seperti di Batubulat, Tanjung Bonai, Tapi Selo, Lubuk Jantan, dan lain-lain. Dalam sejarah perkembangan Muhammadiyah Cabang Lintau ada satu hal yang tidak dapat dilupakan, yaitu Cabang ini pernah dipimpin oleh seorang Camat, ialah sdr. Rusli Abdullah yang terpilih menjadi Ketua Cabang periode 1965-1967.<sup>107</sup>

Periode berikutnya dipimpin oleh tenaga-tenaga muda yang profgresif revolusioner, di antaranya Rasyid Syahlan dan Syaifuljanah Peto Serajo. Kini di cabang yang cukup maju ini ada amal usaha Panti Asuhan 2 buah, Rumah Sakit

---

<sup>107</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 254.

Ibu dan anak 1 buah dan sebuah sekolah kader yang pernah tempat belajar Ketua PP Muhammadiyah Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif yakni "Mualimin Muhammadiyah Tanjung Bonai" dengan gurunya antara lain Buya Djalal Ibrahim orang tua dari Prof. Dr. Fasli Djalal, Wakil Menteri Diknas Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Setelah Cabang Lintau ini diikutilah berdirinya Cabang Lima Kaum tahun 1937 dan Cabang Barulak.

Saat ini perkembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Datar ini berdasarkan data 2008 adalah : cabang sebanyak 9 buah dengan ranting 56 buah. Sementara amal usaha terdiri atas : Mesjid/mushala 10 buah, Panti Asuhan 7 buah, TKABA 10 buah, SD 1 buah, Tsanawiyah 4 buah, SMU 1 buah, SMK 1 buah, Aliyah/Pesantren 3 buah, dan memiliki tanah 64 persil.

Adapun kepemimpinan kolektif yang telah berjalan setelah periode perintis antara lain dikendalikan oleh Buya AM Burhani, H. Usman Suid BA, AA Dt. Gadang Marajo, Rusli Abdullah, H. Mahluddin Yahya, HM. Idris Manaf, Drs. Haitami, Drs. Fahmi Dini. Kepemimpinan ini dibantu tenaga-tenaga utama seperti Dt. Intan, Mohd. Thaib, Rasyidin Abdullah.

Kini untuk masa jabatan 2005-2010 dipimpin Drs. Yuliasman selaku Ketua dan Asmet Syamsu sebagai Sekretaris. Dari daerah ini tercatat 6 orang anggota / kader yang diberi amanah sebagai Ketua PWM Sumatera Tengah / Barat, masing-masing : S.Y. Sutan Mangkuto, H.A. Malik Ahmad, Drs. Djam'an Shaleh, H. Hasan Ahmad, H.M. Idris Manaf dan Drs. RB Khatib Pahlawan Kayo. Tercatat pula tiga orang bupati Tanah Datar ini juga berasal dari anggota/simpatian Muhammadiyah yaitu : Ibrahim St.

Pamuncak, Masriadi Martunus, dan Mohd. Shadik Pasadigu. Dari barisan Aisyiyah tercatat dua orang ibu berprestasi/teladan di tingkat nasional dan daerah yaitu Ibu Hj. Alise Dahlan dan Hj. Dahniar Abdullah.

Kegiatan yang menonjol saat ini adalah pembinaan Ranting dan Cabang melalui Pengajian Daerah bulanan yang dibergilirkan dari satu Cabang ke Cabang yang lain dengan pembicara tetap dari Pimpinan Wilayah. Pengajian ini rata-rata diikuti 500 orang warga dan simpatisan dan dalam momen-momen tertentu dihadiri oleh Bupati atau pejabat lainnya dari tingkat Kabupaten atau Kecamatan. Hasilnya telah terjadi penyegaran organisasi dan pimpinan di samping penambahan ranting-ranting baru.

### **3. Daerah Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman.**

Menurut Kasyim Munafi, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah Padang Pariaman dalam autobiografinya dijelaskan bahwa Muhammadiyah mulai masuk ke Padang Pariaman (Kuranji) pada tanggal 25 Oktober 1929. Diawali dengan perjalanan H.Sd. Mohd Ilyas ke Yogyakarta untuk mempelajari Muhammadiyah. Kemudian beliau yang disebut sebagai motor penggerak Muhammadiyah bersama sahabat-sahabatnya Oedin dan Syailendra. Gerak Muhammadiyah di Kuranji ini didukung oleh ulama-ulama muda lainnya seperti ustad Umar Ganti, Haroen L Ma'any, Abdul Jalil, St. Harun Parel, Abu Bakar Ma'ruf, Muhammad Ma'ruf, H. Dahlan. Semuanya merupakan murid dari Tuanku Adnan (Tuanku Hitam Ketek) yang berasal dari suku Koto Sunur, kemudian menetap di kampung Koto Kuranji. Pertumbuhan Muhammadiyah di Kuranji ini juga ditopang sarana ibadah yang disebut Surau Dagang yang dibangun tahun 1929. Mesjid yang disebut Surau Dagang oleh



masyarakat inilah yang dikembangkan dengan bangunan baru oleh Muhammadiyah dan kemudian sebagai cikal bakal Mesjid sejarah Muhammadiyah saat ini. Nama “sejarah” ini merupakan pesan lisan dari H.Sd. M. Ilyas kepada Kasim Munafi. Dipihak Aisyiyah dua orang putri daerah ini cukup diperhitungkan di level wilayah, yaitu : Umi Hj. Syamsinar (Pendiri RS Aisyiyah Padang / anggota DPRD Kota Padang) dan One Hj. Syarifah Dinar (Ketua PWA Sumatera Barat). Setelah berjalan puluhan tahun Muhammadiyah Padang Pariaman berkembang melalui berbagai amal usaha dan pengajian rutin baik di Ranting, Cabang dan Daerah, rata-rata diadakan tiap bulan secara bergiliran.

Terakhir sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, Muhammadiyah Kabupaten Padang Pariaman telah dimekarkan menjadi tiga daerah : masing-masing kota Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman sendiri yang membawahi 6 Cabang, 34 Ranting.<sup>108</sup>

Amal usaha terdiri atas : 4 buah Panti Asuhan, 2 buah Rumah Bersalin / BKIA, dan beberapa buah mesjid dan sekolah. Banyak kader pelanjut dan ulama yang membentengi Muhammadiyah di daerah ini seperti : Alhadar Alam, Hasan Yunus, Abd. Aziz Chan, Burhanuddin Anhar Burhanuddin dan lain-lain. Anhar Burhanuddin pernah terpilih sebagai anggota PP Muhammadiyah waktu Mukhtar ke-43 di Aceh. Namun beliau tidak berumur panjang karena baru satu bulan menjabat Bendahara PP Muhammadiyah periode 1995-2000, beliau mengalami sakit dan meninggal dunia di RSI Cempaka Putih Jakarta. Sebagai catatan, Buya H. Haroun L Ma’any Ketua PMW Sumatera

---

<sup>108</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 258.

Barat 1962-1964 merupakan dosen IAIN Imam Bonjol dikenal sebagai seorang ahli ilmu falaq. Ia berasal dari Kuranji Padang Pariaman.

Daerah ini termasuk yang parah terkena gempa 30 September 2009. Banyak amal usaha Muhammadiyah yang hancur termasuk rumah warga. Kita bersyukur di bawah kepemimpinan Ketua PDM Drs. H. Djauhar Muis, penanggulangan bencana ini cukup berhasil bekerja sama dengan PWM membentuk posko pengendali di kota Pariaman dan posko satelit di Kudu Ganting dan Kota Tinggi. Perhatian PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah juga cukup tinggi terutama pada fase tanggap darurat, di samping bantuan uang dan tenaga relawan yang dari banyak PWM, juga dari Muhammadiyah luar negeri (Malaysia, dan Singapura). Sebagai bukti fisik dalam bidang kesehatan telah berhasil diresmikan dua buah poliklinik / BKIA masing-masing di Ranting Kudu Ganting dan Koto Tinggi Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian juga sedang dijangkau lokasi untuk pembangunan sebuah rumah sakit umum permanen yang akan disponsori oleh PWM Jawa Tengah bersama PWM lain dan Perguruan Tinggi Unggulan serta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RSIM Jakarta.

Sejak kepemimpinan Buya Kasim Munafi, dalam bidang pembinaan organisasi dan administrasi Daerah ini sangat menonjol. Hampir tiap bulan laporan berjalan berbagai hal tertib dikirim ke Wilayah dan Pusat. Cabang-Cabang mendapat kunjungan dan secara bergilir diadakan pengajian Daerah yang ditempatkan di Cabang-Cabang. Pengajian yang sering diisi oleh Pimpinan Wilayah ini ditutup sebelum shalat zuhur berjama'ah dan diakhiri dengan makan bersama dari nasi rantang yang dibawa ibu-ibu Aisyiyah ranting-ranting tempatan.

#### **4. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Kota Payakumbuh.**

Dari catatan yang ada Muhammadiyah untuk pertama kali berdiri di daerah ini adalah di Kubang Suliki dan Kota Payakumbuh, yaitu pada tanggal 5 Desember 1932. Kemudian baru berkembang sampai ke Luhak dan Pangkalan. Sampai awal tahun 2010, daerah ini masih dalam proses pemekaran antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kota Payakumbuh. Di sini tercatat 12 Cabang dengan 105 Ranting. Mempunyai 4 Panti Asuhan dan sekian banyak sekolah mulai dari TKAB sampai tingkat SLTA. Atas perhatian yang luar biasa dari tokoh-tokoh daerah ini yang berada di Jakarta terutama bapak Drs. Lukman Harun dkk, telah dibangun sebuah kompleks Perguruan Muhammadiyah termegah yang diberi nama Pesantren Modern "Al Kautsar" di Tanjung Pati.

Sejak berdirinya telah banyak menghasilkan alumni yang cukup mapan dan mampu bersaing untuk memasuki berbagai Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Satu orang di antaranya (murid pertama) Dr. Ade Nofli, setelah menamatkan S-3 di Malaysia, saat ini berkiprah membantu Persatuan Muhammadiyah Singapura dipercaya memimpin dua perguruan sekaligus (Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah dan Kolej Islam Muhammadiyah) ternyata banyak putra daerah ini yang menjadi kader persyarikatan dan berkiprah di level Provinsi hingga Nasional dan Internasional.

#### **5. Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

Menurut data yang ditulis oleh Hj. Nurmal Ma'alip, BA (Pensiunan Guru SPG Negeri / aktifis Nasyiatul Aisyiyah 1960-an) Muhammadiyah masuk untuk pertama kalinya ke

daerah ini melalui Bukittinggi ke Talu yang dibawa oleh Abdul Aziz Maulana Kali yang diajak oleh mamak sepesukuannya H. Marah Husin mendengar pengajian Cabang Muhammadiyah Bukittinggi yang diberikan oleh S.Y. Sutan mangkuto. Saking tertariknya dengan pengajian tersebut setelah pengajian beliau minta bertemu langsung dengan sang guru untuk berdiskusi. Hasilnya beliau begitu pulang ke Talu dikumpulkan 11 orang pemuka masyarakat yang berfaham maju untuk mendirikan Muhammadiyah, yaitu : Abdul Aziz Maulana Kali, Syahbuddin, Ma'alip Dt. Sati, H. Abdul Menan, Abd Karim Tk Mudo, syamsuddin Imam, M. Isa, Abdul Hadi, Abdul Muntalib, Abdul Pakihdan Marahudin. (7 orang di antaranya adalah keluarga Abdul Aziz sendiri).

Setelah konsultasi beberapa kali di Bukittinggi maka pada bulan Januari 1928 diresmikanlah berdirinya Grup Muhammadiyah di Talu bertempat di rumah Ibu Radana Pasar Usang Talu oleh Pimpinan Cabang Bukittinggi. Selanjutnya sekretariat dipusatkan di rumah bapak Syamsuddin Imam Kampung Melayu. Meskipun banyak suka duka dalam menggerakkan Muhammadiyah di Pasaman ini, namun dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi dapat juga mendirikan berbagai amal usaha seperti Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Talu (1938), sebelumnya telah didirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Wushtha (1935). Pada tahun itu juga Muhammadiyah Cabang Bukittinggi mengadakan konferensi VIII di Talu yang dihadiri Buya HAMKA dan Umi Rukayah Rasyad. Panti Asuhan di Kampung Jambak didirikan pada tahun 1942. Hal ini dimungkinkan karena sejak tahun 1939 Grup Muhammadiyah Talu telah ditingkatkan menjadi Cabang dan pada tahun 1940 untuk pertama kalinya mengadakan konferensi Cabang di Ujung Gading. Pada tahun 1948 Muhammadiyah Cabang Talu dijadikan perwakilan daerah

Muhammadiyah Kabupaten pasaman dengan Ketuanya Buya Ahmad Fadhal. Perwakilan Daerah ini didukung tiga cabang federasi yaitu : Muhammadiyah Cabang Ujung Gading, Cabang Paraman Ampalu dan Cabang Sasak.<sup>109</sup>

Pada periode 1986-1991 yang dipimpin H. Amir Ali selaku Ketua dibantu Syahrui Tanjung BA sebagai Sekretaris, daerah ini mendapat prioritas utama, karena dikaitkan dengan perkembangan kristenisasi, sebagaimana halnya juga di Mentawai dan Sitiung. Untuk kelancaran gerak dakwah di daerah ini PWM membentuk Proyek Pengembangan Dakwah Khusus yang diketuai oleh Buya H. Radhin Rahman. Program mendesak dari proyek ini adalah membeli 2 hektar tanah di Alamanda Kinali senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk membangun kompleks Islamic Centre.

Dana pembangunan ini dimintakan kepada bapak Gubernur Sumatera barat, setelah diyakinkan program yang akan dilaksanakan , akhirnya atas nama pribadi beliau (Ir. Azwar Anas) memberikan infaq sebesar Rp. 3.500.000,- kekurangannya diusahakan oleh PWM Sumatera Barat. Setelah ketersediaan tanah itu dilaporkan, alhamdulillah PP Muhammadiyah menyetujui pembangunan *Islamic Centre*.

Mulai tahun 1987 secara bertahap dimulai pembangunan atas dukungan biaya dari PP Muhammadiyah yang terdiri atas : sebuah mesjid ukuran 14 X 14 meter, lokal belajar ukuran 6 X 7 meter sebanyak 6 lokal, sebuah poliklinik ukuran 7 X 16 meter, sebuah kedai / kios ukuran 6 X 7 meter, sebuah aula ukura 10 X 20 meter dan sebuah rumah imam / direktur 6 X 7 meter. Luas seluruh bangunan *Islamic Centre* tersebut 952 m<sup>2</sup> dengan total anggaran Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

---

<sup>109</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 264.

Untuk kelancaran dan lebih suksesnya pelaksanaan operasional proyek ini dibentuk Badan Penyantun Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Ketua H. Amir ali sebagai pengganti dari Pengelola Proyek Pengembangan dakwah sebelumnya dengan memperluas cakupannya untuk daerah transmigrasi Mentawai dan Sitiung.

Selain bangunan di Islamic Centre ini di sekitarnya juga dibangun beberapa buah mesjid seperti : Koto Gadang Jaya ukuran 14 X 14 meter dengan biaya Rp. 15.000.000,- di Desa Simpang Tigo Koto Baru ukuran 14 X 14 meter dengan biaya Rp. 17.000.000 di Desa Suko Mananti ukuran 12 X 12 meter dengan biaya Rp. 13.500.000,- di Dusun Durian Tibamau Desa VI Koto Utara Kinali ukuran 14 X 14 meter dengan biaya Rp. 18.000.000,- untuk melaksanakan dakwah lebih intensif di Kinali ini, LDK PP Muhammadiyah menempatkan tiga orang da'I masing-masing : Zulkan Abdul Karim, Ramli Hanafiah, dan Drs. Kusnan. Amat disayangkan hampir sama kasusnya dengan Tanjung Pati, kompleks ini akhir-akhir ini kurang terurus dengan baik, sehingga tanah yang telah dibeli dan ditanami sawit saat ini diambil alih oleh pihak lain. Sebenarnya untuk mendukung kekuatan daerah mengantisipasi kristenisasi PWA Sumatera Barat juga membangun beberapa buah TKABA di sekitar lokasi *Islamic Centre* ini, bahkan dengan membawa peralatannya langsung dari Padang.<sup>110</sup>

Beberapa orang yang pernah tampil sebagai penggerak roda organisasi di daerah ini antara lain : Nuryufa Abdul Jabar, Thamrin, Ahmad Namlis dan Sayuti Amin. Sejak beberapa periode yang lalu, kegiatan yang monumental di daerah ini adalah mendirikan sebuah Bank Perkreditan

---

<sup>110</sup>Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 265.

Rakyat (BPR) Syari'ah. BPR ini merupakan dua Lembaga Keuangan Makro yang dimiliki Muhammadiyah Sumatera Barat. Yang satu lagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Nurul Baraqah di Lubuk Alung yang langsung di bawah koordinasi PWM Sumatera Barat.

## **6. Daerah Kabupaten/Kota Solok.**

Menurut catatan Buya Imam Arifin Iskandar, Muhammadiyah masuk ke daerah ini melalui tiga jalur. Pertama, melalui Cabang Simabur ke Nagari Sulit air pada tanggal 15 Januari 1931 yang disponsori oleh Buya AM Burhani, Ahmad Dt. Simarajo. Cabang Sulit air ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh A. Dt. Majo Bungsu, Kahar Tahewr dan M. Zen.

Kedua, melalui Cabang Padang Panjang ke Nagari paninggahan pada tanggal 31 Agustus 1931 yang disponsori oleh S.Y. Sutan mangkuto, ke Nagari Koto Baru oleh HAMKA tahun 1932, begitu juga ke Nagari Singkarak dan padang Belimbing. Ketiga, dari Cabang Padang yang dibawa oleh beberapa orang penduduk Koto Anau yang disponsori oleh Fathimah Latif dan Idris pada tanggal 15 Januari 1936 kemudian diasuh oleh Imam Arifin. Sampai ke Nagari Alahan Panjang. Surian, Muaro Labuah. Ke Lubuk Gadang yang kemudian dipimpin oleh Darwis Daud.

Kini di daerah ini tercatat ad 11 Cabang, 49 Ranting dengan beberapa amal usaha seperti sekolah dan madrasah antara lain TKABA, Tsanawiyah, SMK, Panti Asuhan dan Rumah Singgah. Sebagai catatan bahwa Buya H. Radhin Rahman, Ketua PWM periode 2000-2005 adalah seorang ulama kharismatik dan agak zuhud, beliau berasal dari Nagari Talang Babungo Alahan Panjang Kabupaten Solok. Beliau juga berjasa membawa bibit markisa dari Makasar

waktu pulang Mukhtar ke-38 yang sekarang menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk, sehingga markisa di sekitar danau kembar ini disebut juga markisa Buya Radhin.

Amal usaha unggulan daerah ini adalah SMK bantuan Bank Dunia, berlokasi di Pandan Kota Solok yang diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin bersamaan dengan peringatan Millad Muhammadiyah ke-99 tahun 2009.<sup>111</sup>

## 7. Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawah Lunto.

Muhammadiyah masuk ke daerah ini untuk pertama kalinya di Tanjung Ampalu, Silungkang, Padang Sibusuk dan Sijunjung sekitar tahun 1930-an yang dipelopori oleh Djasiruddin Haes. Kemudian Talawi dipelopori oleh Gudang asal Talawi. Ketika itu masih merupakan grup dari Cabang Padang Panjang terus ke Sumpur Kudus, Silantai, Unggan, Palangki.

Grup-grup ini kemudian dibina secara berkala oleh Buya HAMKA dan buya ZAS dari Padang Panjang hingga mampu menumbuhkan 39 Ranting. Daerah ini dalam pemerintahan telah dimekarkan menjadi dua, yaitu kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Sijunjung. Khusus kota Sawah Lunto sebenarnya telah berdiri sendiri sejak tahun 1970-an, waktu itu dipimpin oleh bapak Tamar Syukur, Nurdin dan setelah dikembangkan menjadi 4 Cabang dan 20 Ranting termasuk Talawi dan Silungkang. Pimpinan dipegang oleh Mahya Khatib dan M. Malik Djamil.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 168.

<sup>112</sup>Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 269.



Daerah ini yang termasuk sukses menyelenggarakan Musywil Muhammadiyah Sumatera Barat ke-39. Meskipun wilayahnya kecil dan SDMnya terbatas, namun kegiatan amal usahanya dapat berjalan lancar. Untuk itu pengajian bulanan sebagai media silaturrohim dan konsolidasi senantiasa diadakan secara tertib diikuti semua Pimpinan Cabang dan Ranting serta Majelis dan Ortom. Dalam pelaksanaannya mendapat dukungan moral dan material dari Wali Kota.

### **8. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Muhammadiyah masuk ke Pesisir Selatan untuk pertama kalinya di Pasar Baru Lakitan pada tahun 1939 disponsori oleh Samik Ibrahim bersama H.A. Manan. Berdirinya Muhammadiyah di sini mendapat tantangan hebat dari Wali Nagari, ninik mamak, dubalang dan lain-lain, sehingga Samik Ibrahim diusir dan terpaksa hijrah ke Sungai Penuh. Mengingat banyak rintangan dalam menggerakkan amal usaha dilaporkan ke Padang Panjang, oleh Majelis Konsul Sumatera Tengah diutuslah Hamka dan R.I. Dt. Sinaro Panjang untuk menyelesaikannya. Namun sesampai di Pasar Baru Lakitan kedua fungsionaris ini ditolak dan diminta segera meninggalkan tempat itu.

Rupanya Hamka sejak mudanya memang sudah kuat prinsip dan seorang yang berani juga seperti ayahnya. Dia minta agar diterima di Kantor Wali Nagari untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Pada awalnya ditolak tetapi kemudian dengan berat hati diterima, namun di sana telah menanti sejumlah ninik mamak, dubalang dan pendekar parit paga nagari. Semuanya tidak ada yang berwajah jernih. Hamka menyampaikan apa hakekat dan tujuan Muhammadiyah dan apa yang hendak diperjuangkan.

Wali Nagari menjawab kami di sini sudah mempunyai agama dan adat, kami tidak akan menambah agama dan adat baru lagi, karena bagi kami ini sudah cukup.

Hamka menjawab lagi bahwa adat dan agama kita sama dan Muhammadiyah mengajak kita bersama untuk membela tanah air dan menantang penjajah. Mendengar perdebatan yang semakin sengit itu ada seorang dubalang sengaja memutar-mutarkan pisaunya yang tersisip dipinggangnya. Dt. Sinaro Panjang mendekati Hamka agar keterangan-keterangannya diperlunak. Akhirnya Wali Nagari memutuskan, jika Muhammadiyah akan terus berdiri di sini, haruslah menating carano untuk menebus kesalahan kepada nagari. Pada malam harinya diserahkannya carano yang berisi uang itu kepada Wali Nagari dan Muhammadiyah boleh terus berdiri. Besok harinya Hamka cs kembali ke Padang Panjang dengan selamat. Setelah itu baru berdiri grup-grup di Tarusan, Kambang, Koto Baru, Surantih dan lain-lain. Beberapa tenaga aktif yang pernah memimpin organisasi ini antara lain : H. Ilyas Maksum, H. Munaf Malin Kayo, H. Ma'rifat Umar, Syahbuddin BA, Djasman, Drs. Muslim Tawakal, SH M.Pd., Drs. H. Zainal Rajo Mato. Kini dipimpin oleh Drs. H. Adril Dt. Bandaro Kuning yang juga Sekda setempat dibantu oleh Drs. Refdinal Saad.<sup>113</sup>

## 9. Daerah Kabupaten Pasaman.

Belum banyak literatur yang dapat memberi informasi tentang awal mula masuknya Muhammadiyah ke Kabupaten Pasaman ini dalam konteks Pasaman Timur menurut istilah

---

<sup>113</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 271.

Muhammadiyah. Namun dapat diyakini bahwa Rao Mapattunggul dan sekitarnya merupakan tempat pertama penyemaian Muhammadiyah yang diresmikan 14 Desember 1932, pada tahun 1941 telah berdiri beberapa sekolah Muhammadiyah di sana termasuk di Rumbai di mana salah seorang gurunya adalah buya HAK. Dt. Gunung Hijau, kemudian diiringi Panti, Tapus, Bonjol dan Lubuk Sikaping.

Pada saat ini tercatat 7 buah Cabang dan 25 Ranting menjadi binaannya. Tidak banyak nama yang dapat diingat siapa saja yang pernah berkiprah di Daerah ini sebagai Pimpinan kecuali yang teringat seperti bpak Azwar Gani tahun 1970-an. Beliau putra Malalo Tanah Datar yang menjadi Kepala SMA di Lubuk Sikaping. Ia lama sekali berkiprah (1970-an) sebagai Ketua PDM dan termasuk yang gigih dan tekun mengurus persyarikatan. Kemudian dilanjutkan oleh Drs. A.M. Siregar dan Drs. Palatua, SH.<sup>114</sup>

Berdasarkan pantauan Pimpinan Wilayah daerah ini satu-satunya yang secara rutin tiap tahun ambil bagian terbanyak mengirim mahasiswa kader ke Universitas Muhammadiyah di Solo dan Yogyakarta. Yang jelas dua orang Ketua PDM yang disebut terakhir adalah alumni Pondok Nuriah Shobron Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## 10. Daerah Kabupaten Dharmasraya

Daerah ini semula menyatu dengan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung sebelum dimekarkan pada tanggal 7 Januari 2004. Muhammadiyah masuk ke daerah ini melalui

---

<sup>114</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 271.

Kabupaten Solok untuk pertama kalinya di Pulau Punjung dari Cabang Padang Panjang. Pada tahun 1930 Ranting Pulau Punjung menjadi Grup dari Cabang Padang Panjang yang dibawa oleh Usmaniah Pk. Kayo. Pimpinan pertamanya adalah Peto Mulia. Kemudian dilanjutkan pembinaannya oleh Imam Arifin Iskandar sampai tahun 1936. Yang menjadi pimpinan pertamanya adalah Khatib Labieh. Sedangkan untuk nagari-nagari Lubuk Tarab, Buluh Kasab, Sibakur, Langkai, Bonai dan Silago, didatangi atas nama Cabang Solok dengan utusan : Husin Engku Mudo, Muhibbah dan Muhammad pada tahun 1938. Tokoh-tokoh utama di daerah ini kita kenal seperti Djasiruddin Haes, Dahlan Siri<sup>115</sup>.

Semangat ber-Muhammadiyahnya sejak awal sampai sekarang tertanam dan ditanamkan secara turun temurun dengan cara mengutus putra-putrinya belajar di *Sekolah-Sekolah Kader* Muhammadiyah seperti Kulliatul Mubalighin di Padang Panjang dan Fakultas Syari'ah UMSB di Padang. Metode seperti ini tampaknya sangat bermanfaat, sehingga mentalitas kader persyarikatan itu betul-betul tertanam secara sistematis dan cukup akurat.

Banyak pimpinan Muhammadiyah yang mereka datangkan hampir setiap tahun baik dari level Wilayah maupun dari Pimpinan Pusat, dengan mengadakan berbagai kegiatan baik yang bersifat seremonial maupun dalam rangka pembinaan mental rohani. Kini Pimpinan Daerah dikendalikan oleh Khadir Nyaman dan Mualimin.

## 11. Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Secara administratif daerah ini baru menjadi Kabupaten tersendiri sejak tanggal 12 Oktober 1999.

---

<sup>115</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 272.

Semula merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang ada Muhammadiyah telah masuk ke Mentawai untuk pertama kalinya di Muara Siberut, Siberut Selatan pada tahun 1952. Waktu itu Muhammadiyah dibawa oleh seorang pedagang asal Batusangkar bernama Adam. Kemudian berdiri pula di awal tahun 1960 di Matobek Sipora yang dibawa oleh seorang ustad bernama Bahar.

Meskipun pertumbuhannya belum pesat, namun tetap berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1971 Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat membentuk Yayasan Dakwah Mentawai dengan Akte Notaris A. Khadir Usman No. 29, tanggal 28 Agustus 1971. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut : Ketua Zainuddin Zen, Sekretaris Bakri, Bendahara Idris Manaf. Anggota-anggotanya adalah : Drs. Abdul Hakim, Taher Idris, M. Daris BA, dan H. Sd. Zainuddin.

Untuk menggerakkan usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah di daerah Kepulauan Mentawai ini, melalui Yayasan tersebut Presiden Soeharto memberikan bantuan sebesar Rp. 100.000,-. Alhamdulillah sejak itu Muhammadiyah tidak pernah henti menggeliat di kepulauan yang merupakan basis Kristenisasi itu. Muhammadiyah pernah bekerja sama dengan Departemen Sosial, dengan Departemen Agama dan juga dengan Yayasan Muslim Luar Negeri seperti Darul Birri yang sejak beberapa tahun terakhir berganti nama dengan AMCF (*asia Muslim Charity Foundation*) yang berpusat di Dhuhai Abu Dhabi<sup>116</sup>.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain menempatkan mubaligh yang meliputi hampir semua Kecamatan, juga mendirikan mesjid/mushala, lembaga pendidikan dan Panti

---

<sup>116</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 273.

Asuhan. Di sini telah dibangun sebuah Mesjid Taqwa, Madrasah Tsanawiyah dan Kantor PDM Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada tahun 2000 telah diadakan dua kali Safari Dakwah yang dipimpin oleh H. Amri HD, BA. Anggota rombongan dari Muhammadiyah dan Angkatan Muda, antara lain : H. Bazar Abas, dr. Masri Abdullah, Drs. Yusfik Helmi Dt. Yang Sati, Firdaus AN, S.Ag, Drs. Saridam SH, Drs. Hariadi, Drs. Rusdin Batahan, Yong Sasri dan Al Imran Yunus BA. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam Safari Dakwah ini antara lain Pesantren Kilat, Sunatan Massal dan Kursus Kader Mubaligh. Beberapa orang tenaga da'i yang pernah ditempatkan sebagai da'i atas nafkah dari LDK Pusat di Kepulauan ini adalah : Abdul Hakim di Siberut Selatan, H. Fuad Kasmy di sipora, Gerti di sikakap.

Sejak Kepulauan Mentawai ini dipisah dengan Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kabupaten tersendiri, gerak Muhammadiyah pun semakin dimantapkan dengan mendirikan Pimpinan Daerah dan Sekretariat sendiri yang berkedudukan di Tua Pejat ibukota Kabupaten yang baru. Mulai tahun 2006 atas kerja sama dengan Yayasan AMCF kembali ditempatkan 20 orang da'i setelah mendapat pelatihan khusus dalam bidang dakwah dan pembangunan masyarakat pedesaan.

Yang diberi amanah untuk memegang tampuk pimpinan daerah periode 2005 – 2010 adalah H. Amri HD, BA selaku Ketua, dan Sekretaris Drs. Ali Imran Lubis. Dalam tugasnya dibantu beberapa orang penduduk asli yang telah menjadi anggota persyarikatan. Adapun Cabang-Cabang yang telah terbentuk adlaah : Cabang Kecamatan Siberut Utara, dipimpin oleh Gilong (penduduk asli) Cabang Kecamatan Siberut Selatan, dan Cabang Kecamatan Sipora.

## 12. Daerah Kabupaten Solok Selatan

Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang paling bungsu yang dimekarkan dari Kabupaten /Kota Solok pada awal tahun 2009, mengikuti pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah. Pimpinan Daerahnya sudah dilantik dengan Ketuanya H. Rosman effendi, SE, SH, MBA pada waktu terpilih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut. Sedangkan pengesahan wilayah teritorial Organisasi secara administratif juga telah diterbitkan oleh Pimpinan Pusat. Dengan demikian Pimpinan Daerah ini juga telah diikutkan sebagai anggota Mukhtar satu abad yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 3 – 8 Juli 2010.

Jika kita menengok ke belakang sebenarnya secara faktual Muhammadiyah telah masuk ke daerah ini sejak tahun 1938 di Muara Labuh dan Sangir, Lubuk Gadang. Beberapa kegiatan sejak dimekarkan telah diadakan seperti pembinaan dan pengembangan Cabang dan Ranting, terakhir peringatan Milad satu abad tanggal 2 Januari 2010 di Muara Labuh di mana PDM berkantor.<sup>117</sup>

Amal usaha yang telah ada di samping beberapa buah sekolah (PAUD dan TKABA), juga telah diresmikan Panti Asuhan Muhammadiyah dengan dua bangunan permanen (asrama dan mushola) yang merupakan wakaf dari Ibu Nurhamidar Yusuf. Panti ini juga dijadikan Panti binaan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Wilayah Regional Sumatera di Padang. Kini PDM yang baru ini dalam menggerakkan sehari-hari dibantu oleh

---

<sup>117</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 276.

beberapa orang tenaga, antara lain Bapak Muchtar Buchori, Bapak Lubis dan Ibu Amoi.

### 13. Daerah Kota Padang Panjang

Sejarah Muhammadiyah di kota Padang Panjang ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis, karena di kota inilah awal mulanya organisasi yang bersimbol matahari dengan dua kalimah syahadat itu mulai bersinar dan memancarkan sinarnya hampir ke seluruh pelosok tanah air.

Dari Padang Panjang ini pula lahir sejumlah tokoh pergerakan nasional yang bergumul di kancah politik menentang penjajah, merintis kemerdekaan dan mempertahankan serta mengisinya dengan berbagai gerak pembangunan yang bernafaskan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan dalam arti yang lebih luas.

Kehadiran Muhammadiyah dengan segenap amal usahanya dalam bidang pendidikan, sosial dan pembinaan mental keagamaan tidak dapat lagi dipisahkan dari jati diri kota ini yang mendapat julukan Serambi Mekkah. Sejumlah sekolah mulai dari peringkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang berpusat di Kompleks Kauman Padang Panjang yang dibangun sejak tahun 1926 hingga sekarang tidak pernah berhenti berdenyut, bahkan semakin bergetar meramu dan merakit bangunan fisik dan mental sosial dan spiritual.

Alhamdulillah *output* dari perguruan ini jumlah besar merupakan tulang punggung yang kuat dalam menggerakkan Muhammadiyah hingga hidup subur dan berbuah. Harus diakui bahwa memang sedikit agak berbeda aromanya di masyarakat jika seorang kader yang berasal



dari kelulusan/produk pendidikan dari kaum Padang Panjang ini dibanding dengan perguruan yang sama dari dan di tempat lain. Sebut saja alumni Kulliyatul Mubalighin, Fakultas Agama Islam Jurusan Dakwah dan sebagainya.<sup>118</sup>

Untuk mengenang Lembaga Pendidikan yang berbasis kader tersebut, pada tahun 2006 telah diadakan Reuni Akbar bersamaan dengan peringatan Milad ke- 80 berdirinya Muhammadiyah di Minangkabau. Acara yang dilaksanakan di Kauman itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Bambang Sudibyo didampingi mantan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Yahya Muhaimin dan Dr. Fasli Djalal. Sedangkan dari alumni yang hadir antara lain : Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, Ir. H. Yanuar Muin, Asnawi Mukti dan lain-lain.

Untuk mengelola Kompleks Kauman ini lebih intensif dibentuk Badan Pembina Kompleks Perguruan Muhammadiyah (BPKPM). Badan ini lama dipimpin oleh Bapak H. Hasan Ahmad dibantu Drs. Kholidi Deli. Kini dipimpin oleh Prof. Dr. Yunan Yusuf dibantu oleh Drs. Izhar Ilyas dan Drs. Tarmizi Zakaria. Sedangkan jajaran Aisyiyah adalah Umi Djawanis Syarif (Ibunda dari Bapak Prof. Dr. Tarmizi Taher) Ibu Zubaidar Ahmad, Ibu Aisyah AR dan kini dipimpin oleh Dra. Fauziah Ahmad.

#### **14. Daerah Kota Bukittinggi**

Kota Bukittinggi ini di samping terkenal dengan Benteng Ford de Cock yang dibangun Belanda dan jam gadang yang bertengger sejak dua abad silam, juga ikut dipopulerkan dengan pergerakan Muhammadiyah yang

---

<sup>118</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 178.

cukup berani dan menantang. Pada tahun 1930 di kota ini pernah diadakan Konggres Muhammadiyah ke- 19.

Pada waktu itu pengamalan ajaran Islam di Minangkabau masih campur aduk dengan berbagai budaya Budha dan Hindu yang sangat mempengaruhi budaya kehidupan masyarakat terutama dalam bidang keyakinan dan kepercayaan terhadap roh-roh jahat, tempat-tempat sakti, sehingga banyak azimat dan jampi-jampian yang berujung pada perbuatan *syirik*, *khurafat*, dan *tahayul*.

Namun dengan dorongan tekadan semangat untuk memperkenalkan Islam yang *kaffah* dan berkemajuan, berfikir kritis, rasional dan cerdas Muhammadiyah melalui Konggresnya itu mencoba mendobrak dinding-dinding tembok yang begitu kuat. Islam yang diperkenalkan tidak saja sebatas wacana tetapi menjadi praktik dalam kehidupan nyata, sehingga dapat diterima dan menjadi modal kuat untuk merebut dan menopang kemerdekaan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang berdaulat<sup>119</sup>.

Meskipun Muhammadiyah mulai berdiri sejak tahun 1928 dengan Besluit HB No. 71, tanggal 20 Juli 1928, namun secara struktural Muhammadiyah Daerah Bukittinggi ini pada awalnya bergabung dengan Kabupaten Agam. Namun sejak tahun 1993 dimekarkan berdiri sendiri dengan dukungan 3 Cabang, 9 Ranting dan berbagai amal usaha seperti 3 buah Panti Asuhan, 5 buah TKABA, 4 buah MDA, 1 buah Tsanawiyah, SMA dan SMK masing-masing 1 buah dan 1 buah Santunan Keluarga yang menyantuni 65 orang anak asuh dari keluarga miskin.

## 15. Daerah Kota Padang

---

<sup>119</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 280.

Berdasarkan catatan yang dibuat Engku Abu Bakar M. Muhammadiyah telah berdiri di Kota Padang sejak tanggal 20 Mei 1928 yang diawali dengan musyawarah di rumah Engku Ibrahim di Andalas. Rapat ini dihadiri langsung oleh S.Y. Sutan mangkuto dari Padang Panjang. Setelah dilaporkan ke Pengurus Besar di Yogyakarta keluarlah ketetapan bahwa Grup Padang ini berada di bawah Verloves (Cabang) Padang Panjang. Kemudian baru berdiri sendiri sebagai Cabang pada tahun 1930, karena telah ada tiga Ranting yaitu : Andalas, Ketaping dan Kalumbuk. Kemudian diikuti berdirinya Grup Marapalam oleh Pakih Duraman (1930), Lubuk Bagalung oleh Ismail Syamsuddin (1932), Teluk Bayur oleh Yacub Rasyid (1931), Koto Panjang Jati / Balantung oleh Pakih Husen (1931), Pasa Gadang oleh H. MU'awiyah (1932), Pisang oleh Abd. Latief, Nanggalo oleh Pakih Jabar (1932), Kalumbuk oleh Abdullah Sulaiman (1933), Korong Gadang oleh H. Umar (1933), Alai dan Ampang oleh M. Tas (1933), Sungai Sapih oleh H. Darwas Idris (1933), Ulak Karang dan Bungus, Taluk Kabung oleh Pakih Katon (1933), Koto Tengah oleh Pakih Salih (1933).<sup>120</sup>

Setelah itu di Nagari pauh IX seperti : Koto Tinggi, Kuranji, Balimbing, Pasar Ambacang, Cubadak Air, Kampung Kalawi. Di Nagari Pauh V : Cupak Tengah, Simpang Piai, Binuang, Piai Tengah, Limau Manis, Bandar Buat dan Indarung. Di Lubuk Bagalung : Kampung Jua, Pagambiran dan Gaung.

Kini kedudukan Muhammadiyah kota Padang ini diperkuat oleh 14 Cabang dan 88 Ranting, dengan beberapa amal usaha seperti : 6 buah Panti Asuhan, 1 buah SMK dan 3 buah SMU berikut 1 buah RSB dan 31 TKABA yang dikelola

---

<sup>120</sup> Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid.*, hal. 282

oleh Aisyiyah. PDM Kegiatan terobosan yang dilakukan sejak tahun 2007 adalah mengadakan sholat Id di lapangan Imam Bonjol, bekerja sama dengan Pemda Kota dan Kodim 0312 Padang.

#### **4.4. Kerja Sama Dalam Negeri**

Sejak Muhammadiyah masuk ke Minangkabau tahun 1925, telah terbukti bahwa perserikatan yang tergolong pembaharu dan dijuluki sebagai kaum muda ini, berfikir reformis, kritis dan realistik dalam gerakan organisasi yang modernis. Ia senantiasa mengajak ummat Islam dalam kebersamaan ummat yang berkemajuan. Untuk itulah Muhammadiyah sering tampil membangun kerja sama baik dalam konteks kesatuan dan persatuan maupun dalam mewujudkan amal usaha, antara lain :Pada awal kemerdekaan (setelah kembali ke kedaulatan) di mana Pemerintah RI belum dapat membangun gedung-gedung Sekolah Dasar, sementara pendidikan harus digalakkan termasuk pemberantasan buta huruf. Didorong rasa syukur atas kemerdekaan dn cinta tanah air serta tanggung jawab moral untuk membangun bangsa, maka 94 buah gedung Sekolah Muhammadiyah di beberapa cabang dan ranting dipinjamkan kepada Pemerintah untuk ditempati Sekolah-Sekolah Dasar Negeri. Dari tahun 1950 sampai 1956 pinjaman itu gratis, tetapi mulai bulan Mei 1956 Pemerintah memberikan berupa uang Rp. 40,- (Empat puluh rupiah) per lokal sekedar untuk pemeliharaan gedung. Dana ini dibayarkan tiap bulan kepada Perwakilan Muhammadiyah Sumatera Tengah. Alhamdulillah dari dana yang terkumpul ditambah usaha-usaha lain gedung-gedung yang rusak dapat diperbaiki dan yang baru pun dapat dibangun, termasuk persiapan gedung untuk Fakultas Falsafah dan Hukum di

Kauman Padangpanjang yang terkenal dengan bangunan bambu, karena memakai bahan dari bambu/betung dan uangnya dikumpulkan dari sumbangan pakaian dan koran bekas, telur ayam dan sebagainya.

Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan ummat Islam di Sumatera Barat, lebih-lebih setelah diguncang pengkhianatan Gestapu PKI tahun 1965, di mana ummat Islam ditindas dan hampir-hampir saja Partai Komunis yang anti Tuhan berkuasa di Republik Indonesia ini. Maka pada tanggal 27 Shafar 1387 H bertepatan 5 Juni 1967 ditanda tangani Piagam Kerja sama Ummat Islam Sumatera Barat yang berbunyi sebagai berikut :

#### “PIAGAM KERJA SAMA UMAT ISLAM SUMATERA BARAT”

Bismillahir rahmani rahim

1. Bahwa kami sepakat untuk senantiasa membina kelangsungan hidup dan kehidupan “Badan Kontak Perjuangan Umat Islam Sumatera Barat” sebagai satu-satunya wadah yang akan mengkoordinir dan memenangkan perjuangan ummat Islam di Sumatera Barat.
2. Bahwa demi untuk menjaga persatuan dan terwujudnya ukhuwah Islamiyah bagi suksesnya cita-cita perjuangan ummat Islam, kami akan selalu berusaha menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat dan secara positif kami akan bertindak korektif dalam tubuh kami masing-masing.
3. Bahwa kami berkeyakinan dan sependapat, pemilihan umum yang akan datang sangat penting artinya bagi ummat Islam dalam merebut political power dan *political authority*. Justru itu wajib hukumnya bagi setiap ummat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara konskuen sepanjang tata

krama demokrasi Pancasila, demi kemenangan umat Islam dalam pemilihan umum tersebut. Dalam menghadapi kampanye pemilihan umum itu, satu-satunya garis kebijaksanaan yang menjadi pegangan kami adalah "*Asyiddaau 'alalkuffaari - ruhammaa-u bainahum*" serta menghormati dasar-dasar persatuan yang diikat oleh rasa ukhuwah Islamiyah.

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi dan maksud piagam ini secara merata dan meluas di kalangan masyarakat Islam, sehingga ukuwah Islamiyah benar-benar menjiwai seluruh gerak gerik dan tata kehidupan masyarakat dalam wujud perjuangan umat Islam untuk menegakkan keadilan dan kebenaran maka masing-masing parpol/ormas Islam yang turut bertanda tangan dalam piagam ini, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh parpol/ormas Islam pada semua tingkat dalam daerah Sumatera Barat, agar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melaksanakan isi dan maksud piagam ini dengan sebaik-baiknya.

5. Semoga Allah akan selalu memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita sekalian. Amin.

Billahi Fii Sabilil Haq.

Padang, 27 Shafar 1387 H

05 Juni 1967 M

Partai Politik dan Ormas Islam Sumatera Barat

DPD Partai Islam  
Perti,

dto

		PW PSII
(Zaidalani Chatib)	dto	
<i>Ketua Umum</i>		
	(Albizar Djalal)	dto
Pimpinan Muhammadiyah	<i>Ketua/Bid.Pol</i>	
		(Salim Halimi)
		<i>Ketua</i>
dto	Perw. Badko HMI	
(HAK. Dt. Gunung Hijau)	dto	PW. PII
Ketua		
	(Drs. Med. Sabaruddin)	dto
	Ketua	
PW Nahdatul Ulama,		(Muslim Aboud Ma'any)
		Ketua

Dalam rangka mensukseskan program pembangunan Rumah Sakit Islam Bukittinggi, setelah berhasil menggerakkan umat Islam yang didukung oleh Komando Angkatan Muda Islam (KOAMI), untuk membatalkan beroperasinya Rumah Sakit Imanuel yang berbasis pemurtadan di Bukittinggi, umat Islam Sumatera Barat bangkit di bawah bimbingan Bapak Dr. Moh. Natsir dan Buya HMD Dt. Palimo Kayo membangun *Rumah Sakit Islam Yarsi* di Belakang Balok Bukittinggi sebagai wujud kepedulian dakwah bilhal, sekaligus membuktikan bahwa Islam juga mampu membendung umatnya dari iming-iming pengobatan gratis untuk dimurtadkan.

Muhammadiyah dan Yarsi membuat kesepakatan tak resmi bahwa untuk pengembangan rumah sakit ini ke depan di beberapa daerah Kabupaten/Kota diadakan pemetaan, di mana yang sudah ada Unit Kesehatan PKU Muhammadiyah, di sana tidak dibangun lagi Unit Kesehatan Yarsi dan begitu pula sebaliknya. Kerja sama untuk mengoperasikan RSI Belakang Balok ini diawali dengan meminjamkan seorang dokter PKU Muhammadiyah yaitu Dr. Abbas Thalib untuk memimpin RS yang baru ini, walaupun berlangsung dalam waktu yang tidak lama (Oktober 1969 – April 1970) karena Yarsi belum mendapatkan dokter yang bisa *fulltime*.<sup>121</sup>

Tahun 1994 untuk pertama kalinya melalui Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Departemen Agama RI diberikan kesempatan dari Muhammadiyah beberapa orang untuk Petugas Haji Indonesia baik sebagai Ketua Kloter maupun Pembimbing Ibadah. Untuk giliran yang pertama ini dari PWM Sumatera Barat diutus Drs. RB. Khatib Pahlawan Kayo dengan tugas sebagai Ketua Kloter memimpin jamaah kloter 5 Sumatera Barat/22 Medan sebanyak 480 orang yang berasal dari kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Kota Sawah Lunto dan Kota Padang.

Setelah kembali, atas inisiatif mantan Ketua Kloter, pada tahun 1995 dirintislah berdirinya “*Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah*” yang pertama di bawah koordinasi PWM Sumatera Barat dengan Ketua dan Wakil Ketua Drs. RB. Khatib Pahlawan kayo dan H. Munir Manaf, Sekretaris dan Bendahara HAM Nurty BA dan Mardjis Mahmoed. Untuk tahun-tahun berikutnya kerja sama ketenagaan ini tidak lagi melalui PP, melainkan langsung

---

<sup>121</sup>Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) Dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010), hal. 287.



dengan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah berturut-turut hampir setiap tahunnya wakil Muhammadiyah tetap dilibatkan, meskipun melalui testing dan dengan beberapa persyaratan yang cukup ketat. Nama-nama yang berhasil lulus dari wakil PWM Sumatera Barat itu adalah : (1995) A. Mora Lubis, (1996) M. Daris BA dan Dr. Bustanuddin Agus, (1997) Syahrui Tanjung BA dan Prof. Drs. Nuranas Djamil, (1998) Drs. Syamsir Roust, (1999) Drs. Nursal Saeran MA, (2000) Dr. Helmi Suyuti, (2001) Drs. Mirwan Pulungan, (2002) Drs. Shofwan Elha, (2003) Drs. Dasril Ilyas, (2004) Drs. Afrizal Thaib, (2005) Drs. Muslim Hamid, (2006)-2008) Kosong, (2009) Drs. Adrian Muis Chatib Saripado<sup>122</sup>.

Pada tanggal 10 November 2003 bersamaan dengan peringatan hari Pahlawan, sebagai realisasi dari Memorandum Persepahaman antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, di Kota Padang telah diadakan *Roadshow* Ramadhan bertempat di Asrama Haji Parupuk Tabing, yang intinya merupakan sosialisasi Gerakan Anti Korupsi di luar Jawa. Pada kesempatan ini tampil berbicara Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Ketua PB Nahdhatul Ulama Ir. Sholahuddin Wahid, serta pembacaan puisi oleh Taufik Ismail. Acara ini diikuti lebih kurang 1000 orang anggota dan simpatisan Muhammadiyah dan NU bekerja sama dengan Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat. Gubernur H. Zainal Bakar, SH waktu menerima kedua unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan NU Sumatera Barat, tanggal 30 Oktober 2003 mengharapkan agar momentum ini dijadikan tekad suara rakyat Sumatera Barat yang kritis dan ingin memberantas korupsi secara menyeluruh.

---

<sup>122</sup>*ibid.*, hal.. 288.

Dalam rangka mempercepat proses pensertifikatan tanah wakaf di Sumatera Barat, pada tahun 2007, telah ditanda tangani MOU antara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Drs. RB Khatib Pahlawan Kayo dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Hj. Ary Yuriwit SH. Memorandum Persepahaman ini meliputi percepatan persertifikatan tanah wakaf yang berada di bawah koordinasi Muhammadiyah di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Di dalamnya dimuat kewajiban masing-masing pihak dan fasilitas apa yang diberikan oleh Pemerintah dalam merealisasikannya. MOU ini merupakan kelanjutan dari MOU tingkat Nasional antara Ketua PP Muhammadiyah dengan Kepala BPN dan akan berakhir pada bulan Desember 2010.

Dalam rangka syukuran terpilihnya Prof. Dr. Ahmad Syafi'i / Ketua PP Muhammadiyah 2000 – 2005, sebagai penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award dari Pemerintah Philipina. Bekerja sama dengan Pemda Sumatera Barat., PT Semen Padang dan IVMI Orwil Sumbar pada hari Sabtu tanggal 1 November 2008 di Gedung Serba Guna PT Semen Padang<sup>123</sup>.

Dalam suasana duka ditimpa musibah gempa tanggal 30 September 2009, di samping yang telah disebutkan sebelumnya, juga terjadi hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama untuk mendirikan kembali bangunan fisik amal usaha Muhammadiyah yang runtuh seperti : *Pertama*, Pembangunan Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah, diterima bantuan melalui jasa baik bapak Wali Kota Padang Drs. Fausi Bahar dari Tim Silet RCTI untuk membangun gedung panti sampai siap, (terima kunci). *Kedua*, Dari Bupati Bantul DIY bersama PT Penerbit Harian

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 290.

Kedaulatan Rakyat Yogyakarta uang sebesar Rp. 1, 8 Milyar untuk membangun kembali mesjid Muhammadiyah di Ranting Marapalam Cabang Padang Timur kota Padang. Bantuan dari sumber yang sama juga diberikan untuk pembangunan kembali Panti Asuhan Aisyiyah Pincuran Tujuh Lubuk Basung Kabupaten Agam. Terakhir dari PWM Jatim dan UMM sebesar Rp. 1,6 milyar untuk beberapa AUM dan Aisyiyah.

#### 4.5. Kerja Sama Luar Negeri

Pada tahun 1974 dalam rangka mensukseskan program nasional Keluarga Berencana menurut versi Muhammadiyah. Melalui keputusan Majelis Tarjih telah dirumuskan pedoman Keluarga Sejahtera dan kemudian berkembang menjadi Keluarga Sakinah. Dengan adanya kemandirian Muhammadiyah itu, maka secara nasional Majelis PKU Muhammadiyah di bawah kepemimpinan H. Kusnadi dan Drs. Hadjid ditunjuk sebagai Unit Pelaksana dengan nama program keluarga sejahtera. Untuk mendukung program ini bekerja sama dengan lembaga kesehatan luar negeri "*Fad Finder Fund*" yang berpusat di Amerika Serikat.<sup>124</sup>

Di Sumatera Barat, di bawah koordinasi Buya HAK Dt. Gunung Hijau dan dr. Alius Aliloeddin sebagai Ketua/Wakil Ketua dan RB Khatib Pahlawan Kayo sebagai Sekretaris ditempatkan tenaga-tenaga pelaksana (dokter dan para medis) pada tiga lokasi, masing-masing Rumah Bersalin Aisyiyah Padang, Klinik Bersalin Aisyiyah Gaung dan Payakumbuh. Kerjasama ini hanya berlangsung 3 tahun

---

<sup>124</sup> Azyumardi Azra, *Islam : Politik dan Kultural* (11 Juni 2009), (Jakarta : Republika, 2009).

sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tetapi bagi Muhammadiyah yang penting adalah melalui kegiatan ini amal usaha kesehatan dapat dihidupkan, seperti pengembangan Balai Pengobatan PKU di Masjid Raya Muhammadiyah Jln. Bundo Kanduang No. 1 Padang, Poliklinik aisyiyah Tanjung Sabar, Balai Pengobatan PKU Muhammadiyah Cupak Solok dan BKIA Muhammadiyah PasirIV Angkek Agam yang dijadikan sebagai satelit.

Kemudian dilakukan kerja sama lagi. Pada periode kepemimpinan Buya H. Radhin Rahman yang didampingi Bapak Drs. H. Thamrin (1990 – 1995), dirintis kerja sama dengan Yayasan Al-Biiri yang berpusat di Dhubai Abu Dhabi. Kerja sama ini meliputi pengiriman Da'i dan pembangunan mesjid di lokasi-lokasi masyarakat terasing dan transmigrasi seperti di Sitiung, Pasaman Barat, dan Mentawai . Kerja sama ini sempat terhenti beberapa periode, baru pada periode Dr. Shofwan Kharim Elha, MA (2000 – 2005) kerja sama ini dilanjutkan kembali sampai sekarang dengan kegiatan selain pengiriman da'i lebih intensif juga melaksanakan proses pembelajaran formal melalui lembaga "Ma'had Zuber bin Awwam" dengan konsentrasi Bahasa Arab dan Dirasah Islamiyah dengan target 400 orang santri (200 laki-laki dan 200 perempuan). Khusus untuk santri laki-laki operasionalnya dilaksanakan di UMSB (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat) dan untuk santri perempuan di perguruan Aisyiyah Wilayah Sumatera Barat. Amat disayangkan jumlah santri yang dapat mengikuti program D-2 ini baru separuhnya. Hal ini disebabkan karena beratnya mata kuliah dan banyak yang sudah bekerja<sup>125</sup>.

---

<sup>125</sup> Marjohan, *Universalitas Islam-Merambah Tradisi Intelektual*, Lubuk sikaping : Mita Luhur, 2006), hal. 49.

Melalui Wakil Ketua PWM Sumatera Barat Drs. RB Khatib Pahlawan Kayo (1999) ketika kembali menghadiri Seminar Tiga Serantau IMT-GT di Shongkla Thailand, sebelum pulang ke Padang mampir di Persatuan Muhammadiyah Singapura, kepadanya diminta kesediaan untuk menjembatani kerja sama dengan IAIN Imam Bonjol Padang guna mendirikan sebuah

Pengajian Tinggi Islam yang sudah lama dicita-citakan. Berawal dari pendekatan yang baik dengan Rektor IAIN pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Abd. Aziz Dahlan dengan dua Pembantu Rektor Kader Persyarikatan (Dr. Edi Safri dan Dra. Meilarni Rusli) proses persiapan MOU hingga penanda tanganannya berjalan lancar dalam waktu lebih kurang 6 bulan. Setelah segala sesuatunya disiapkan, pada tanggal 15 April 2000 dilakukan upacara penandatanganan MOU di Singapura yang dihadiri Rektor dan Pembantu Rektor I/IV IAIN Imam Bonjol (Dr. Maidir Harun / Dr. Edi Safri), Presiden Persatuan Muhammadiyah Singapura Syaik Husain bin Syaik Ya'cub, Menteri Kanan Sekitaran Kerajaan Singapura Shidiq Sanif dan atase Pendidikan Kedutaan Besar RI di Singapura Ibu Nining<sup>126</sup>.

Sebagai sebuah penghargaan kepada orang asing, di samping ikut sebagai pengasas (pendiri), Drs. RB Khatib Pahlawan Kayo juga ditetapkan sebagai Pengarah (Dekan) pertama dari Lembaga Pengajian Tinggi Islam yang diberi nama "***Kolej Islam Muhammadiyah***" (KIM) Jurusan Manajemen Dakwah ini. Namun karena masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), tentu saja tidak memungkinkan *ful time*, Jawatan Kuasa ini hanya dipegang selama 6 bulan saja. Itu pun harus bolak-balik Padang – Singapura atas izin dari pimpinan Unit Kerja di Jakarta. Dan

---

<sup>126</sup> Khatib Pahlawan kayo dan Marjohan, *Op. Cit.*, hal. 293.

setelah itu hingga saat ini Drs. RB. Khatib Pahlawan Kayo diberi amanah sebagai *Konsultan Manajemen* dan pensyarah tamu. Pensyarah-pensyarah lainnya yang ikut berjihad membangun lembaga pengajian tinggi untuk menciptakan kader dan mujahid dakwah di negeri jiran ini, antara lain : Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Prof. Dr. Mansoer Malik, Prof. Dr. Maidir Harun, Prof. Dra. Hj. Meiliarni Rusli, Dr. Shofwan Kharim Elha, MA, Dr. H. Zulkarnaini. Alhamdulillah sejak berdirinya tanggal 15 April 2000, telah berhasil menamatkan dua angkatan; *pertama*; Program D-2 sebanyak 9 orang yang diwisuda pada tanggal 31 Mei 2003 di Kampus IAIN Imam Bonjol Lubuk Lintah Padang; *kedua*; 22 orang (program D-2 10 orang, S-1 sebanyak 12 orang) diwisuda pada tanggal 26 Oktober 2008 di Dewan Library Tampines Singapura. Jika ditelusuri dengan cermat kerja sama dengan Muhammadiyah Singapura ini sebenarnya merupakan mata rantai yang tidak pernah putus dengan Minangkabau. Pasalnya salah seorang peng-asas Muhammadiyah di sana (1957) adalah ustad Rijal Abdullah berasal dari Tilitang Kamang Kabupaten Agam yang hijrah ke sana pada tahun 1942<sup>127</sup>.

Setelah Muhammadiyah mulai bergerak sering dikunjungi oleh Buya Hamka, bersamaan waktunya terjadi peristiwa pelecehan (polemik agama) terhadap kaum muda yang menggerakkan cinta pada Al-Qur'an dan Sunnah di wilayah Johor berbatasan dengan Singapura oleh Mufti Johor; Tuan Sayyid Alwi bin Tahir al-Hadad. Ketika itulah Buya Hamka datang membela dengan risalahnya yang bertajuk "*Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*". Di antara pembina jarak jauhnya sekitar tahun 1970-an adalah Buya HA Malik Ahmad, kemudian tahun 1980-an sering juga mampir dan memberikan pengajian saudara H. Anhar

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hal.294.

Burhanuddin MA, yang telah menamatkan kuliahnya di Mesir dan Libia tahun 2010.

Dalam bidang Perguruan Tinggi, melalui koordinasi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Dr. H. Shofwan Kharim Elha, MA, dibantu kerja keras dan cerdas Dekan Fakultas Kesehatan dan Mipa Drs. Mursyid MMR, yang mengayomi 450 orang mahasiswa, di Bukittinggi pada tahun 2008 yang telah menjalin kerja sama peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Akademik dengan RS Mahkota Medical Centre di Malaka Malaysia. Kerja sama ini meliputi penempatan / magang mahasiswa kebidanan dan keperawatan selama 3 bulan. Kerja sama sejenis juga akan dilanjutkan dengan Putra Hospital di kawasan yang sama.

Untuk meningkatkan mutu RSU Aisyiyah Padang, pada tahun 2007 juga telah diadakan kerja sama dengan Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Kerja sama berujud dalam bentuk peralatan medis bernilai Rp. 760 juta.





## **BAB V**

# **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Selama waktu 87 tahun, yaitu sejak tahun 1925 sampai dengan tahun 2012, di Provinsi Sumatera Barat terdapat perubahan-perubahan dalam masyarakatnya. Perubahan yang terjadi itu perubahan dalam tatanan norma kehidupan masyarakat, sedang dalam tatanan nilai yang ada di dalamnya tidak mengalami perubahan. Nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau tetap berjalan dan menjadi landasan kehidupan serta ikatan masyarakat Minangkabau.

Sebelum masuknya faham reformasi Islam, masyarakat Minangkabau sudah merupakan masyarakat Islam dengan kehidupan agama yang sinkretis, yaitu kehidupan keagamaan Islam yang bercampur pengaruh ajaran animisme, dinamisme, Hindu, Budha, sehingga terdapatlah upacara-upacara Islam dengan menggunakan tata cara kepercayaan pra Islam. Kehidupan seperti ini dikenal dengan nama Islam tradisional.

Di samping upacara keagamaan, kehidupan Islam tradisional tersebut juga mengenai berbagai aspek

kehidupan, antara lain pendidikan, kebudayaan, kewanitaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Kehidupan Islam tradisional berlangsung di Minangkabau sejak akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Kehidupan tersebut menjadi goyah karena masuknya faham reformasi Islam yang dipelopori oleh Muhammadiyah.

Proses masuknya faham reformasi Islam dimulai setelah Muhammadiyah dengan resmi masuk ke Sungai Batang, Maninjau, Luhak Agam dengan satu amal usaha sebagai ujung tombak dan basis pergerakan, yang gaungnya kemudian bergetar sampai ke beberapa daerah di Sumatera Barat lainnya. Pada tanggal 2 Juni 1926 berdiri Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang yang dipelopori oleh Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Dt. Sati. Muhammadiyah Padang Panjang ini pada tahun 1927 mendirikan amal usaha dalam bentuk pendidikan bernama *Holland Inlandsche School (HIS)*.

Setelah berdiri Cabang Muhammadiyah Padang Panjang, secara berturut-turut kemudian muncul Cabang Muhammadiyah Simaboer, Luhak Nan Tuo Tanah Datar (27 Juli 1927); Kemudian muncul Cabang Muhammadiyah Bukittinggi pada tanggal 20 Juni 1928; Cabang Muhammadiyah Simpang Haru Andalas tanggal 20 Mei 1928; kemudian pada tanggal 25 Oktober 1929 muncul Cabang Muhammadiyah Kuranji; Cabang Muhammadiyah Lintau Buo Tanah Datar (17 Mei 1932); Cabang Muhammadiyah Kubang Suliki(5 Desember 1932); Cabang Muhammadiyah Payakumbuh(5 Desember 1932); Cabang Muhammadiyah Rao (14 Desember 1932); Cabang Muhammadiyah Sulit air (14 Desember 1932); Cabang Muhammadiyah Koto Tangah Padang (17 November 1935);

Cabang Muhammadiyah Matur Luhak agam (22 September 1936); Cabang Muhammadiyah Kubang Solok (4 Februari 1937); Cabang Muhammadiyah Talu Pasaman (4 Februari 1937); Cabang Muhammadiyah Limo Kaum Batusangkar (1937);

Cabang Muhammadiyah yang berdiri antara tahun 1925 - 1937 yang muncul diberbagai daerah di Minangkabau kemudian diikuti pertumbuhan Aisyiyah, Hisbul Wathan, Nasyiyatul 'Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Fase antara tahun 1925 - 1937 ini dikenal sebagai fase perintis atau pendobrak.

Selanjutnya pendirian Cabang Muhammadiyah antara tahun 1940 - 1950-an disebut fase berjalan / meniti di atas buih. Perkembangan Cabang Muhammadiyah pada tahun 1950 - 1966 diberi istilah sebagai tahap pandai atau berpandai-pandai. Selanjutnya pertumbuhan Cabang Muhammadiyah antara tahun 1966 - 1998 disematkan oleh sejarawan Muhammadiyah sebagai fase pematangan dan atau kematangan.

Dalam mengembangkan tugas-tugas pendidikan dan dakwah, Muhammadiyah Minangkabau membutuhkan kader-kader militan dan visioner, sehingga dapat melahirkan ulama intelektual dan intelektual yang ulama seperti yang telah diserukan oleh penggiat Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang di masa silam.

Kini, dalam usianya yang hampir satu abad (seratus tahun) bendera Muhammadiyah telah berkibar di seluruh Nagari di Minangkabau Sumatera Barat. Meskipun telah melintasi zaman Kolonial Belanda, Penjajahan Jepang, pra dan pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan era reformasi serta demokratisasi dan juga otonomi yang sedang menapaki citra dan citanya sekarang. Dalam

menggeluti pelbagai zaman itu pula, persyarikatan Muhammadiyah mampu mengukir sejumlah kisah sukses. Muhammadiyah telah mempunyai modal sosial (*social capital*) yang cukup besar dan diperhitungkan sebagai gerakan spiritual, gerakan intelektual, gerakan moral, dan juga gerakan struktural. Dalam bahasa yang lazim diusung oleh Muhammadiyah inilah yang disebut gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid, yang bersumber pada Al Qur'an dan sunnah Rasul.

Organisasi lain, semisal : al-Irsyad, Jamia'tul Khair, Persatuan Islam (Persis), al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Tarbiyah Islamiyah (pecahan dari Perti), Nahdhatul Ulama (NU) dan setumpuk ormas Islam yang lain yang belakangan, boleh mengklaim sebagai organisasi tertua, terbesar dan paling berjasa. Jika itu benar mungkin dari segi kuantitas terutama dalam jumlah anggota dan jamaah. Tetapi juga belum tentu. Namun dalam dimensi kualitatif amal usaha, sumber daya manusia (*human resources*), infrastruktur, *organization system* dan kepercayaan publik (*confidence of public*), organisasi Muhammadiyah yang dideklarasikan oleh Ahmad Dahlan masih lebih unggul, akbar dan *excellent*. Selain di seluruh pelosok Indonesia, organisasi Muhammadiyah ini berkembang di seluruh wilayah Minangkabau, bahkan juga sampai ke luar negeri. Ini menjadi bukti bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia.

## 5.2. Saran

Muhammadiyah perlu membudayakan terus menerus etos kerja, etika kerja dan estetika kerja. Dikatakan begitu karena kita harus belajar dari sejarah. Berhasilnya para

pendahulu pengukir sejarah, dan berada di depan sejarah, justru ditopang oleh etos kerja yang tak mengenal lelah.

Etos kerja yang diwariskan kepada Muhammadiyah generasi kini dapat diformulasikan dalam bahasa singkat dan padat, yaitu *sedikit bicara, banyak kerja*, dahulukan kewajiban daripada hak, utamakan substansi daripada asesori, hargai waktu seperti menghargai ayah ibu, tegakkan disiplin dan jauhi sikap plin plan/ambivalen, dahulukan ummat ketimbang kelompok dan golongan kecil yang sifatnya temporal.

Perlu direnungkan kembali oleh seluruh elemen dan simpatisan Muhammadiyah tentang firman Allah yang terukir sarkastik dan penuh sauc dalam surat Muhammad ayat 7 : *Wahai orang yang beriman ! Jika kamu mampu memancing perhatian dan kasih sayang Allah, maka Allah pasti akan pro dan berpihak kepadamu, dan Allah pasti akan meneguhkan pendirian dan posisimu*". Kemudian dalam surat al-Ankabut : 69 : *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik*". Demikianlah kutipan yang diambil dari ayat Al Qur'an, semoga bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Abubakar, H. Said, *Berjuang Untuk Daerah*, Banda Aceh : Yayasan Nagasakti, 1995.
- Alfian, *Islamic Modernism in Indonesian Politics : The Muhammadiyah Movement During the Dutch Period (1912-1942)*, Winconsin : disertasi, belum diterbitkan, 1990.
- ....., "Peranan Muhammadiyah Dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa Depan", dalam *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta : Panjimas, 1981.
- Arifin, MT., *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990.
- ....., *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta : Dunia Pustaka, 1987.
- Azra, Azyumardi. *Islam : Politik dan Kultural*, Jakarta : Republika, 11 Juni 2009.
- "Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah" dalam *Pedoman Bemuhammadiyah*, Yogyakarta : BKPAMM PP Muhammadiyah, 1992.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : UI Press, 1985.
- Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, Jakarta : Panji Masyarakat, 1974.

- Ilyas, Muhammad, *Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Bidang Sosial Budaya di Kota Padang dan Sekitarnya Tahun 1959-1966*, Padang : Skripsi S1, belum diterbitkan, SKIP-PGRI, 1988.
- Iriani (ed), *Peranan Muhammadiyah Dalam Sistem Pendidikan Islam di Padangpanjang 1950-1965*, Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2001.
- Jainuri, Ahmad. *Ideologi Kaum Reformis Melacak PandanganKeagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya : Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2002.
- Karim, M. Rusli, ed., *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komenta*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Marjohan, *Islam Kontekstual-Pergumulan antara Cita dan Realita*, Lubuk sikaping : Mita Luhur, 2004.
- ....., *Muhammadiyah, Antara Idealisme dan Pragmatisme*, Lubuk Sikaping : Mita Luhur, 2006.
- Nashir, Haedar. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2001.
- ....., *Kristalisasi Ideologi dan Komitmen Bermuhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007.

- ....., *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 1992.
- Nazwar, Akhira. *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta : Temprint, 1987.
- Kayo, Khatib Pahlawan, *Muhammadiyah Dalam Pergumulan Tektual dan Kontektual*, Padang : PW Muhammadiyah Sumatera Barat, 2007.
- Kayo, Khatib Pahlawan dan Mardjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010.
- Kayo, Khatib Pahlawan, dkk., *Muhammadiyah Dari Masa ke Masa di Minangkabau/Sumatera Barat*, Padang : PW Muhammadiyah Sumbar, 1991.
- Lubis, Arbiyah, "Cita dan Corak Pembaharuan Dalam Gerakan Muhammadiyah", dalam Zamroni Mashuda, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*, Banda Aceh : Gua Hira, 1995.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Pandoe, Martias D. "Lahir di Yogyakarta, Minangkabau Membesarkannya", dalam *Muhammadiyah, Perjalanan Sejarah dan Dinamika Internal*, Jakarta : Harian Kompas, 2000.



- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2005.
- Peacock, James L., *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta : Cipta Kreatif, 1986.
- Prodjokusumo, HS., *Menelusuri dan Napak Tilas Perjalanan Muhammadiyah Selama 85 Tahun*, Jakarta : Yayasan Amal Bhakti Masyarakat, 1995.
- Rachmad, Djalaluddin. *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan, 1986.
- Rowi, M. Muchlas, M. Izzul dan Paryanto Rahma, ed., *Muhammadiyah Menuju Milenium III*, Yogyakarta : Pustaka SK, 1999.
- Sairin, Syafri., *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta : LPTP PP Muhammadiyah, 2003.
- Salam, Solichin, *KH Ahmad Dahlan Reformer Islam Indonesia*, Jakarta : Djajamurni, 1963.
- Samsuddin, Din, *Region and Politics in Islam : The Case of Muhammadiyah in Indonesian's New Orde*, California : disertasi, belum diterbitkan, 1991.
- ....., *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990.
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Sampoerno, Daoed, *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah yang Berkualitas*, Yogyakarta : Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 2000.

- Syukriyanto AR. Dan Abdyl Munir Mulkham, ed., *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta : SIPRESS, 1990.
- Tillar, HAR., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka cipta, 2000.
- Widiarto, Agus. *Gerakan Pembaruan Islam*. Artikel di Republika, Edisi 15 Mei 2009.
- Yunus, Bakrum, “Sejarah Singkat Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Aceh”, dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh : Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995.